



Jurnalisme Maritim

Berwawasan Kebangsaan

Susilastuti DN dkk



Jurnalisme Maritim

Berwawasan Kebangsaan

Susilastuti DN dkk

Penulis

Susilastuti Dwi N,
Nikolaus Loy,
Agung Prabowo,
Arif Wibawa
Saibansah Dardani

Desain Cover

Hendriyati
Rassel

Ukuran Buku

16 x 24 Cm
Halaman
xv + 154 halaman

ISBN

9 78-62338-891042
Cetakan I tahun 2022

Diterbitkan Oleh :

**LPPM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta**

Jl .SWK 105 Ring Road Utara Condongcatur Yogyakarta
Telp/fax : 0274 486733

KATA PENGANTAR

KEDUBES AMERIKA SERIKAT DI JAKARTA



Misi Amerika Serikat untuk Indonesia senang bisa berkolaborasi dengan UPN Veteran Yogyakarta dan mitra Indonesia yang terkait dengan proses produksi buku ini, sebagai bagian dari komitmen pemerintah AS dalam upaya mendukung dan memperkuat jurnalisme di Indonesia.

Laut merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan keberlanjutan bumi kita, dan keselamatan serta keamanan maritim terus menjadi kepentingan bagi semua negara. Kumpulan cerita dalam buku ini mengungkap tantangan dalam negeri dan internasional yang dihadapi Indonesia, menawarkan solusi akan cara menghadapi tantangan tersebut, dan menyoroti potensi tersembunyi wilayah perbatasan Indonesia.

Kami berharap pengetahuan yang dibagikan oleh para insan media dan pakar maritim Indonesia serta pejabat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menginspirasi lebih banyak lagi jurnalis Indonesia untuk melaporkan isu-isu penting yang terjadi di perbatasan Indonesia, memberikan informasi akurat kepada masyarakat tentang aturan dan prinsip maritim, serta semakin memperkuat demokrasi Indonesia.

A handwritten signature in blue ink that reads "Rachel Cooke".

Rachel Cooke
Konselor Diplomasi Publik
Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta

KATA PENGANTAR

REKTOR UPN “VETERAN” YOGYAKARTA



Saya merasa bangga buku tentang jurnalisme maritim berhasil diterbitkan. Buku ini merupakan dedikasi dan kolaborasi antara dunia akademik dan jurnalis, khususnya di Kepulauan Riau. Buku ini memperkuat komitmen perguruan tinggi untuk ikut memberikan sumbangsih bagi peningkatan kualitas wartawan.

UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang menaruh perhatian pada pengembangan bela negara merasa terpanggil untuk memberikan wawasan bela negara kepada para wartawan di wilayah perbatasan. Tanggung jawab jurnalis untuk memberitakan fakta dan peristiwa di wilayah perbatasan sangat besar. Informasi yang kurang tepat (*miss information*) tentang masalah perbatasan bisa berdampak negative pada masyarakat.

Melalui buku ini diharapkan wartawan bisa memiliki pegangan untuk melaksanakan tugasnya di lapangan. Nilai-nilai bela negara hendaknya menjadi penyemangat wartawan untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya. Wartawan sebagaimana peneliti di perguruan tinggi menjadi *agent of change* bagi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.


Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi jurnalis di Kepulauan Riau sangat kompleks. Selain luasnya area peliputan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat perbatasan

sangat kompleks. Namun saya mempunyai keyakinan bahwa rekan-rekan jurnalis bisa menjadi garda terdepan memberikan informasi yang berkecukupan bagi masyarakat

Yogyakarta, Desember 2021

Rektor

UPN Veteran Yogyakarta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, abstract shape.

Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi,
M.Si

PENGANTAR EDITOR

Buku “Jurnalisme Maritim Berwawasan Kebangsaan’ merupakan sebuah *out put* dari kegiatan *In House Training* Jurnalisme Berwawasan Kebangsaan yang diselenggarakan sejak bulan September-Oktober 2021. Kegiatan *in house training* adalah kegiatan yang didanai melalui *small grant* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang diikuti oleh 150 orang wartawan yang bertugas di Kepulauan Riau. Peserta dibagi dalam tiga zona yaitu Zona I Tanjung Pinang-Batam, Zona II Tanjung Balai Karimun-Lingga dan Zona III Natuna - Anambas.

Kegiatan ini pada dasarnya untuk memberikan wawasan baru terkait persoalan maritim dalam perspektif teoritis maupun praktis kepada peserta. Melalui penambahan wawasan diharapkan peserta bisa lebih meningkatkan kepekaan sebagai wartawan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas liputan dan karya jurnalistiknya. Tujuan yang lebih besar adalah masyarakat mendapatkan informasi yang berkecukupan.

In house training ini memadukan konsep teoritis dan praktis. Teoritis dilakukan secara *online* melalui *zoom*. Metode ini dipakai pada saat kegiatan situasi masih pandemi Covid-19. Peserta mendapatkan pembekalan dari para pemangku kepentingan dari pemerintah daerah setempat pakar, praktisi.

Peserta setelah itu dibimbing oleh fasilitator membuat perencanaan liputan kolaboratif. Dalam liputan kolaboratif ini peserta di masing-masing zona dibagi dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok bisa berasal dari berbagai media. Mereka kemudian melakukan liputan bersama dengan tema yang telah disepakati. Liputan kolboratif akan memberikan pengalaman kepada peserta untuk bekerja dalam satu tim, mengorganisasikan

ide menjadi sebuah karya jurnalistik yang dibutuhkan oleh pembaca.

Kegiatan *in house training* Jurnalisme Maritim Berwawasan Kebangsaan telah menjadi embrio terbentuknya forum wartawan maritim di Propinsi Kepulauan Riau dan menjadi forum untuk berbagi pengalaman jurnalistik. Forum ini juga menjadi media komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan maritim di Propinsi Kepulauan Riau.

Tidak mudah untuk mengurai seberapa kompleks persoalan yang dihadapi oleh para wartawan di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Riau. Kompleksitas itu bisa dilihat dari luasan geografi yang terdiri dari pulau-pulau yang cukup luas dan menyebar. Di sisi lain, sarana dan prasarana juga masih terbatas, kualitas sumberdaya manusia wartawannya juga masih perlu terus ditingkatkan.

Potensi maritim yang dimiliki bangsa Indonesia sangat menakjubkan. Pemerintah melalui kebijakan Poros Maritim Dunia berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan laut. Hal ini juga direspon oleh pemerintah di daerah yang wilayahnya sebagian besar adalah berupa laut seperti di wilayah Kepulauan Riau.

Bagaimana mendorong partisipasi semua pihak untuk mendukung kebijakan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari peran wartawan. Mengapa? Wartawan menjadi garda terdepan untuk menyampaikan fakta dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Wartawan perlu menjalin hubungan yang seimbang dengan pemerintah atau *stake holder*. Hubungan yang harmonis perlu dibangun. Harmonis bukan berarti kehilangan daya kritisnya, tetapi menyampaikan dengan data yang valid, membangun dan memberikan solusi.

Bagaimana relasi harmonis dibangun dimulai dengan saling memahami posisi masing-masing, mengenal persoalan dengan baik, bisa menempatkan diri di posisinya. Hal ini akan bisa dibaca di Bab I yang merupakan rangkuman paparan dari Gubernur Riau H Ansar Ahmad, Bupati Karimun, Aunur Rafiq Wakil Bupati Natuna, Rhodial Huda. Mereka ini memaparkan sebuah fakta begitu banyak masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan agar potensi kelautan bisa dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara serta memakmurkan rakyatnya. Provinsi Kepulauan Riau adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang luas wilayahnya, 96 persen lautan. Memiliki 2.408 pulau, 385 pulaunya telah berpenghuni dan 19 pulaunya merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain sedangkan 22 pulaunya merupakan pulau terluar yaitu, empat pulau di Bintan, ada empat pulau di Batam, ada lima di Kabupaten Anambas, ada tujuh di Kabupaten Natuna serta dua di Kabupaten Karimun. Dalam bab ini pembaca bisa mendapatkan deskripsi problematik menjaga wilayah yang sebagian laut serta bagaimana wartawan diharapkan memainkan perannya.

Profesi wartawan adalah mencari, mengolah satu fakta atau peristiwa di lapangan menjadi sebuah berita yang akan dikonsumsi publik. Wartawan sudah dibekali dengan etika profesi dan rambu-rambu aturan yang harus ditaati. Namun bekal ini belum cukup. Wartawan perlu mempunyai pemahaman bahwa mereka menjalankan profesinya untuk siapa? Untuk dirinya? Media tempatnya bekerja? Kepentingan public? Ataukah untuk memperjuangkan kebenaran untuk melindungi public dari *abuse of power* atau dominasi informasi oleh penguasa?

Pada hakekatnya wartawan menjalankan profesinya untuk melindungi kepentingan public. Untuk itu wartawan juga harus

memiliki bekal bela negara, memiliki wawasan kebangsaan serta nilai-nilai ideologi bangsa Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar wartawan juga bisa mengingatkan kepada masyarakat bahwa lajunya ideologi bangsa lain yang masuk tidak bisa dicegah sehingga masyarakat perlu membetengi diri agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Bab II Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Prof.Dr. M Irhas Effendi, M.Si menyampaikan pikirannya mengapa wartawan perlu memiliki wawasan bela negara.

Namun wartawan yang bertugas di perbatasan memiliki keunikan maka ada beberapa permasalahan yang perlu dipahami oleh wartawan dan media tempatnya bekerja dalam memainkan perannya di wilayah perbatasan. Persoalan ini dibaca di Bab III Bab ini merupakan rangkuman dari pembicara dari Dewan Pers yaitu Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Agus Sudibyo, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Jamalul Insan dan Sekretaris Dewan Pers Hendry CH Bangun, Ketiga pembicara ini melihat peran pers di wilayah perbatasan ke dalam tiga isu (1) Memposisikan peran pers terhadap isu perbatasan (2) Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan (3) Pers di perbatasan focus pada isu-isu local.

Persoalan kemananan maritim dibahas dalam Bab IV oleh Nikolaus Loy. Dalam tulisannya memaparkan bahwa persoalan maritim yang ditemui di Kepulauan Riau sangat kompleks. Keamanan maritim menjadi isu sentral dalam politik Indonesia pasca tahun 2000. Kebangkitan isu ini didorong oleh dinamika global dan domestik. Integrasi ekonomi dunia mendorong pergerakan barang, jasa, informasi dan manusia. Pada saat bersamaan, aktivitas kriminal yang melewati ruang maritim mengalami transnasionalisasi. Batas-batas fisik negara tidak lagi

efektif mencegah para pelaku kejahatan transnasional melakukan operasi mereka. Salah satu ancaman kejahatan adalah terorisme global. Isu-isu apa saja yang dicakup dalam wacana keamanan maritim. Keamanan maritim sebagai sebuah terminologi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif *negative security* di mana domain maritim disebut aman ketika tidak ada ancaman terhadap benda, obyek dan aktivitas di zona maritim. Keamanan di sini dipahami sebagai semua upaya mitigasi untuk mencegah berbagai bentuk ancaman terhadap aktivitas manusia dan lingkungan di laut. Dalam pengertian kedua, keamanan maritim merujuk pada *positive security*. Keamanan bukan hanya soal tidak adanya ancaman, tetapi bagaimana kondisi ideal di domain maritim yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi.

Meliput persoalan maritim dan perbatasan tidak mudah karena luasnya lingkup atau wilayah liputan. Wartawan yang bertugas di wilayah perbatasan bisa mengembangkan jurnalisme data. Bab V Agung Prabowo menguraikan tentang jurnalisme data sebagai alternatif jurnalisme baru yang bisa dikembangkan oleh wartawan. Mengapa? Data yang tersedia di internet dapat menghasilkan kebingungan dan disorientasi yang serupa. Orang tidak dididik untuk bekerja dengan data dan memahaminya atau setidaknya memilih apa yang mungkin penting dari sejumlah besar kumpulan data yang tersedia saat ini. Akibatnya, jurnalis data dapat mengambil peran sebagai 'perantara' antara data dan audiens dengan mengubah kumpulan data yang kompleks menjadi cerita yang mudah dibaca dan bermakna bagi audiens. Menurut Simon Rogers, ini adalah peran baru bagi jurnalis dan berperan sebagai jembatan dan pemandu antara penguasa yang memiliki data (tidak mampu memahami dan mengomunikasikannya) dan publik yang

sangat ingin memahami data dan mengaksesnya tapi membutuhkan bantuan. Secara umum diyakini bahwa jurnalisme data adalah salah satu pilar jurnalisme modern karena masyarakat kita telah bergerak di era data besar (big data), jurnalisme data memiliki kemampuan untuk memainkan peran penting dalam memanfaatkan kumpulan data yang tersedia.

Namanya profesi pasti ada sebuah rambu-rambu etika profesi, rambu-rambu hukum yang dijadikan pedoman seseorang yang menyanggah profesi tersebut. Profesi apapun pasti memiliki kode etik. Mengapa harus ada kode etik? Pertanyaan sederhana tapi sulit untuk menjawabnya. Pada dasarnya kode etik profesi akan menuntun setiap orang menjalankan profesi tertentu agar tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan sekelompok orang dan pada gilirannya justru akan merugikan kepentingan publik. Etika profesi menjadi peta jalan bagi seseorang yang menjalankan profesi untuk berjalan ke arah koridor yang diperjuangkan profesi tersebut. Bagaimana dengan wartawan? Wartawan adalah sebuah profesi yang mulai karena wartawan menjalankan sebagian hak dasar manusia yaitu hak seseorang mendapatkan informasi. Karya jurnalistik wartawan itu sejatinya bisa menjadi sumber rujukan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Batas pemberitaan yang harus diketahui oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dibahas oleh Susilastuti Dwi Nugrahajati di Bab VI. Pengalamannya sebagai ahli pers Dewan Pers mewarnai uraiannya.

Fakta dan peristiwa dalam masyarakat tidak akan menjadi berita bila wartawan tidak bergerak. Wartawan harus selalu melakukan verifikasi atas semua fakta dan peristiwa yang diterima baik ketika berada di lapangan maupun diterima melalui cara yang

lain. Untuk melakukan verifikasi wartawan harus memiliki cara salah satunya adalah dengan melakukan eksplorasi sumber berita. Dalam tulisannya di Bab VII Arif Wibawa memaparkan bagaimana wartawan melakukan eksplorasi sumber berita. Sumber berita menjadi bagian penting dalam jurnalisme. Sumber berita merupakan titik awal dimana proses jurnalisme dimulai. Pemilihan sumber berita yang baik akan mempengaruhi kualitas berita yang ditulis. Begitu juga sebaliknya, sumber berita yang tidak kompeten dan kurang kredibilitasnya akan menurunkan kualitas berita yang ditulis. Sumber berita, seperti yang diidentifikasi oleh Tora Bent (2001) ada sekitar sepuluh yakni, wartawan di lapangan, pusat-pusat informasi, *God given fact*, siaran pers dan konferensi pers, saluran radio komunikasi, keleompok penekan, pendengar, pemirsa, pembaca, saksi mata, internet, dan kantor berita. Dari sepuluh sumber berita yang ada ini, mungkin wartawan bias memilih beberapa darinya disesuaikan dengan berita yang akan dituliskannya.

Wartawan yang bertugas di wilayah yang cukup luas dengan letak pulau satu dengan pulau lainnya berjauhan selain mengembangkan tulisan-tulisan yang sifatnya *straight news*, *feature*, *soft news*, wartawan diharapkan bisa mengembangkan liputan berkepadalaman atau *indepth reporting*. Wartawan senior yang sudah malang melintang melakukan peliputan di wilayah perbatasan Saibansah Dardadani menulis di Bab VIII tentang *Indepth Reporting: Menguak Potensi Kekayaan Maritim Kepulauan Riau*. Wartawan dalam mencari, menulis berita akan membuat keputusan hasil perolehan informasi dan fakta yang ada di masyarakat akan ditulis dalam bentuk seperti apa? Setiap wartawan pada dasarnya sudah pernah melakukan liputan *indepth reporting* karena liputan ini mampu membawa wartawan

menjelajah sebuah fakta dan peristiwa yang ada dalam masyarakat secara holistik. Meskipun pernah melakukan liputan jenis ini tidak mudah karena membutuhkan kerja tim yang solid, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Wartawan tidak hanya bicara kecepatan, keakuratan, keberimbangan tetapi paling penting adalah tingkat kedalaman. *Indepth reporting* tidak hanya mengungkap persoalan dari satu dimensi saja tetapi harus dari berbagai dimensi. Tulisan *indepth reporting* harus memberikan solusi atas persoalan yang akan ditulisnya. Tulisan ditulis dalam beberapa bagian dengan angle masing-masing.

Penutup

Tulisan-tulisan di atas hanyalah sebagian dari gagasan atau ide yang muncul dalam *In house Training* Jurnalisme Berwawasan Kebangsaan. Diharapkan sumbangsih dari keynote speaker, pembicara dan penulis yang terangkum dalam buku ini bisa menjadi bahan pegangan bagi jurnalis dalam mengembangkan liputannya di wilayah Kepulauan Riau, khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pelatihan hanyalah sebagian langkah kecil agar wartawan senantiasa bergerak meningkatkan kemampuan dan wawasannya terhadap area liputannya. Diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi yang berkecukupan. Terimakasih.

Editor

Susilastuti DN

DAFTAR ISI

Sambutan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta	iii
Sambutan Rektor	v
Pengantar Editor	vii
Bab I Peran Jurnalis Mendukung Pembangunan Berbasis Maritim	1
Bab II Urgensi Penting Nilai-nilai Bela Negara bagi Wartawan Perbatasan	21
Bab III Tantangan Pers di Wilayah Perbatasan	29
Bab IV Media dan Keamanan Maritim: Mengamankan yang “Lupa” Diamankan Dr. Nikolaus Loy, MA	55
Bab V Jurnalisme Data Dr. Agung Prabowo, M.Si	83
Bab VI Batas Pemberitaan: Bebas Tetapi Tidak Bebas Dr.Dra. Susilastuti Dwi N, M.Si	99
Bab VII Eksplorasi Sumber Berita dan Teknik Wawancara Drs. Arif Wibawa, M.Si	119
Bab VIII <i>Indepth Reporting</i> : Menguak Potensi Kekayaan Martim Kepulauan Riau Saibasah Dardani, S.Ag	131
Biodata Penulis	149

BAB I

PERAN JURNALIS MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERBASIS MARITIM¹

2.1. Pengantar

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang luas wilayahnya, 96 persen lautan. Memiliki 2.408 pulau, 385 pulaunya telah berpenghuni dan 19 pulaunya merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain dan 22 pulaunya merupakan pulau terluar. Pulau terluar ada empat pulau di Bintan, ada empat pulau di Batam, ada lima pulau di Kabupaten Anambas, ada tujuh pulau di Kabupaten Natuna serta dua pulau di Kabupaten Karimun. Setidaknya, ada empat potensi kemaritiman Provinsi Kepri yaitu, sumber daya kelautan dan perikanan, jasa transportasi pelayaran dan perdagangan, wisata bahari dan energi berkelanjutan.

Sudah pasti, sektor sumber daya kelautan dan perikanan seharusnya menjadi ujung tombak sebuah provinsi maritim seperti Kepri. Selama lebih ratusan tahun, masyarakat yang hidup di ribuan pulau Provinsi Kepri itu menggantungkan hidupnya dari laut. Seiring dengan perkembangan zaman, Provinsi Kepri tumbuh menjadi provinsi yang menawarkan berbagai potensi bagi investor asing maupun domestik dan

¹ Materi ini dirangkum dari paparan Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad dalam *In House Training* Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan” Kepulauan Riau, tanggal 20 September 2021

memiliki berbagai destinasi wisata yang tidak kalah dengan negara tetangga.

Untuk itu, perlu peran serta serta dukungan semua pihak untuk memaksimalkan potensi kemaritiman yang dimiliki Provinsi Kepri tersebut, termasuk peran serta wartawan. Wartawan sebagai profesi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, wartawan harus dapat memainkan peran penting dan strategis untuk menjadikan potensi sangat luar biasa untuk masyarakat Kepri itu dapat dikonversikan menjadi kesejahteraan buat mereka.

2.2. Mengenal Provinsi Kepri

Provinsi Kepulauan Riau berdiri berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2002, yang saat itu terdiri dari 6 kabupaten kota. Kemudian lahir Undang-Undang No. 33 tahun 2008 dan terbentuk satu kabupaten baru lagi yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki 7 kabupaten dan kota. Provinsi Kepri luasnya 8.201,72 km yang terdiri dari 96% lautan dan daratannya hanya 4%. Berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja.

Kemudian penduduk Kepulauan Riau tahun 2020 berjumlah 2.064.564 jiwa, tersebar di 379 pulau-pulau yang berpenghuni. Selanjutnya Kepulauan Riau memiliki jumlah pulau sebanyak 2.408 besar dan kecil 1.686 pulau sudah bernama sedangkan 722 pulau belum bernama, dan ini pemprov terus bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memberikan nama pulau-pulau ini. Kemudian dengan 22 pulau

terluar berdasarkan Keppres 6 tahun 2017, ada 4 pulau terluar di Bintan, ada 4 pulau terluar di Batam, ada 5 di Kabupaten Anambas, ada 7 di Kabupaten Natuna, dan 2 di Kabupaten Karimun.

2.3. Perjuangan Provinsi Kepulauan di Indonesia

Pemerintah Provinsi Kepri akan mengusulkan perubahan Keppres ini karena ada satu pulau yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintahan pusat yang berbatasan dengan Singapura, dengan jarak 3,7 mil laut dari Utara Pulau Bintan yang disebut Karang Singa. Itu akan menambah jumlah pulau terluar nanti di Kepri menjadi 23 pulau.

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yaitu terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Tugas kita **pertama** memang berkaitan dengan pembangunan maritim, maka misi kita pertama adalah percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran rakyat. Misi kita yang **kedua** mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan Iman dan Taqwa. Kemudian yang **ketiga** melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih terbuka dan berorientasi pelayanan. **Keempat** mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Misi **kelimanya**, mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

2.4. Mengenal Potensi Provinsi Kepri

Kepri memiliki beberapa kawasan strategis yaitu kawasan Batam, Bintan, Karimun dan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai hak logistik internasional untuk dukung pengembangan industri perdagangan maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Karimun diarahkan khusus untuk pengembangan industri maritim, industri *oil tanking* dan *refiney industry*, industri agroteknologi, industri hasil pengolahan laut. Sementara Batam ditetapkan sebagai pilot logistik internasional yang sedang proses, industri kedirgantaraan, industri *light and valuable*, industri digital dan kreatif, *international trade and finance centre* dan *integrated health tourism*.

Kemudian Bintan dikembangkan untuk kawasan pariwisata, sekaligus transportasi, industri pengolahan makanan, industri maritim *defense* dan industri olahraga. Tanjungpinang dikembangkan sebagai kawasan heritage Melayu-Tiongkok, industri halal, industri perikanan dan kawasan *business centre* dan pusat zona integrasi kawasan strategis perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ.

Ini khusus untuk Batam memang ditetapkan pemerintah pusat secara menyeluruh, agar Tanjungpinang Bintan dan Karimun yang saat ini kawasan perdagangan dan pelabuhan bebasnya masih *enclave*, kita dorong untuk menjadi kawasan FTZ menyeluruh, agar simultan dan seimbang dengan Batam dalam rangka percepatan pembangunannya.

Ada beberapa potensi strategis di Kepri untuk peluang investasi, terutama pengembangan kawasan wisata karena banyak pulau-pulau kecil yang indah-indah, pantai yang begitu menarik kawasan-kawasan heritage yang juga cukup banyak. Pemerintah daerah mendorong pengembangan kawasan wisata di Kepri.

Pengembangan sektor perikanan juga mendapatkan perhatian karena memang potensi laut yang besar dan belum terkais secara optimal. Sektor perikanan juga menjadi sektor strategis. Untuk strategi pengembangan sektor maritime, berbagai kawasan kawasan industri maritim juga menjadi potensi strategis.

Kawasan wisata yang cukup potensial dikembangkan Alif Stone di Natuna Geopark. Di tempat ini juga dikembangkan oleh beberapa pemodal. Pulau Bintan ada *Crystal Lagoon*, dengan luas kolam renang seluas 6,2 hektar dan panjangnya 1,8 km, dilengkapi dengan sarana akomodasi yang berkelas internasional. Ada juga KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Galang-Batam-Bintan yang saat ini sudah menelan investasi sebesar Rp 15 triliun. Di perkiraan nanti sampai dengan tahun 2025 investasi sebesar Rp 36 triliun akan masuk.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa *digital park* ini juga diberikan pemerintah, meskipun kegiatan usahanya sebagian besar sudah eksis. Ada pusat film animasi kelas dunia yang dijadikan tempat syuting film-film internasional, juga akan dikembangkan sebagai pusat data internasional dan pusat data nasional. Kawasan ini memang sangat potensi dan menjanjikan kemudian KEK Batam Aero Teknik ini akan dikembangkan

dengan kerja sama antara Korea dan beberapa pihak lain dan memiliki prospek sangat besar.

2.5. Peran Wartawan di Kepulauan Riau

Bagaimana dengan peran wartawan untuk membantu pengembangan potensi di Kepulauan Riau? Pada momentum pelatihan jurnalistik ini mengutip Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 1 ayat 1 berbunyi “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Peran jurnalis bagi pemerintah sangat penting karena merupakan pilar ke-4. Ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan pers dalam sebuah negara. Meskipun secara formal pers berada di luar politik ketatanegaraan. Namun keberadaan pers menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi. Dan alhamdulillah, Dewan Pers telah menganugerahkan prestasi terbaik pertama bagi Kepri, sebagai provinsi yang memiliki kebebasan pers terbaik di Indonesia, baik dari sisi kebebasan demokrasi maupun kebebasan pers bagi para wartawan di Kepri tahun 2021.

Tentu saja, kalau berbicara Undang-Undang 40 tahun 1999 pasal 2 berkaitan dengan kemerdekaan pers dinyatakan, “bahwa salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan

prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum” dan pengawasan media terbagi menjadi dua jenis pengawasan peringatan atau *warning surveilans* dan pengawasan instrumental atau *instrumental surveilans*.

Selanjutnya, bagaimana peran jurnalis dalam mendukung kinerja pemerintah?. Terdapat klasifikasi khusus dalam membangun daerah maritim, maka kita harapkan pers juga memiliki semangat kekuatan untuk mengklasifikasi secara khusus berita-berita untuk mendukung, mendorong percepatan pemanfaatan kawasan-kawasan maritim Indonesia, baik ditinjau dari sisi seperti kultur budaya adat istiadat, sosial, kondisi geografis dan hal-hal yang spesifik lainnya. Satu dengan lainnya harus diolah dikembangkan secara integral terintegrasi.

Pers dituntut agar memiliki wawasan kemaritiman yang baik dalam upaya mendukung pemerintah dalam pembangunan di kawasan dan daerah maritim. Pers juga menghadapi tantangan yang berat terutama di era 4.0. Provinsi Kepri memang merupakan salah satu provinsi yang memiliki topografi wilayah yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari 2.408 pulau, dengan jarak antar pulau berjauhan. Salah satu efek yang muncul itu memang terhambatnya akses sinyal internet untuk pulau-pulau yang berada jauh dari pusat sinyal.

Pemerintah pusat melalui Menteri Kominfo Republik Indonesia yang memberikan perhatian bagi Kepri, khususnya pembangunan BTS di pulau-pulau 3T seperti Natuna, Anambas, Karimun dan Bintan. Tahun ini kita mendapat bantuan pembangunan dari bhakti mitra kerja Kominfo sebanyak 38 tower BTS. Kemudian untuk Lingga, kita juga mendapat fasilitas

bantuan yang berupa 40 tower BTS yang dibangun oleh perusahaan seluler.

Pemerintah propinsi akan mendorong terus agar implementasi digitalisasi di pulau-pulau Kepri bisa segera terpenuhi. Hal ini diharapkan bisa menambah literasi masyarakat, dan melakukan penyebaran informasi yang cepat, memperluas akses cakupan internet dan hal-hal positif lain seperti memberikan edukasi kemanfaatan digitalisasi bagi masyarakat Kepri.

2.6. Wartawan Tanjung Bali Karimun dan Tranformasi Digitalisasi²

Kabupaten Tanjung Balai Karimun letaknya sangat strategis sekali karena letaknya tidak hanya berbatasan dengan daerah tetangga tetapi juga berbatasan dengan negara tetangga. Posisinya sebagai daerah perbatasan, Tanjung Balai Karimun adalah pintu gerbang suatu bangsa atau suatu negara. Permasalahan yang dihadapi daerah perbatasan umumnya atau Kabupaten Karimun khususnya tentu memiliki kompleksitas yang berbeda dengan daerah-daerah yang tidak berbatasan dengan negara perbatasan.

Mengapa demikian? Daerah perbatasan yang memiliki potensi yang sangat besar seperti Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di daerah perbatasan itu memiliki ancaman yang sangat besar sekali. Baik secara internal maupun eksternal, di mana Kabupaten Karimun

² Bupati Karimun Aunur Rafiq yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Karimun Muhammad Firmansyah dalam *In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan* Kepulauan Riau, tanggal 22 September 2021

salah satunya merupakan daerah transit. Transit baik berupa orang ataupun barang baik yang legal maupun ilegal dan kesemuanya ini memerlukan antisipasi kita bersama baik *stakeholder* yang ada maupun rekan-rekan wartawan yang dalam hal ini sebagai kontrol sosial.

Wartawan yang akan memberikan informasi-informasi yang valid kepada *stakeholder* dan masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun, pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Media dan wartawan sangat berperan sekali karena media memiliki beberapa peran.

Peran yang paling utama adalah bagaimana media memiliki peran mendidik. Memberikan informasi kepada masyarakat menyampaikan informasi kepada masyarakat yang memiliki kebenaran actual sehingga, masyarakat terdidik dalam menyaring menyerap informasi-informasi yang sebelumnya mereka tidak tahu menjadi tahu. Adanya kemajuan teknologi sekarang, teman-teman wartawan tidak bisa lagi berpangku tangan seperti yang dilakukan sebelum ini yaitu menyampaikan informasi-informasi secara konvensional.

Wartawan dan media tempatnya bekerja harus segera melakukan transformasi, melakukan perubahan-perubahan baik itu dalam-dalam pengetahuannya, dalam kualitasnya. Apabila terlambat mereka akan tertinggal, maka dari itu dengan kemajuan teknologi kecepatan itu penting sekali kualitas itu sangat penting sekali, maka itu keseluruhan itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama terutama sangat penting sekali adalah peran jurnalisisme dalam penyampaian ini.

Kabupaten Tanjung Balai Karimun pada saat ini dan sebelum-sebelumnya juga bersama teman-teman media, bersama teman-teman media telah melakukan beberapa terobosan-terobosan untuk mengatasi keterbatasan dalam menyampaikan informasi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Karimun dengan wilayah yang sangat luas memiliki keterbatasan kemampuan dalam menyampaikan, menyebarkan informasi informasi kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Karimun bermitra dengan jurnalis agar bisa memberikan berita-berita positif kepada masyarakat. Pembangunan yang telah dilakukan untuk masyarakat agar diberitakan sehingga masyarakat mengetahui dan dari tidak tahu menjadi tahu. Harapan ini tidak akan mengurangi peran idealisme jurnalistik itu sendiri sebagai agen memberikan kritik, sebagai agen perubahan. Kemudian, memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka mengkrete bagaimana pemerintah melakukan dengan jalur yang benar.

Pemerintah daerah tidak antikritik. Pemerintah daerah akan menerima dan mengoreksi kalau itu benar. Para jurnalis yang berada di Tanjung Balai Karimun lebih dapat meningkatkan kualitas sumber dayanya sehingga lebih dapat menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Kemudian lebih dapat beradaptasi dan memiliki kecerdasan dalam menyampaikan berita-berita yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan lebih dapat mengontrol pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan dan memberikan masukan-masukan yang baik.

Wartawan Ikut Mengawal Potensi Natuna³

Kabupaten Natuna adalah satu-satunya kabupaten Indonesia yang berbatasan langsung dengan sangat banyak negara. Kalau di Batam dan Karimun, itu hanya berbatasan dengan satu atau dua negara saja yaitu, berbatasan dengan Singapura Malaysia saja. Natuna berbatasan dengan sembilan negara secara langsung maupun secara terbuka.

Natuna juga memiliki wilayah laut yang sangat luas, ada tujuh pulau terluar namun lebih tepat sebagai pulau terdepan. Kenapa? Supaya Natuna menjadi perhatian tetapi secara hukum tidak bisa kita hilangkan Unclos sebagai hukum laut internasional. Menurut Unclos ini namanya adalah *other island*, pulau terluar karena pulau tersebut dipergunakan untuk menarik garis batas wilayah sebuah negara maritim.

Natuna kalau dilihat di peta Indonesia memang di ujung, di sudut dan pulau itu kecil sekali. Namun Natuna kalau dilihat di peta laut China Selatan, kalau kita tarik ring 1000 km hitung Kuala Lumpur masuk, Singapura masuk, Brunei masuk tetapi begitu kita tarik 2000 km seluruh ibukota negara Asean masuk dan Natuna berada di tengahnya.

Artinya, wilayah sebuah kabupaten yang strategis seperti ini kalau tidak maju itu agak aneh sesungguhnya. Laut yang luas ini punya potensi yang besar dan itu adalah potensi laut. Jadi rekan-rekan jurnalis memang sangat harus memahami ini, baik secara ideologi politik, budaya, pertahanan, keamanan dan ekonomi.(Ipoleksosbudhankam).

³ Paparan Wakil Bupati Natuna Rhodial Huda dalam “*In House Training* Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan” Kepulauan Riau, tanggal 27 September 2021

Kita tidak bisa memahami lautannya hanya pada satu sisi, resources sumber daya saja, tetapi laut secara menyeluruh. Ideologi sosial politik pertahanan keamanan ekonomi harus kita pahami secara menyeluruh karena wilayah Natuna terdiri dari 99 persen laut.

Hal ini ada kontradiksi yang bertentangan dengan keadaan di lapangan, sebuah kabupaten yang memiliki laut sangat luas tetapi di dalam undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 kabupaten tidak punya kewenangan di laut. Akibatnya, kabupaten tidak bisa bicara tentang kewenangan di laut tetapi bias bicara tentang laut yaitu tentang laut pada tahap aspek pemanfaatan sumberdaya.

Persoalannya bagaimana laut dimanfaatkan oleh Kabupaten Natuna untuk kesejahteraan khususnya masyarakat Natuna. Meskipun daerah tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan peraturan terkait tentang kelautan tetapi untuk memanfaatkannya pemerintah daerah bisa melakukan. Jangan sampai justru negara lain yang memanfaatkan sebagaimana kasus *illegal fishing* yang sering terjadi di wilayah Natuna.

Kami, masyarakat Natuna memang punya keterbatasan untuk mengawal laut, mengawal potensi maritim itu. Adanya keterbatasan pemerintah daerah bisa menggunakan perpanjangan tangan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengawal laut itu. Daerah bisa memanfaatkan potensi laut itu. Namun problem yang dihadapi adalah sumber daya manusia, sumber daya alat tangkap, sumber daya alat transportasi di laut memang masih sangatlah minim. Pemerintah daerah berharap agar pemerintah pusat untuk memberdayakan

masyarakat local, terutama nelayan-nelayan Natuna. Nelayan Natuna yang harusnya memenuhi laut itu untuk memanfaatkan potensi kelautan.

Sesungguhnya yang perlu kita pahami juga bahwa orang di laut itu dia tidak berpikir secara *de jure*, bahwa ini laut siapa, 12 mil milik siapa, 200 mil milik siapa. Orang laut lebih berfikir bagaimana dia memanfaatkan laut itu. Bila ada prinsip menganggap kalau itu tidak ada pemiliknya karena ada prinsip laut tidak ada pemiliknya. Kita harus berpikir siapa sesungguhnya pemilik laut secara *de facto* dan orang laut secara *de facto* menganggap pemilik laut itu adalah si pemilik kapal. Kenapa?

Hanya dengan kapal kita bisa menangkap ikan, hanya dengan kapalah kita bisa berdagang, hanya dengan kapal kita bisa berperang, hanya dengan kapal kita bisa berwisata, hanya dengan kapal lah kita bisa survei, hanya dengan kapal kita bisa melakukan segala hal di laut. Tanpa kapal, maka kita hanya akan menjadi bangsa pesisir yang hanya bisa memanfaatkan secara terbatas. Ibarat kita bisa berjalan sampai ke hidung.

Bila potensi laut bisa dimanfaatkan dengan sepertiga wilayah laut di Indonesia ini saja atau dengan 1/2 persen wilayah daratan di Natuna ini, seperti kita menggunakan daratan yakinlah tidak akan pernah ada penganggur atau TKI di negeri ini. Namun, untuk menggunakan laut seperti kita menggunakan daratan, kita membutuhkan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai teknologi dan berbagai macam hal.

Hal ini yang harus kita lakukan, artinya mengawal anugerah potensi maritim ini yang terpenting, bagaimana kita membuat,

menciptakan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan teknologi yang cukup memadai. Mengawal anugerah bukan seperti kapal perang mengawal batas laut, tetapi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang minim pengetahuan dan teknologi. Supaya mereka punya pengetahuan dan teknologi untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga karena sumber daya manusia di Natuna itu harusnya berbeda tingkatnya dengan daerah-daerah lain.

Wilayah Natuna ini perbatasan dengan banyak negara sehingga mereka bersaing dengan negara. Jadi masyarakat ekonomi Asean sesungguhnya yang paling duluan harus ditingkatkan yaitu Natuna, Anambas dan Kepulauan Riau secara umumnya. Persoalan ini belum banyak mendapatkan perhatian sehingga sumber daya manusia kita tidak cukup memadai untuk memanfaatkan laut itu.

Sebagai contoh, Jurusan Teknologi Perkapalan ada di ITS, mungkin ada di UNDIP sudah sampai bisa membuat kapal perang. Namun untuk membuat kapal ikan orang di Natuna dan Anambas setara dengan Thailand dan China saja belum. Bagaimana kita membuat teknologi yang lebih memiliki kemanfaatan kepada kepentingan yang lebih besar yang lebih umum dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonominya.

Jadi, sekali lagi mengawal anugerah potensi maritim tidak hanya pada satu sisi, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, memberdayakan masyarakat di Natuna, memberdayakan nelayannya untuk menjadi pengawal negeri ini. Kalau di Natuna di tingkatkan kemampuan kapalnya, kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan alat

tangkapnya, wawasannya sehingga dia memiliki wawasan bela negaranya maka kapal perang kapal *cost guard* tidak akan mengalami kesulitan.

Kalau seluruh nelayan yang ada di Natuna, di Laut Natuna Utara ini punya wawasan kebangsaan bela negara. TNI Angkatan Laut, Bakamla hanya tinggal memanfaatkan mereka sebagai mata, telinga dan tangan pemerintah atau penegak hukum di laut seluas itu. Kalau hanya kapal patroli, kapal perang, kapal Bakamla yang mengawal dan menjaga perairan yang begitu luas, tidak akan bisa melakukan hal yang sesungguhnya. Namun kalau memanfaatkan seluruh nelayan, seluruh kapal dagang yang ada menjadi mata dan telinga mereka, hal itu akan mudah dilakukan karena nelayan hanya tinggal melaporkan kejadian-kejadian di laut.

Saat ini, yang terjadi banyak kasus nelayan melaporkan setelah kejadian beberapa hari mereka melihat. Kalau perlu, jurnalis dan wartawan yang mendapat pelatihan ini, harus ikut keliling di ZTE, ikut nelayan atau ikut kapal perang berpatrioli dan bagaimana sesungguhnya keadaan di laut itu. Nantinya wartawan dalam memberi laporan dan memberitakan sesuai dengan apa yang terjadi, bukan kejadian yang sudah lama. Jangan sampai wartawan hanya dapat video terus di-*share* seolah-olah ini kejadian hari ini. Padahal video itu kejadian lama. Wartawan perlu melihat sendiri kejadiannya sehingga menghindari terjadinya isu-isu yang liar.

Kami di Natuna, khususnya dengan kondisi keadaan pemberitaan hari ini, kita juga tidak hanya akan pesimis, tapi kami juga akan optimis. Ini juga akan membuat Natuna lebih

terkenal dan kami juga akan memanfaatkan situasi ini. Bagaimana supaya Natuna itu menjadi perhatian serius pemerintah pusat yang memang dari dulu sudah menjadi perhatian khusus.

Pembangunan di Natuna harus menjadi perhatian yang lebih serius. Pembangunan di Natuna harus nyata. Bagaimana Natuna ini menjadi gerbang maritim nusantara. Di Natuna ada alur laut kepulauan Indonesia yang dilewati ratusan kapal per hari diketahui oleh publik, bahwa kapal yang lewat itu tidak semuanya melanggar hukum. Jadi kalau ada kapal lewat, ada kapal asing lewat, itu memang itulah alur yang disediakan oleh kepulauan untuk lalu lintas internasional.

Jadi seluruh kapal berhak lewat situ, karena ada lalu lintas laut damai yang kita harus jamin, selama mereka lewat lalu lintas laut damai, yaitu kapal perang tidak menggelar batang perangnya, kapal dagang tidak menggelar dagangnya, kapal ikan tidak ada menggelar tangkapan ikannya.

Jadi, kalau hanya lewat dibidang bahwa kalau tidak punya pengetahuan, nanti dikatakan Natuna dipenuhi kapal asing, ya itu berbahaya. Informasi seperti itu, karena memang mereka harus lewat dan bagaimana sesungguhnya harusnya kapal-kapal internasional yang lewat ratusan buah per hari itu memberikan nilai tambah ekonomi terhadap kita Indonesia.

Terutama terhadap Natuna, apa yang kita bisa lakukan itu karena memang sedikit berbeda dengan TSS di Singapura. Itu ada TSS (Traffic Separation Scheme) yang dilewati 200 kapal per hari kapal super, dan Singapura memanfaatkan kapal yang lewat itu untuk menambah nilai ekonomi maritim mereka.

Apa yang dilakukan Singapura memberi *line up selling* dan dia mengadakan perdagangan transit lain. Apa yang dilakukan di Singapura itu informasi untuk kita. Singapura menjual atau memperdagangkan kepada setiap kapal bahan bakar, air tawar, bahan makanan telur, ayam, daging, susu dan lainnya.

Sebelum melalui Singapura lewat di depan Pulau Penarik Natuna itu. Kalau Natuna bisa memanfaatkan atau Indonesia menyerahkan kewenangan kepada Natuna, manfaatkan ini, kita melakukan supporting logistik untuk 10 persen saja, 20 kapal, bayangkan nilai ekonomi yang bisa kita dan kita terima dan dan *cash flow* yang ada pada kegiatan itu.

Jadi banyak hal yang perlu kita diskusikan, banyak hal yang perlu kita lakukan dengan keterbatasan Kabupaten Natuna, ada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, yang perlu bekerjasama secara terintegrasi secara komprehensif antara pemerintah pusat pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membangun Natuna menjadi *epicentrum* ekonomi baru.

Kami menamakannya konsep *epicentrum* ekonomi baru dengan 'Kawasan ekonomi Cinta Bersemi'. Kenapa cinta bersemi? Kita harus bekerja sama dengan berbagai negara yang ada di China, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, Serawak, Philippines.

Kami di Natuna membutuhkan pembangunan itu, untuk menjadi etalase bangsa Indonesia bahwa kalau kapal-kapal yang lewat itu, yang lewat Natuna dia akan melihat Indonesia. Jika Natuna maju, maka dia akan menggambarkan Indonesia juga maju.

Hari ini, dengan kami di Natuna juga ketar-ketir juga, berimbas ada peraturan undang-undang maritim baru dari Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, yang mewajibkan setiap kapal asing melapor ke otoritas maritim negara tersebut, saat memasuki wilayah di Laut China Selatan yang diklaim bagian dari teritorialnya, yang mengatur seluruh kapal yang lewat di bagian Laut China Selatan harus melapor. Ini menjadi permasalahan, tetapi Indonesia sesungguhnya punya kelebihan. Kalau konsep pembangunan pulau terluar itu dilakukan dengan baik, maka Indonesia sebenarnya aman hari ini. Lalu, ada isu kapal induk China yang berkeliaran di Laut Cina Selatan, ada kapal induk Amerika, ada kapal induk Perancis, yang itu boleh saja melewati laut Indonesia sesungguhnya.

Kalau pulau terluar, contohnya Pulau Laut itu kita fasilitasi dengan fasilitas kapal induk, maka Indonesia akan memiliki kapal induk berupa pulau yang tidak bisa ditenggelamkan di Laut Cina Selatan.

Ada hal yang strategis yang paling strategis, sehingga di Utara ini, kita tidak terlalu sulit melakukan pengawalan terhadap laut-laut kita. Dan itu mungkin sesuatu yang sedang dipikirkan oleh kita, bagaimana supaya Natuna dibangun, ya minimal seperti Hawaii atau seperti Okinawa. Nantinya tentara-tentara TNI-Polri yang bertugas di Natuna ini tidak kesepian seperti hari ini. Mereka hari ini mau pulang jaraknya jauh, tiketnya mahal, mau tetap tinggal di sini fasilitas terbatas.

Kalau memang Natuna dibangun seperti Hawaii, seperti Okinawa, maka banyak hal yang bisa terselesaikan. Tapi yang paling penting adalah pembangunan harus ada dalam rangka menyejahterakan masyarakat Natuna, harus dalam rangka

meningkatkan ekonomi Natuna. Apabila ekonomi Natuna dengan potensi yang besar itu ditingkatkan, maka dia akan memudahkan kesejahteraan Indonesia.

Contoh di Bremen Jerman, tidak ada satu pun pohon tembakau tetapi dia menjadi pusat lelang tembakau terbesar di dunia. Natuna punya sepertiga cadangan migas Indonesia, Natuna punya 25 persen perikanan Indonesia, masa Natuna tidak bisa menjadi pasar migas dan pasar ikan. Tidak usah internasional, tapi minimal regional di kawasan Asean saja, dan itu adalah hal yang mungkin.

Peningkatan pembangunan, terutama ekonomi Natuna, Indonesia akan kuat. Kalau Natuna kuat, Indonesia juga kuat karena Natuna adalah pagar laut nusantara untuk lalu lintas seluruh kegiatan maritim dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, maupun sebaliknya, dari Eropa dan Asia Barat ke Asia Timur.

Sumatera lewati Natuna, makanya jangan heran potensi pariwisata Natuna yang juga harus dikawal, ada 24 titik situs kapal tenggelam sejak dari abad ke-9 yang bisa menjadi situs warisan dan ini nilainya mahal. Ini menunjukkan bahwa dari dulu Natuna menjadi lalu lintas laut internasional.

Berbagai permasalahan dan peluang yang ada di Kabupaten Natuna sangat perlu dipahami oleh bangsa Indonesia, terutama para jurnalis juga. Fakta dan peristiwa yang ditulis oleh jurnalis itu biasanya akan ditelan secara menyeluruh oleh pembaca, oleh pemirsa. Kalau informasi yang diberikan oleh para jurnalis menjadi panduan menjadi opini, menjadi persepsi seluruh masyarakat, maka jurnalis tidak boleh salah di dalam memberi informasi.

Pemerintah daerah sangat berharap jurnalis jurnalis di Natuna dan Anambas yang mendapat pelatihan jurnalistik maritim berwawasan kebangsaan ini dapat menjadi sebagai pemberi pelajaran, informasi yang benar dan jujur kepada masyarakat. Jadi apa yang mereka tulis harus menjadi edukasi bagi masyarakat, terutama masyarakat laut dan pesisir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di lautan perbatasan. Pengalaman kami dari lahir sampai berumur 54 tahun ini ada suatu kesimpulan, sesungguhnya bahwa negara tetangga itu tidak membodohi kita. Tetapi mereka hanya memanfaatkan kebodohan kita, karena memang selama ini kita alpa mencerdaskan kehidupan bangsa di lautan perbatasan.

BAB III

URGENSI PENTING NILAI-NILAI BELA NEGARA BAGI WARTAWAN PERBATASAN¹

3.1. Pengantar

Kawasan perbatasan termasuk Kepulauan Riau merupakan etalase bagi sebuah bangsa di depan publik, baik dalam negeri sendiri maupun luar negeri. Selain sebagai etalase bagi bangsa, kawasan perbatasan di Kepulauan Riau memiliki kompleksitas tersendiri. Kompleksitas masyarakat, yang berasal dari daerah setempat dan daerah lain termasuk luar negeri. Kemudian kompleksitas aktivitas, kompleksitas informasi termasuk dari aspek sumber informasi, bahasa, maupun mediana.

Kompleksitas dari berbagai aspek tersebut berpotensi terjadinya distorsi informasi, yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat serta kepedulian terhadap bangsa dan negara. Menghadapi kompleksitas dengan berbagai konsekuensinya, peran karya jurnalistik wartawan menjadi sangat strategis dalam memberikan informasi yang tetap mampu menjaga persatuan kesatuan masyarakat serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Untuk menguatkan peran strategis wartawan dengan karya jurnalistiknya tersebut, maka sangat relevan untuk membahas

¹ Dirangkum dari paparan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Prof.Dr. M.Irhas Effendi, M.Si dalam *In House Training* Jurnalisme Maritim Berwawasan Kebangsaan,di Kepulauan Riau Oktober 2021

urgensi pentingnya nilai bela negara bagi para wartawan di kawasan perbatasan termasuk Kepulauan Riau.

Pemahaman tentang wawasan kebangsaan untuk meningkatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa harus menjadi titik tolak dalam menghasilkan karya jurnalistik. Asas Bhinneka Tunggal Ika dikedepankan terutama di kawasan yang multi etnik seperti di Kepulauan Riau. Untuk menguatkan wawasan kebangsaan diperlukan penguatan dari aspek moral untuk menjaga eksistensi dan kualitas bangsa maupun aspek intelektual yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dengan berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Misalnya, ketika wartawan akan membahas potensi ekonomi di kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau maka wartawan harus memiliki pengetahuan potensi yang ada dan akan digunakan untuk apa? Ketika akan mengeksplorasi potensi yang ada bagaimana dampaknya bagi masyarakat serta kepentingan bangsa.

Dalam membahas nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kita perlu memahami beberapa konsep dasar. Pancasila itu dasar ideologi negara. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara Indonesia. Sudah banyak penulis dan peneliti di dunia yang menghasilkan bukti empiris bahwa ideologi inti, termasuk nilai inti, sebuah cara pandang yang sama di sebuah negara itu mampu menjaga kelangsungan bangsa dan negara..

Banyak tulisan yang membahas mengenai pentingnya ideologi bagi suatu bangsa atau negara untuk menjaga kelangsungan dari organisasi atau negara. Ideologi ada dua hal yaitu nilai inti dan tujuan inti. Nilai inti memandu prinsip dan

ajaran, tanpa batas waktu, bukan dari eksternal, penting dan hakiki. Tujuan inti merupakan alasan keberadaan. Bagaimana dengan ideologi Pancasila? Pancasila ini menjadi milik bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan bangsa kita. Pancasila menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Meskipun tantangan yang dihadapi bangsa dan negara selalu berkembang dan harus dihadapi dengan cara-cara baru, namun dasar ideologi tidak akan berubah. Tujuan inti bernegara, sebagaimana yang sudah sering kita dengar tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memaksa wartawan harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, mulai penggunaan alatnya, platform media dan lainnya. Namun yang tidak berubah dan harus dipegang adalah ideologi inti yang harus dipertahankan, yang di Indonesia adalah Pancasila. Ideologi ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus melalui berbagai cara. Pada masa pemerintahan Orde Baru sosialisasi dilakukan melalui penataran P4. Cara itu di era reformasi sudah dipandang tidak lagi efektif, namun bukan berarti sosialisasi Pancasila sebagai ideologi negara harus dihilangkan.

Meskipun penataran P4 di era reformasi tidak lagi efektif, tapi apakah pemahaman dan Pancasila harus hilang sebagai sebuah ideologi yang kita perlukan? Tentu tidak, tetapi bagaimana kita mencari cara baru di tengah-tengah maraknya media sosial ini untuk meningkatkan pemahaman cinta pada ideologi Pancasila agar kita mampu memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu.

Pancasila sebagai sebuah ideologi untuk melandasi wawasan kepada kita tapi kemudian cara pandang kita juga harus diorientasikan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional itu ada di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu cita-cita nasional negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil makmur, kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia kepentingannya.

Sesuai arahan Presiden, untuk membangun sumberdaya manusia yang unggul, diperlukan pendidikan karakter, menyederhanakan berbagai kebijakan, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan teknologi dengan tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, Prioritas pembangunan itu bisa bergeser dari waktu ke waktu tapi tujuannya tetaplah ada di dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Wawasan kebangsaan, memahami ideologi Pancasila itu tetap penting sejalan dengan perubahan peluang dan tantangan yang ada sekarang adalah munculnya era *disrupsi*. Era disrupsi ditandai terjadinya perpindahan dari satu ke yang lain, yang mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat. Media sosial yang berkembang demikian pesat dan menjadi bermanfaat bagi masyarakat bila nilai-nilai inti sebagai sebuah bangsa tidak hilang. Media sosial bisa menjadi alat untuk memecah belah, alat saling menyerang bila dalam penggunaannya tidak didasari dengan nilai-nilai inti sebagai bangsa yaitu Pancasila.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat, diharapkan tidak menjauhkan generasi muda

dari budaya bangsanya, persoalan-persoalan yang dihadapi bangsanya, menggerus ideologi bangsanya. Hal ini bisa terjadi karena kemajuan teknologi telah memudahkan masuknya informasi apapun termasuk ideologi lain tanpa bisa dihindari. Kita tidak bisa menghindar tapi harus menghadapi. Untuk menghadapi tantangan baru karena adanya perkembangan teknologi informasi, wartawan juga harus belajar dan menguasai literasi baru, berupa literasi digital, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, problem-problem yang dihadapi bangsa, termasuk yang terjadi kawasan perbatasan juga dengan mudah diketahui oleh bangsa lain, seperti pembalakan liar, pengungkapan kasus-kasus narkoba juga dengan mudah diakses oleh bangsa lain.

Penguasaan literasi baru termasuk literasi digital yang baik akan membantu masyarakat menggunakan media sosial dengan baik. Informasi-informasi yang beredar diharapkan bisa dipertanggungjawabkan, bisa mendorong penguatan ideologi. Dalam konteks ini literasi digital untuk wartawan sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat akan menjadi lebih baik. Tidak hanya replika-replika yang terjadi di media sosial. Namun, informasi yang beredar di media sosial justru hendaknya merupakan informasi dari media massa yang digali dengan baik karena wartawan harus melakukan konfirmasi untuk setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, bukan hanya memotret fakta. Dalam konteks wawasan kebangsaan sebagai cetak biru tujuan dan cita-cita bangsa, wartawan berperan menjadi pencatat, perekam, saksi, penyebar informasi sekaligus pemantau kinerja

untuk mengingatkan segenap bangsa, sejauh mana cetak biru yang telah disepakati telah benar-benar dijalankan oleh penyelenggara negara.

Wartawan yang bertugas di Kepulauan Riau bisa mengawal pembangunan bangsa. Apakah pembangunan yang dijalankan sejalan dengan arah pembangunan nasional? Apakah rencana strategi yang dibuat telah sinkron dan harmonis? Sejauh mana potensi ekonomi yang ada telah dimanfaatkan? Bagaimana pembangunan yang dijalankan di wilayah ini mendorong untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat? Bagaimana pemerintah menempatkan posisi wartawan dalam rangka pembangunan nasional?

Setiap media tentunya memiliki sistem yang berbeda-beda. Namun sistem yang diterapkan di media hendaknya bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Kemampuan beradaptasi ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dan untuk disebarkan kepada masyarakat.

2.2. Bela Negara di UPN “Veteran” Yogyakarta

Kompleksitas fakta dan peristiwa yang dihadapi wartawan dalam bertugas di lapangan, tuntutan kecepatan dalam menyampaikan sebuah informasi menghadapkan wartawan untuk bisa bekerja secara cepat, akurat. Di sisi lain ada tuntutan agar wartawan juga ikut mengawal kepentingan bangsa dan negara serta ideologi bangsa. Semua ini bukan hal yang mudah.

Menghadapi tuntutan semacam itu, wartawan diharapkan bisa memiliki landasan bela negara ketika berhadapan dengan

fakta dan peristiwa di lapangan. Di mana kepentingan bangsa dan negara menjadi pertimbangan ketika menulis dan melaporkan fakta di lapangan. Tentu saja penanaman nilai-nilai bela negara untuk wartawan diperlukan dan bagaimana caranya tentunya semua media memiliki cara berbeda-beda.

Namun apa yang dilakukan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta yang mendeklarasikan diri sebagai kampus bela negara bisa menjadi acuan bagaimana nilai-nilai bela negara ditanamkan kepada mahasiswa. Diharapkan nilai-nilai bela negara ini menjadi spirit ketika mahasiswa telah lulus dan berbaur dalam dunia kerja.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) adalah kampus yang barangkali berbeda dengan kampus-kampus lain di Indonesia. UPNVY ini adalah kampus yang mengalami transisi penting dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pejuang, dijadikan sebagai monumen aktif perjuangan para pejuang terus berjuang. Para veteran ini awalnya berjuang untuk melepaskan bangsa dari penjajahan. Setelah merdeka maka mereka para veteran ini terus berjuang melalui dunia pendidikan.

Penanaman nilai bela negara di UPNVY mengikuti peta jalan yang telah ditetapkan. Peta jalan mengikuti proses penyadaran, pemahaman, internalisasi, yang diharapkan berujung pada perubahan sikap dan perilaku berbasis nilai bela negara. Pada saat mahasiswa masuk dalam pengenalan kehidupan kampus bela negara (PKKBN). Setelah itu proses perkuliahan juga standar berseragam pada awal perkuliahan. Penanaman bela negara juga tertuang dalam kurikulum, dimana ada mata kuliah

wajib tentang bela negara yang harus diambil selain mata kuliah Pancasila yaitu mata kuliah Wimaya. Kawasan kampus UPNVY berwarna bela negara, rencana-rencana program yang disusun harus dipastikan mengawal bela negara.

Sejak menjadi mahasiswa baru hingga lulus mahasiswa UPNVY dibekali dengan nilai-nilai bela negara, baik melalui mata kuliah khusus seperti mata kuliah Wimaya, Pancasila maupun disisipkan dalam mata kuliah lain. Dalam setiap event-event formal selain dikumandangkan lagu Indonesia Raya juga lagu Bela Negara. Di setiap sudut kampus nilai-nilai bela negara dengan mudah ditemui dalam berbagai bentuk, seperti poster, patung para pahlawan dan sebagainya. Pada saat wisuda para wisudawan akan mencium bendera merah putih.

Kurikulum, tradisi yang dibangun, program Tridharma Perguruan Tinggi di UPNVY pada dasarnya untuk membentuk agar mahasiswa UPNVY dimanapun nanti bekerja harus mengingat bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan, ideologi Pancasila harus menjadi nilai yang dilestarikan.

Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPNVY yang telah memiliki alumni bekerja menjadi wartawan diharapkan dalam bekerja selain berlandaskan pada rambu-rambu hukum, etika profesi juga berlandaskan untuk kepentingan bangsa dan negara. Wartawan diharapkan menjadi pelopor untuk pembangunan dengan jiwa patriotik menghadapi tantangan dalam pembangunan.

BAB III

TANTANGAN PERS DI WILAYAH PERBATASAN¹

3.1. Pengantar

Pers sebagaimana ada dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No 40 tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Mencermati pemahaman tentang pers sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, pers tidak hidup dalam ruang yang kosong. Pers hadir untuk mengawal hak azazi manusia untuk mendapatkan informasi. Keberadaan pers tidak akan lekang oleh jaman. Pers memiliki fungsi yang yang tidak lekang oleh jaman apapun perkembangan yang meliputinya. Pers memiliki nilai, etika dan tujuan untuk apa mereka ada.

1 Rangkuman pemaparan pembicara dari Dewan Pers Agus Sudibyo, Jamalul Insan dan Hendry CH Bangun acara *In House Training* Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan” Kepulauan Riau, tanggal 20- 27 September 2021

Pers memiliki fungsi yang universal :

1. *Surveillance* (pengawasan). Fungsi pengawasan media massa dibagi dalam bentuk *Warning or beware surveillance* dan *Instrumental surveillance*
2. *Interpretation* (penafsiran) pers tidak hanya memasok fakta dan data tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri media memaparkan kejadian-kejadian penting. Industri media atau organisasi media yang memutuskan peristiwa-peristiwa yang akan ditayangkan atau dimuat.
3. *Linkage* (pertalian). Pers bisa menyatukan anggota masyarakat secara beragam sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat yang sama.
4. *Transmission of value* (penyebaran nilai). Fungsi ini tidak terlalu kentara kita rasakan tapi kita bisa merasakan ada sebuah perubahan, pergeseran terhadap sebuah nilai. Fungsi ini yang disebut dengan sosialiasasi dimana individu akan mengadopsi nilai satu kelompok. Media massa diharapkan mewakili kita tentang peran dan harapan yang ingin kita wujudkan.
5. Fungsi *entertainment* (hiburan). Tentunya dengan mengacu pada aspek kelembagaan diharapkan fungsi hiburan ini dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
6. Fungsi mendidik sebagai sarana pendidikan bagi warganya, Terutama dalam pengajaran nilai, etika, pembangunan karakter dan lainnya. Fungsi ini akan bisa

kita rasakan bila melihat content-content yang disajikan media.

7. Fungsi menakutkan (*to persuade*). Tujuannya (a) Memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang, (b) Mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang, (c) Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu (d) Memperkenalkan etika atau menawarkan nilai tertentu (f) Fungsi membius. Maksudnya apabila media massa menyajikan sesuatu, audiensi percaya bahwa tindakan tertentu harus diambil sehingga tanpa disadari audiensi akan terbius secara pasif.
8. Fungsi menciptakan rasa kebersatuan. Pesan yang tersaji dalam media massa sering tidak disadari membuat kita merasa menjadi satu bagian kelompok.
9. Fungsi privatisasi . Privatisasi adalah kecenderungan bagi seseorang untuk menarik diri dari kehidupan sosial dan mengucilkan diri dalam dunianya. Mereka menarik diri dalam informasi-informasi yang membuat mereka putus asa sehingga lebih tertarik mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya (Elvinaro Ardianto, 2007)

Melihat begitu luasnya fungsi pers ini maka keberadaan pers di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Riau sangat strategis. Melalui peran serta pers di wilayah ini maka masyarakat di luar wilayah ini akan bisa mengenal potensi serta persoalan-persoalan yang terjadi. Bagaimana pers di wilayah perbatasan bisa menjadi motivator masyarakat perbatasan untuk maju, mengenalkan potensi yang dimiliki wilayahnya.

Namun problematika di wilayah perbatasan sangatlah kompleks dan akan menyentuh ruang politik yang bisa jadi akan melibatkan negara yang berbatasan dengan wilayah ini. Isu kemanusiaan, isu kemiskinan, isu kesenjangan dengan daerah lain. Terkait dengan berbagai problematika di wilayah perbatasan serta untuk melihat peran pers dalam mengangkat potensi kemaritiman. Dalam sub bab ini akan dirangkum pemikiran dari Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo, Ketua Komisi Bidang Pendidikan Dewan Pers Jamalul Insan, Sekretaris Dewan Pers Hendry CH Bangun yang dipaparkan dalam *in house training* jurnalisme kemaritiman berwawasan kebangsaan.

3.2. Memosisikan Peran Pers Terhadap Isu Perbatasan².

Tidak mudah mensinkronkan antara nasionalisme di satu sisi dan kebebasan pers di sisi yang lain untuk melihat bagaimana peran pers di wilayah perbatasan. Isu perbatasan yang menarik perhatian adalah di wilayah Papua dan Natuna.

Isu local di Papua walaupun tidak di perbatasan juga menarik perhatian pers. Mengingat di wilayah ini masih banyak bergolak isu-isu kekerasan. Walaupun pers memiliki kebebasan namun dalam melihat isu diperbatasan, khususnya isu local di Papua harus hati-hati. Pers harus memperhatikan ini dan menjalankan fungsinya dengan baik dan hati-hati. Persoalannya adalah, isu Papua ini adalah isu yang kompleks

2 Dirangkum Anggota Dewan Pers merangkap Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo

yang kasat mata di lapangan dengan kekerasan yang menimpa masyarakat sipil, salah satunya tenaga kesehatan.

Memang benar isu keamanan ketertiban apapun bentuk kekerasan itu tidak bisa ditolerir dan keadilan buat korban harus segera diwujudkan oleh aparat keamanan. Ini tentu insiden pidana kekerasan yang mencederai orang, yang membunuh orang, yang merusak fasilitas publik, seperti puskesmas itu. Ini sesuatu yang nyata, pers memberikan dukungan penuh kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap pelakunya, mengusut pelakunya dan menegakkan keadilan buat korban itu.

Jadi, apapun kekerasan itu, siapapun yang melakukan apakah oleh warga biasa, oleh sekelompok warga massa atau oleh aparat negara itu tidak bisa dibenarkan. Kita harus menjunjung hukum di atas segalanya dan di sini hukum tidak pernah bisa membiarkan atau pun memaafkan terjadinya kekerasan siapa pun pelakunya dan siapa pun korbanya.

Papua ini kompleks karena juga ada komplain ketidakadilan, ada problem ketimpangan itu. Provinsi Papua masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain pada umumnya di Indonesia. Juga ada ketidakadilan, bagaimana kekayaan tanah Papua terus-menerus dieksplorasi dan digunakan bukan hanya untuk pembangunan Papua tapi juga pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Jadi, kontribusi sektor ekstraktif Papua terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan itu signifikan dan pemerintah Indonesia juga melaksanakan program transmigrasi di mana warga Indonesia yang lain di provinsi yang lain itu dipindahkan

ke Papua untuk membangun di sana dan juga untuk menikmati potensi ekonomi potensi alam di Papua itu. Papua menjadi bagian dari Indonesia itu harga mati, yang sampai hari ini tidak bisa kita lepas. Namun harus diakui masih ada ketidakadilan dan itu harus diselesaikan. Masalah kemanusiaan, tapi kemanusiaan ini juga harus diletakkan dalam konteks problem ketidakadilan, problem ketimpangan yang harus diperhatikan secara bersama-sama.

Separatisme tentu tidak bisa ditolerir dalam konteks NKRI, dalam konteks NKRI separatisme gangguan keamanan dan ketertiban tidak bisa kita tolerir. Kita perlu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Indonesia untuk menangani gejala separatisme di mana pun itu. Di saat yang sama kita tidak bisa menutup diri maka bahwa ada problem ketidakadilan, ketimpangan dan kemanusiaan.

Dalam konteks yang seperti ini, pers itu posisinya dilematis. Di satu sisi pers itu harus profesional. Profesional itu berarti menyampaikan fakta secara apa adanya, pers harus menjaga etika jurnalistik, memberitakan dengan etika jurnalistik, berimbang klarifikasi sumber kunci, menggunakan atau menjalankan asas praduga tak bersalah, memeriksa kredibilitas otoritas sumber kunci independen.

Nilai-nilai tersebut yang harus digunakan harus didalami oleh pers yang meliput isu Papua. Namun pers juga memiliki kewajiban untuk berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, Dalam konteks ini, perspektif jurnalisisme damai bisa diterapkan.

Wartawan dan pers tempatnya bekerja bukan hanya sekedar harus memperhatikan profesionalisme dan etika

jurnalis saja. Wartawan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak dari kebijakan pemerintahan.

Melihat dari sisi profesionalisme dari tingkat jurnalistik, kalau yang dihadapi adalah fakta maka fakta itu diungkap ke permukaan. Namun dari sisi kemanusiaan perlu dipertimbangkan. Hal itu bisa membuat orang ribut dengan orang lain, bisa menyebabkan kerusuhan yang tidak kunjung selesai. Media perlu mempertimbangkan untuk tidak memberitakan fakta itu.

Jadi jurnalisme damai itu mengajarkan bahwa fakta memang harus diungkap tetapi kalau fakta itu menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi publik bagi kemanusiaan, seyogyanya dipertimbangkan pemberitaannya ditunda atau dibatalkan. Ketika berada dalam situasi normal ini, jarang terjadi tetapi dalam situasi darurat terkait dengan kemanusiaan krisis keamanan itu perlu dipertimbangkan oleh pers. Nasionalisme juga penting karena nasionalisme itu menjadi esensi diri kita. Di semua negara, memiliki nasionalisme dan pers Indonesia juga harus memiliki nasionalismenya.

Kita bisa belajar dengan pers Thailand. Pers Thailand kalau ditanya, kalau ada kerusuhan atau demonstrasi atau ada bencana alam di sana. Kalau bencana alamnya banjir, maka pers Thailand itu memiliki semacam kesepakatan bahwa pemberitaannya tidak perlu dibesar-besarkan.

Jadi kalau ada kerusuhan demonstrasi kuning lawan merah ya di sana, atau ada pemberontakan atau ada bencana alam pers Thailand itu kompak untuk tidak memberitakan besar-besaran. Kalaupun diberitakan ya satu dua saja. Kenapa begitu?

Pernah suatu ketika Bangkok itu banjir, kira-kira dua minggu itu banjir, karena Bangkok itu kan di tengahnya itu ada sungai besar, Nah begitu banjir diberitakan besar-besaran, maka kemudian para turis itu tidak berani datang ke Bangkok itu.

Meskipun misalnya situasi banjir sudah reda 1 bulan 2 bulan kemudian, tetep saja turis itu tidak berani berlibur ke Bangkok Pattaya. Kenapa? Di dunia maya, internet terlanjur menyebar foto-foto tentang Bangkok banjir. Jadi, meskipun sudah reda ini banjir tapi jejak digital yang ada tentang Bangkok adalah banjir. Jadi apa yang sudah kita upload di media sosial di dunia maya sulit untuk dihapuskan.

Berangkat dari itu maka pers Thailand memiliki semacam kesepakatan, kalau ada peristiwa terkait tentang Thailand, keamanan atau banjir beritanya tidak perlu dibesar-besarkan karena nanti membuat turis tidak berani datang ke Thailand. Turisme itu terpuruk padahal ekonomi Thailand itu kurang lebih 40 persen tergantung dari turisme. Kalau pariwisata terpuruk, ekonomi bakal terpuruk dan belanja iklan di media juga terpuruk maka esejahteraan wartawan juga ikut terpuruk.

Sikap yang diambil oleh pers Thailand itu contoh nasionalisme dalam konteks pemberitaan media. Bagaimana dengan pers Indonesia untuk kasus yang sama? Kita lihat ketika Gunung Merapi di Jogja atau Gunung Agung di Bali Meletus. Pemberitaan itu disebar di media sosial. Foto tentang detik-detik Gunung Agung erupsi, warga mengungsi, kekacauan di bandar udara Ngurah Rai ketika wisatawan yang mau keluar dari Bali.

Peristiwa itu diberitakan dengan gambar-gambar yang dramatis dan gambar itu tidak terhapus di dunia maya. Akibatnya, ketika tiga bulan kemudian Bali sudah aman lagi tetap saja yang dilihat orang asing yang mau ke Bali adalah gambar-gambar yang menyeramkan itu. Akhirnya turis dari Jepang dari Hongkong dari Korea yang mau ke Bali berpindah ke Phuket dan Thailand.

Berdasarkan contoh ini, pers Thailand memiliki nasionalismenya, sementara pers Indonesia masih berpegang pada kebebasan persnya. Masih belum banyak melihat bahwa kebebasan pers itu mesti diletakkan dalam konteks nasionalisme kepentingan nasional. Apa kepentingan nasional kita dibandingkan kepentingan nasional dengan negara lain. jadi kita harus melihat fakta bahwa kebebasan pers memang value, tetapi nasionalisme, kemanusiaan itu juga yang lain harus diperhatikan.

Apa gunanya kalau pers bebas tapi pemberitaannya sangat bebas, tapi kemudian berdampak kepada kemiskinan publik. Ketika pariwisata Bali terpuruk itu maka yang terpuruk bukan hanya hotel, tapi juga masyarakatnya. Masyarakatnya yang terlanjur hidup dari turisme. Aspek ini yang perlu diperhitungkan.

Bagaimana dengan Natuna? Apa isu utama di Natuna? Ada kedaulatan teritorial yang diganggu oleh negara tetangga yang besar dan kaya itu. Ada isu keamanan? Ada juga isu kesejahteraan nelayan, pembangunan wilayah perbatasan. Kompleksitas di wilayah perbatasan ini mirip dengan isu Papua.

Ada isu keamanan para nelayan diganggu dalam mencari mata pencaharian, tapi juga ada isu kesenjangan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia masih belum maksimal berpihak kepada masyarakat perbatasan, tidak hanya Natuna tetapi di perbatasan Kalimantan.

Jadi, ada kesenjangan, ada “penelantaran” masyarakat maka wartawan yang ada di garda depan perbatasan” maka wartawan harus melihat secara menyeluruh, Misal, apakah nelayan-nelayan Natuna sudah dilindungi, difasilitasi sebagaimana nelayan di Pulau Jawa misalnya. Apakah pembangunan wilayah perbatasan sudah menyejahterakan dan sudah mendukung mereka dan sudah membuat mereka bangga sebagai bagian dari NKRI.

Hal inilah yang juga perlu diperhatikan, jadi kalau dari kacamata pers itu kan kita harus melihat persoalan, secara komprehensif. Dalam beberapa hal kita mengapresiasi langkah langkah pemerintah, menangani masalah advertorial kedaulatan keamanan di sisi lain kita harus memberikan masukan, memberikan evaluasi. Ada beberapa hal yang mestinya ditekankan dilakukan oleh pemerintah, tapi belum dilaksanakan dengan baik, yaitu mensejahterakan warga di wilayah perbatasan, membangun wilayah perbatasan dan juga mengatasi problem kesenjangan itu.

Pers dalam mensikapi hal itu persoalan profesionalisme, independensi,etika jurnalistik itu harus diletakkan pada tataran yang sama dengan skala nasionalisme dan kemanusiaan itu. Apa yang harus dilakukan pers. Dalam konteks isu-isu perbatasan ini tentu sebagai fungsi keempat pers harus

mengkritik pemerintah yang memang pekerjaan pers itu mengkritik pemerintah. Sebaliknya, pemerintahnya tidak boleh anti kritik, tetapi persnya juga harus mengkritik berdasarkan fakta, menaati kode etik jurnalistik. Setia kepada fakta dalam arti jangan terlalu terjebak dalam jurnalisme *talking news*.

Jurnalisme yang hanya mengutip sana, mengutip sini, tapi sebenarnya tidak melakukan *indepth reporting*, tidak melakukan investigasi secara memadai, tidak mencari, menggali data secara independent, terlepas dari pihak-pihak yang sering memberikan komentar data pada idealnya tidak dilakukan pada saat meliput di perbatasan.

Memperhatikan dampak pemberitaan terkait dengan kemanusiaan, terkait isu rasisme, SARA itu memperhatikan dampak pemberitaan itu penting sekali. Jangan sampai kemudian media itu tanpa sengaja menjadi pemicu konflik, misalnya dalam kasus konflik di Maluku belasan tahun yang lalu, dalam konflik di Kalimantan di Pontianak, di Sambas itu. Ini bahaya laten bahwa multikulturalisme yang kita punya itu sarat dengan potensi konflik sehingga media harus hati-hati dalam memberitakan dan jangan terjebak menjadi pihak yang mengompromi memprovokasi konflik yang lebih besar, tanpa sengaja.

Kita juga punya isu keselamatan wartawan khususnya di Papua itu menjadi persoalan yang sangat pelik. Kita menyarankan betul agar keselamatan wartawan itu menjadi prioritas. Jangan sampai karena ingin mendapatkan liputan yang bagus yang eksklusif kemudian keselamatan wartawan itu diabaikan.

Kendala-kendala liputan di perbatasan ini, kira-kira ada keselamatan wartawan seperti Papua itu. Mengapa ini penting karena di wilayah-wilayah konflik aparat kepolisian dan TNI saja itu menjadi korban kekerasan sehingga wartawan juga harus menjaga keselamatan wartawan. Problem lainnya, keterbatasan akses masuk ke perbatasan itu, akses menjadi problem di Natuna, kepulauan Natuna yang luas itu bagaimana wartawan bisa mengakses ke sana. Tentu umumnya akan bergabung kepada pasukan TNI Angkatan Laut atau kepolisian yang sedang patroli biasanya begitu. Namun jumlah jumlah armada yang dimiliki oleh polisi laut dan angkatan laut juga terbatas.

Mahalnya biaya liputan dan juga problem yang lain ketertutupan pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering tidak terbuka kepada wartawan, sering alergi kepada wartawan kita. Misalnya di Papua itu masih ada problem bahwa pemerintah Indonesia itu tidak *welcome* terhadap wartawan - wartawan dari Jakarta, apalagi dari negara luar dari wartawan asing untuk meliput isu Papua. Di satu sisi kita paham ini masalah nasionalisme, masalah keamanan, tapi di sisi lain sebenarnya pers dan wartawan harusnya diberi ruang untuk melakukan peliputan untuk memberikan, menjamin melaksanakan hak publik atas informasi itu.

3.4. Jurnalisme Harus Berlaku sebagai Pemantau Kekuasaan³

Ketika kita memilih profesi sebagai jurnalis, harus profesional. Apalagi di wilayah perbatasan yang tentu ada kekhasan-kekhasan yang menuntut kerja cerdas. Kondisi di perbatasan sesuatu yang dalam gelap serba kekurangan serba keterbatasan itu paradigmanya sejak tahun 2000.

Bicara tentang paradigma baru tentang perbatasan yang mengatakan bahwa paradigma yang memandang perbatasan negara adalah perbatasan negara yang hanya wilayah yang harus dijaga secara militeristik perlu diubah. Kini menjadi wilayah entitas yang memiliki elemen kedaulatan dan penduduk yang harus dilindungi, termasuk memperkuat ekonomi. Wilayah perbatasan tidak lagi hanya menjadi daerah tempat tinggal dan berkehidupan bagi warga negara, tetapi juga menjadi salah satu daerah penggerak ekonomi bagi negara tetangga. Ketergantungan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan pada negara tetangga juga dapat dihilangkan.

Wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan sekaligus etalase negara. Meskipun sebenarnya kalau untuk wilayah Kepulauan Riau itu, semuanya ini terjadinya masalah perbatasan terkait yaitu terjadi kegiatan penyelundupan barang dan tenaga kerja. Bertitik tolak dari persoalan kita membahas paradigma baru tentang wilayah perbatasan dan kemudian juga masalah di perbatasan dan sebagainya. Untuk membahas itu

3 *Anggota Dewan Pers yang merangkap Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers, Jamalul Insan*

kita kembali kepada kita sendiri, yang awalnya adalah wartawan profesional harus ada di mana saja di tengah-tengah fakta dan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Kita kembali ke UU Pers No. 40 tahun 1999 pasal 3, misalnya, bahwa memang sebenarnya pers nasional itu mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Kalau kita lihat lebih atas lagi, itu kan sebenarnya ketahanan manifestasi dari keinginan kita ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

Cita-cita nasional negara kita, kalau kita sekolah dari SD, SMP, SMA ditemukan pada pembukaan undang-undang dasar. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tujuan negara kita yaitu memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ini cita-cita besar bangsa.

Nah, kalau kita mau melihat, sebenarnya apa sih. Kalau kita jadi jurnalis atau wartawan, ini apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Bill Kovach mengatakan, sebenarnya pekerjaan kita jurnalisme yang kita sebut ini, adalah sebagai nilai-nilai. Jadi kita tidak bicara tentang *platform*, kita tidak bicara tentang semua jurnalisme yang terbatas pada *platform*. Akitivitas jurnaklistik ini pada nilai, sebuah nilai kita harus bisa menjawab semua pertanyaan ke semua publik akan sumber daya alam, bukan sekedar produk berita atau agenda pesan berita.

Jadi, kalau secara sederhana apa sih tujuan jurnalisme itu? Menyediakan informasi yang diperlukan publik sehingga publik

bisa mengatur diri sendiri, publik bisa memutuskan sendiri. Jadi, ketika kita bisa memenuhi ini maka sebenarnya kita sudah menjalankan tujuan jurnanisme itu dengan nilai yang saya katakan tadi.

Jadi publik itu harus diberdayakan diberikan informasi yang cukup, yang adil, yang kuat sehingga publik bisa memutuskan sesuatu, bisa mengatur dirinya sendiri dengan informasi yang didapat dari kita, sebagai jurnalis. Bagaimana kita bisa melakukan itu, ya tujuan itu bisa memenuhi kebutuhan publik yang biasa disebut dengan sembilan elemen ini. Pertama, kebenaran. Kedua, loyalitas jurnanisme kepada warga atau masyarakat. Ketiga disiplin. Jadi wartawan bisa bebas memilih *platform*, tetapi harus disiplin melakukan verifikasi, kemudian praktisi jurnanisme harus menjaga independensi terhadap narasumber.

Lalu, jurnanisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. Jurnanisme juga harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga atau masyarakat. Lalu jurnanisme berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan. Jurnanisme harus menjaga agar berita komperhensif dan proposional. Dan para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Terkait dengan hak publik, hak publik selain kita berikan informasi, yang memang dibutuhkan apalagi? Informasinya itu ya harus kita sampaikan harus akurat. Bagaimana kita mendapat informasi akurat? Kita harus melakukan konfirmasi, melakukan verifikasi sehingga yang diterima oleh publik memang informasi yang akurat yang layak dan tepat untuk

publik. Bukan berita yang sekedar katanya katanya.

Nah, ini yang banyak ditemukan juga jadi pengaduan di Dewan Pers. Kita sudah banyak sekali menerima aduan dari masyarakat, keberatan terhadap berita-berita di media media yang setelah kita cek, berita itu berita katanya – katanya. Harusnya berita membutuhkan konfirmasi.

Kemudian, informasi yang kita sampaikan ke masyarakat juga harus bebas intervensi. Tidak boleh informasi yang kita sampaikan itu karena titipan sesuatu, yang seharusnya bukan seperti itu. Namun ada yang mengintervensi beritanya menjadi tidak akurat dan bisa menjadi berita bohong.

Terkait dengan wartawan harus bekerja secara profesional, Dewan Pers sejak tahun 2010 itu sudah mengeluarkan Piagam Palembang. Jadi ada Piagam Palembang ini sebagai sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh para pemilik media yang cukup besar. Memang sangat berkepentingan bahwa media jurnalis itu, harus memberikan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan publik, karena itu harus dijaga medianya dan jurnalisnya.

Jadi, dalam Deklarasi Palembang itu, memang dibutuhkan adanya standar. Kemudian harus dijaga tentang penerapan kode etik jurnalistik. Kemudian juga ada standar perlindungan profesi wartawan. Wartawan juga harus dilindungi dalam bekerja, tentu saja profesi yang dilindungi adalah wartawan yang professional bukan wartawan yang bekerja asal-asalan.

Kemudian kita juga mereka sangat konsen terhadap standar, inilah yang menurut para owner ini harus dijaga sehingga bisa

menghasilkan karya-karya produk yang betul-betul memang dibutuhkan oleh publik. Ini terkait dengan standar kompetensi wartawan disahkan oleh Dewan Pers sejak tahun 2010.

Saat ini sudah lebih dari 17.800 wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mengikuti uji kompetensi dan sudah mendapatkan sertifikat baik yang jenjang muda, madya atau utama. Wartawan yang telah tersertifikasi harus mendorong wartawan yang belum melakukan untuk mengikuti ujian sertifikasi. Serifikasi adalah bagian dari mengukur diri kita, mengukur kemampuan kompetensi kita. Kalau selama ini kita sudah merasa seakan sudah menjadi wartawan, sudah lama justru saat ini kita perlu mengukur diri, memotret diri ya.

Kode etik jurnalistik menjadi pegangan wartawan bekerja. Bila kode etik dijaga maka kita dalam bekerja akan menghasilkan karya-karya yang baik dan memang dibutuhkan masyarakat. Mulai dari bersikap independen, menempuh cara-cara profesional, karena apa? Seringkali kita merasa bahwa kalau kita sudah memegang kartu wartawan, seolah-olah merasa kita boleh melakukan apa saja.

Padahal tidak begitu, kita ini juga dibatasi oleh banyak hal yaitu cara-cara yang dilakukan dalam bekerja harus secara profesional. Selanjutnya di dalam proses kerja kita ini, selain kita memang harus profesional tentu juga kita akan harus mendapat perlindungan. Nah ini kawan-kawan mungkin di wilayah baik yang mungkin menjadi koresponden atau pendistributor dari media-media besar dari Jakarta. Atau mungkin yang punya media yang ada di perbatasan harus menerapkan ini.

Kita harus memberikan perlindungan kepada kawan-kawan kita yang bekerja di perusahaan pers menyediakan perlindungan, dukungan bantuan hukum kepada wartawan. Ini sudah ditandatangani dan menjadi deklarasi atau standar yang ditetapkan oleh para peraturan pers yang ditandatangani oleh para pemilik-pemilik perusahaan media.

Kewajiban pembekalan dan dukungan standar keamanan bagi wartawan yang bertugas di lingkungan tertentu. Perlindungan karya dari penyensoran. Larangan intervensi pemilik kepada wartawan untuk membuat berita yang melanggar KEJ (Kode Etik Jurnalistik) maupun peraturan yang berlaku. Kalau wartawan mau yang lebih sebagai harus punya idealisme, harus memiliki visi, harus memiliki misi, harus memiliki value. Jurnalis juga harus memiliki kompetensi. Jangan sampai kita bertanya, tapi kita tidak tahu apa yang kita tanyakan.

3.5. Media di Perbatasan Fokuslah Pada Isu Lokal⁴

Tugas pers di wilayah perbatasan itu adalah bagian keprihatinan yang harus kita sambut dengan baik. Mengapa saya mulai ini?. Hal ini untuk mengingatkan kembali, apa sih itu tugas utama, tugas sejarah kita, menyatakan diri mendeklarasikan diri menjadi wartawan.

Kemerdekaan pers yang kita peroleh sejak tahun 99 itu adalah wujud kedaulatan rakyat. Wartawan sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena memang tugas

4 Rangkuman materi Sekretaris Dewan Pers Hendry CH Bangun dalam *In house training* jurnalisme berwawasan kebangsaan 27 September tahun 2021

wartawan yaitu menyatakan pendapat mengeluarkan pikiran itu bagian dari praktek kemerdekaan pers. Jadi wartawan memperoleh tugas dari bangsa ini menjadi pilar keempat karena mengedukasi, melakukan kontrol sosial, menyediakan informasi, kalau hiburan itu sebetulnya tugas tambahan saja. Tugas itu yang perlu dipahami wartawan dulu, jadi banyak orang yang menganggap wartawan itu sebagai pekerjaan.

Jadi wartawan itu profesi, artinya profesi itu adalah pilihan hidup. Kalau pekerjaan itu kalau kita nggak cocok, pindah. Sementara kalau wartawan itu adalah pilihan hidup sama seperti kita memilih agama. Sama ketika kita memilih pasangan hidup, kita pilih tidak bisa nanti ganti. Jadi ini sebetulnya yang perlu teman-teman sadari kalau sudah menyatakan diri menjadi wartawan.

Sekarang ini sudah ada 100.000 lebih wartawan, tetapi hanya sebagian kecil yang ingin menjadi wartawan profesional. Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 mengatakan pers nasional wahana komunikasi penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas fungsi hak kewajiban dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional.

Profesionalisme sebetulnya dijamin dan dilindungi hukum. Sama juga bagaimana negara menjamin polisi, menjamin militer, menjamin keputusan-keputusan dari yudikatif. Jadi jaminan itu kita peroleh apabila kita memang bersikap dan bertindak profesional dalam menjalankan tugas.

Apa sih fungsi media? Fungsi media adalah informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial. Kemudian kita harus

tahu bahwa kemerdekaan itu hak asasi, hak yang melekat, sama juga hak hidup, sama juga hak ekonomi, hak budaya. Jadi kemerdekaan pers itu, hak warga negara.

Sejak disyahkannya UU Nomor 40 tahun 1999 kepada pers nasional tidak ada sensor dan pembredelan. Media dan wartawan sudah diberi kebebasan. Bebas tentu dalam ukuran-ukuran yang wartawan buat sendiri yang pantas. Pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan azas praduga tidak bersalah. Sikap profesional yang perlu dibangun wartawan ada beberapa yang sering dilupakan yaitu menghormati norma agama, kesusilaan dan azas praduga tak bersalah.

Peran wartawan itu apa? Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Masyarakat itu sebenarnya banyak sekali yang ingin tahu dan karena keterbatasan pers atau keterbatasan sumber informasi lain, maka banyak hal yang mestinya diketahui tidak diketahui.

Jadi sering wartawan itu gagal memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tahu. Tapi katakanlah, apabila mengikuti untuk mendapatkan pengetahuan langsung apa yang terjadi di laut, barangkali harus ikut misalnya kapal ikan selama 3-4 hari. Apakah ada perubahan media yang membolehkan mengizinkan apakah ada kapal ikan yang mengizinkan ini kan persoalan jadi kadang-kadang kita tidak bisa memenuhi.

Kemudian, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi supremasi hukum dan menghormati kebhinekaan. Jadi hal ini khas Indonesia . Pemahaman tentang kebhinekaan ini penting

sekali bagi wartawan karena ada banyak ratusan suku agama praktek budaya dan kepercayaan di masyarakat yang harus dikelola.

Kemudian, ada pengawasan kritik dan sebagainya jadi wartawan akan diingatkan lagi bahwa menjadi wartawan ini bukan sesuatu yang main-main, bukan kaleng-kaleng kalau kata orang sekarang. Jadi wartawan yang menekuni profesi ini tahun demi tahun, perlu menyadari betapa perannya bagi masyarakat sangat penting.

Paparan di atas kita berbicara mengenai konteks undang-undang. Lalu bagaimana dengan konteks lokal, bukan membedakan antara nasional dan local. Hal ini lebih pada melihat konteks lokusnya tempat. Jadi sebenarnya untuk tugas-tugas yang tadi itu setiap media harus menjabarkan itu. Hal ini akan dilakukan dewan pers ketika melakukan verifikasi ke koran perbatasan.

Media-media di perbatasan kadang-kadang kita melihat ini isinya tidak ada perbedaan dengan media di tempat lain. Artinya, media local di perbatasan belum mampu menjabarkan visi-misinya itu sesuai dengan kondisi kelokalan. Seharusnya ada warna local yang jelas misalnya sajalah katakan ya informasi apa saja mengenai Natuna ini paling banyak kalau kita Googling, keluarnya di media mana? Hampir kebanyakan di media nasional. Termasuk, kemarin soal ada kapal perang China.

Ini menandakan bahwa pengelola media lokal ini belum menggempur informasi tentang ke mana pun dengan beritanya. Google itu cara kerjanya mengambil yang paling banyak, yang paling dulu atau yang paling menarik. Tiga sisi ini

yang akan diambil google. Kita coba temen-temen melihat kembali tulisan tentang Natuna, misalnya mungkin ada Kompas, TV nasional dan ini sebetulnya menjadi tantangan kita. Ini berbeda dengan di negara maju mereka memang lebih fokus pada berita lokal.

Fokus pada aspek kelokalan ini seharusnya itu menjadi gudang informasi dan menjadi rujukan siapapun yang ingin tahu mengenai kelokalan itu di wilayah perbatasan. Media local tentu harus memberitakan peristiwa-peristiwa dari tempat lain, entah itu level kabupaten provinsi atau nasional bahkan internasional namun yang bermanfaat bagi warga setempat. Jadi misalnya kisah sukses pembuatan rumput laut di sebuah kabupaten di Jawa Timur, kemudian kisah sukses proyek perikanan di sekolah di Lampung atau di Thailand.

Ketika ada berita ini kita bisa melihat informasi itu bermanfaat bagi masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya Pulau Natuna dan sebagainya atau di Kepri pada umumnya. Dengan demikian, maka informasi yang kita berikan itu juga menjadi sumbangsih media untuk memperkaya memberikan ide terhadap masyarakat setempat. Kalau mau maksimal pekerjaannya, dia menjadi rujukan yang menjadi gudang informasi setempat bahwa informasi-informasi yang relevan yang penting dan dapat membangkitkan memberi ide kepada masyarakat setempat.

Wilayah perbatasan lokal, mengenai perbatasan ini memang luar biasa, luar biasa eksposnya masih sangat kecil. Kalau pun ya berita-berita banyak dimuat di media itu, umumnya itu pers rilis misalnya di perbatasan Kalimantan ada usaha

penyelundupan dari Malaysia masuk melalui pintu di mana namanya di Entikong atau di Timor Leste. Jadi, menempatkan wartawan di wilayah perbatasan itu tidak murah dan juga belum tentu ada media sebesar Kompas, sebesar Media Indonesia atau Tempo.

Itu praktis, tidak ada media yang menempatkan wartawan khusus untuk meliput wilayah perbatasan. Walaupun kita tahu, bahwa sebenarnya, terutama sejak pemerintahan Presiden Jokowi ada upaya yang luar biasa untuk menambah bobot ekonomi di wilayah perbatasan. Di samping itu juga untuk meningkatkan performa Indonesia.

Wartawan di perbatasan, seperti wartawan di wilayah Natuna dan Anambas ini bila ingin menjadi media yang maju gitu, yang papan atas, perlu membikin agenda untuk membuat liputan yang konsisten apa tadi, misalnya disebutkan mengenai SDM. Apabila persoalan ini terus diekspose maka pemerintah pusat akan memberikan perhatian.

Apakah perhatian sekarang sudah memadai? Menurut saya belum. Perlu ada kesadaran wartawan untuk membuat liputan yang akan membuat provinsi, kabupaten kita maju. Tidak ada salahnya kita melakukan cek isi dari media-media yang ada di Kepri.

Kita harus punya agenda-agenda, sehingga ada konsistensi. Kadang-kadang kalau kita nggak punya agenda, agenda harian, bulanan untuk acuan peliputan sehingga kita bisa focus terhadap liputan yang akan dibuat. Misalnya, bulan April ada ujian nasional untuk siswa maka berita apa yang akan kita buat begitu seterusnya. Agenda liputan perlu dibuat selama setahun.

Semua catatan-catatan kejadian tahun sebelumnya juga perlu dicatat agar tidak lupa. Catatan itu akan membantu wartawan untuk membuat liputan. Misalnya, kalau kita seorang fotografer itu tiap tanggal 17 Agustus ada upacara bendera. Apa sih bedanya upacara bendera di Natuna dengan di Surabaya, pasti beda kan? Harus dibuat yang berbeda, sehingga muncul kreativitas kita. Memberitakan apa ya nanti agar media local perbatasan lain dari pada yang lain dengan 17-an di provinsi lain. Kita lakukan sesuatu viral kita nanti menjadi. Oh ini hebatnya Natuna, akhirnya kita jadi kreatif.

Isu-isu itu penting di perbatasan juga harus diberitakan karena jangan menyamakan media lokal kita dengan media nasional. Media lokal memiliki kekhasan, kelebihan tersendiri yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Barangkali media dan difasilitasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi bisa melakukan, katakanlah, focus group discusion dengan mengundang siapa tokoh-tokoh agama, aktivis, aparat hukum, akademisi yang akan membahas isu-isu penting di Natuna? Katakanlah mengenai kekayaan sumber daya maka hasil FGD membuat skala prioritas 10 besar dan ini menjadi semacam kewajiban bagi pers di Natuna untuk memberitakan dan bisa ada setiap hari sehingga kita selalu ingat bahwa wartawan dan media local di perbatasan memiliki tugas untuk mengangkat wilayahnya.

Wartawan di perbatasan perlu memiliki bank data. Bank data itu macam-macam, salah satu misalnya kita daftar satu mengenai kekayaan alam, kita bisa melihat siapa yang yang lalu lalang di perairan Natuna. Misal kapal asing yang sering lewat

di perairan Natuna, mereka membawa apakah keberadaan kapal tersebut membawa dampak, dan lainnya. Atau kalau ada sesuatu yang ganjil, biasanya kapal perang ini, lewat ini, sebulan cuma dua kali ini kenapa bulan ini lima kali, nah kan enak kita lihatnya jadi wartawan itu kelihatan pintarnya.

Melalui cara seperti ini kelihatan bahwa produk jurnalistik yang secara ideal merupakan karya intelektual, bukan hanya ada pers rilis kita muat yang tidak ada pengayaan. Jadi dengan adanya bank data itu maka kita akan mudah membuat peristiwanya itu sudah dipercaya mudah sekali kita percaya, karena kita punya bank data. Misal tentang SDM diperbatasan. Bila ini diekspose dengan berbagai aspek maka ada perhatian untuk meningkatkan SDM di wilayah perbatasan sehingga bisa mengurangi pengangguran.

Misalnya, peningkatan SDM untuk pengolahan perikanan. Bila SDMnya tersedia maka dengan sendirinya akan meningkatkan produksi. Bila produksi meningkat maka daya serap tenaga kerja meningkat dan akan berdampak ke sektor lainnya.

Di samping itu juga pers bisa menjadi jembatan untuk berbagai pelatihan peningkatan SDM dengan instansi terkait. Natuna itu akan lebih maju dia apabila SDMnya dimajukan karena itulah sebetulnya kunci kemajuan sebuah daerah. Pers harus menyadari peran sejarahnya peran sejarah untuk ikut berperan aktif jadi menjadi pendidik k tetapi juga membangkitkan motivasi masyarakat supaya dia melihat sesuatu yang terang di ujung sana dan tidak lagi hanya berkeluh kesah atas kekurangan-kekurangan yang dilihat. *

Daftar Pustaka

Ardianto, Elvinaro, 2007, *Komunikasi Massa: Satu Pengantar*, Refika, Bandung

....., Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers

—paparan dan transkrip materi *In house Training* Jurnalisme Maritim Berwawasan Kebangsaan, tahun 2021

BAB IV

MEDIA DAN KEAMANAN MARITIM: MENGAMANKAN YANG ‘LUPA’ DIAMANKAN

Nikolaus Loy¹

4.1. Pendahuluan

Keamanan maritim menjadi isu sentral dalam politik Indonesia pasca tahun 2000. Kebangkitan isu ini didorong oleh dinamika global dan domestic. Integrasi ekonomi dunia mendorong pergerakan barang, jasa, informasi dan manusia. Pada saat bersamaan, aktivitas kriminal yang melewati ruang maritim mengalami transnasionalisasi. Batas-batas fisik negara tidak lagi efektif mencegah para pelaku kejahatan transnasional melakukan operasi mereka. Salah satu ancaman kejahatan adalah terorisme global. Pemboman kapal perang AS di Yaman tahun 2000 dan serangan pada *World Trade Center*, New York, September 2001 menimbulkan kecemasan bahwa zona maritim akan menjadi medan baru kegiatan terorisme global. Di tingkat domestik, keamanan maritime mengemuka karena (1) luas wilayah Indonesia didominasi oleh laut; (2) Laut Indonesia menjadi jalur utama perdagangan internasional. Wacana keamanan maritim mengalami *booming* ketika presiden Joko Widodo mengumumkan poros maritim dunia sebagai visi pembangunan dalam dan pasca pemilu 2004.

1 Dr. Nikolaus Loy, MA dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta

Tulisan ini mendiskusikan jawaban untuk beberapa pertanyaan. Isu-isu apa saja yang dicakup dalam wacana keamanan maritim? Apa perspektif yang bisa dipakai dalam mengelompokkan dan menganalisis isu-isu tersebut? Bagaimana peran media dalam mengkonstruksi isu-isu keamanan maritim? Paper ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam memetakan isu-isu keamanan maritim. Data diperoleh melalui studi literatur seperti jurnal, media cetak dan on line, laporan pemerintah dan sumber sekunder lain. Pemetaan dibagi ke dalam enam bagian. Setelah pendahuluan, bagian kedua mendiskusikan makna terminologis keamanan dan keamanan maritim. Bagian ketiga membahas keamanan maritim dalam perspektif tradisional, disusul dengan keamanan maritim dari kacamata non-tradisional di bagian ke empat. Bagian ke lima mendiskusikan peranan media dalam menkonstruksikan keamanan maritim melalui proses sekuritisasi. Bagian ke enam adalah penutup.

4.2. Keamanan dan Keamanan Maritim

Apa itu *security* (kemananan)? Jawaban atas pertanyaan ini melahirkan perdebatan panjang. Keamanan umumnya didefinisikan sebagai kondisi bebas dari adanya ancaman terhadap obyek tertentu. Ullman berargumen bahwa salah satu cara memahami apa itu keamanan adalah dengan bertanya “apa yang akan kita korbankan untuk memperoleh keamanan” (Baldwin 1997: 8). Dalam gagasannya, kesadaran akan keamanan baru muncul ketika “kita terancam kehilangan keamanan itu sendiri”.

Sementara makna konseptualnya belum disepakati, penggunaan konsep keamanan memiliki dampak yang sangat penting. 'Keamanan' sebagai konsep dan turunan kebijakannya digunakan untuk membatasi kebebasan sipil, mengumumkan perang dan mengalokasikan sumber daya oleh negara (Baldwin, 1997: 9). Di bawah Orde Baru, misalnya, demi alasan keamanan, partai dikontrol, kebebasan berpendapat dibatasi, buruh ditindas. Selain itu pemahaman tentang makna keamanan memiliki hubungan penting dengan praktek kekuasaan, keadilan, persamaan, kebebasan dan kewajiban sebagai warga negara.

Upaya memperjelas makna konsep keamanan dilakukan oleh Wolfers (1952) yang mendefinisikan keamanan sebagai "ketiadaan ancaman pada nilai-nilai yang diperlukan". Nilai dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup secara layak. Untuk memperolehnya, manusia melakukan pengorbanan melalui kerja, investasi atau membeli. Bentuknya bisa berupa nilai ekonomi, kebebasan, lingkungan, identitas budaya dan kehidupan itu sendiri. Makin rendah ancaman terhadap nilai-nilai di atas makin aman seseorang atau sebuah komunitas.

Konsep keamanan Wolfers dapat diaplikasi ke ruang *maritime* yang dapat dimaknai sebagai lokasi dan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan laut. Aktivitas mencakup transportasi, budidaya dan penangkapan ikan, pelayaran, kargo, pertahanan dan keamanan, pertambangan lepas pantai, turisme dan aktivitas pesisir. Semua aktivitas ini berkaitan dengan lokasi statis maupun yang bergerak seperti pantai,

kolam pelabuhan, dasar dan permukaan laut, platform statis, kapal dan ruang udara di atasnya. Manusia melakukan aktivitas tersebut untuk memperoleh nilai yang diperlukan. Keamanan maritim, dengan demikian, bisa dipahami sebagai keamanan semua aktivitas dalam upaya memperoleh nilai tersebut.

Keamanan maritim sebagai sebuah terminologi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif *negative security* di mana domain maritim disebut aman ketika tidak ada ancaman terhadap benda, obyek dan aktivitas di zona maritim. Keamanan di sini dipahami sebagai semua upaya mitigasi untuk mencegah berbagai bentuk ancaman terhadap aktivitas manusia dan lingkungan di laut. Dalam pengertian kedua, keamanan maritim merujuk pada *positive security*. Keamanan bukan hanya soal tidak adanya ancaman, tetapi bagaimana kondisi ideal di domain maritim yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi.

Sebuah matriks yang dikembangkan Bueger (2015) menunjukkan bahwa keamanan maritim dapat dilihat dari beberapa perspektif seperti keamanan nasional, keamanan lingkungan atau keamanan ekonomi. Dengan kata lain, keamana maritim hanya memiliki makna jika dihubungkan dengan isu lain. Matriks yang dikembangkan Bueger sebenarnya menggabungkan tiga pertanyaan utama yakni: apa jenis ancaman, apa atau siapa yang terancam, apa atau siapa aktor yang menimbulkan ancaman. Dengan menggunakan tiga pertanyaan ini, keamanan maritim dapat dianalisis dari dimensi (1) keamanan nasional; (2) keselamatan di laut, (3) keamanan ekonomi dan (4) keamanan manusia. Meskipun secara

konseptual bisa dipisahkan, dalam realitas, ke empat dimensi di atas seringkali bertumpang tindih atau beririsan.

4.3. Keamanan Maritim dalam Perspektif Tradisional

Pengelompokan isu keamanan maritim yang dilakukan Buerger berasal dari dua tradisi besar studi keamanan. Pertama pendekatan tradisional yang identik dengan teori realism politik dan studi strategis. Dalam tradisi ini, ancaman utama adalah serangan militer. Aktor yang mengancam adalah negara atau aliansi antar beberapa negara. Obyek yang terancam adalah eksistensi, kedaulatan territorial dan politik negara. Sumber ancaman dan lokasi geografis asal ancaman relatif mudah teridentifikasi. Keamanan nasional adalah isu utama dalam pendekatan ini.

Dari perspektif keamanan nasional, keamanan maritim berkaitan dengan kemungkinan serangan militer melalui laut, pelanggaran batas wilayah territorial oleh negara lain, klaim dan konflik batas maritim yang bertumpang tindih dengan konflik atas sumber daya maritim. Sengketa perbatasan laut antara Cina dan lima negara ASEAN atas di LCS (Laut Cina Selatan) adalah contoh kasus keamanan maritim dalam perspektif keamanan nasional. Di permukaan, lima negara itu negara berseteru mengenai berapa mil laut territorial harus ditetapkan di zona dengan klaim tumpang tindih. Di bawah permukaan laut, kandungan sumber daya perikanan, minyak bumi dan gas alam yang begitu besar membuat mereka sulit menyepakati batas territorial di LCS.

Dalam perspektif keamanan nasional, keamanan maritim juga bisa dilihat sebagai keamanan jalur pelayaran, perlombaan senjata

dan kemungkinan konflik militer di zona maritim. Konflik LCS selatan mengungkap dimensi lain keamanan maritim yakni keamanan jalur pelayaran dan perdagangan melalui kawasan tersebut. Satu komoditas penting yang dipasok lewat LCS adalah minyak dan gas. Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang bergantung pada suplai energi melewati jalur ini. Konflik maupun ancaman keamanan lain di LCS akan mengganggu pasokan energi yang sangat dibutuhkan industrialisasi dan pembangunan ekonomi negara-negara kawasan. Dalam ekonomi global yang saling bergantung, krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Timur akibat gangguan pasokan energi dapat mendestabilisasi ekonomi dan pasar global.

Dimensi lain adalah modernisasi dan pengembangan kekuatan angkatan laut. Konflik batas maritim di LCS berhubungan dengan kebutuhan energi, pengamanan jalur energi dan modernisasi kekuatan angkatan laut. Pertumbuhan kebutuhan energi Cina membuat negara ini melakukan dua hal (1) modernisasi kekuatan angkatan laut dengan membangun kapal induk, membeli, membuat kapal perusak dan fregat baru. Pemilikan kapal induk mengubah postur AL Cina menjadi *blue water navy* yakni kekuatan angkatan laut yang mampu melakukan operasi lintas Samudera. Kapal induk memungkinkan Cina memproyeksi kekuatan operasi Angkatan Laut jauh dari perairan nasional untuk menjangkau samudera Hindia. (2) Mengembangkan strategi 'lingkungan keamanan yang diperluas' dengan membeli atau menyewa rantai pelabuhan mulai dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara dan bagian Selatan Cina. Pelabuhan-pelabuhan ini dapat disandari tanker, kapal dagang maupun kapal AL Cina.

Dalam masa perang, angkatan laut Cina dapat menggunakan pelabuhan-pelabuhan ini untuk mendukung operasi kapal.

4.4. Keamanan Maritim dalam Perspektif Non-tradisional

Keamanan non-tradisional adalah sebuah kategori luas untuk mengelompokkan berbagai ancaman keamanan baru terhadap hidup manusia atau obyek lain. Ancaman bersifat non-militer, melibatkan aktor non-negara, sumbernya tidak berasal dari satu lokasi geografis, beroperasi lintas batas negara dengan menggunakan banyak jalur dan metode.

4.5. Keamanan Maritim sebagai Keamanan Ekonomi

Dalam zona maritim, keamanan ekonomi mencakup penyelundupan barang, hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang dan keterbatasan sarana patroli membuat pemerintah kesulitan mencegah penyelundupan. Kepulauan Riau adalah salah satu area dengan tingkat penyelundupan yang tinggi. Laporan Kantor Bea Cukai Riau mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, negara mengalami kerugian paling sedikit Rp 268,5 Miliar. Kantor ini menyita barang senilai Rp 423,12 Miliar dalam 422 operasi penindakan. (Putra 2020).

Dalam kerangka ekonomi, keamanan maritim juga berhubungan dengan keamanan lingkungan dan ekosistem laut. Pencemaran akibat kecelakaan kapal dan aktivitas daratan mengancam sumber daya ekologis maritim. Selat Malaka adalah salah satu jalur dengan tingkat pencemaran minyak yang tinggi. Tumpahan minyak dan sampah kapal menjadi ancaman bagi

kelestarian lingkungan maritim. Sumber daya perikanan mengalami penipisan karena kerusakan ekosistem maritim.

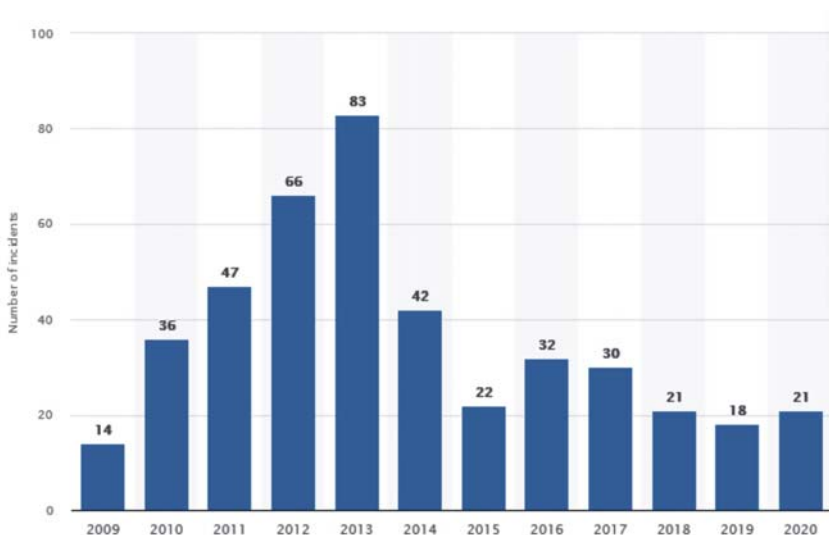
Sampah yang berasal dari darat juga telah meningkatkan beban lingkungan maritim. Sampah dan zat pencemar dibawa oleh aliran sungai atau hujan. Sebagiannya ada yang sengaja dibuang ke laut. Teluk Jakarta adalah satu zona maritim yang paling tercemar. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset Nasional tahun 2021 menemukan pencemaran Teluk Jakarta oleh buangan Paracetamol. Pengukuran menunjukkan bahwa kandungan paracetamol di Muara Sungai Angke adalah 610 Nanograms/ liter. Sedangkan di Muara Sungai Ciliwung sebesar 420/liter. (Liputan 6 2021).

Sampah plastik adalah ancaman lain terhadap keberlanjutan ekosistem maritim. Laporan Forum ekonomi dunia tahun 2020 memperkirakan volume sampah plastik yang mencemari laut mencapai 150 juta ton. Jumlahnya terus bertambah sebesar 8 juta ton per tahun. Sedangkan *International Coastal Cleanup* (ICC) melaporkan tahun 2019 bahwa dari 10 jenis sampah yang mencemari laut, 9 di antaranya adalah sampah peralatan plastik seperti bekas alat makan, botol dan kantong plastik. Setiap tahun, laut Indonesia dicemari kira-kira 480 ribu-1,29 juta ton sampah, termasuk sampah plastik (Administrator 2021). Mikroplastik menjadi ancaman bagi kesehatan ikan dan biota laut lainnya. Kehancuran yang membawa kerugian ekologis dan ekonomi yang sangat besar.

Ancaman keamanan ekonomi maritim lain adalah perompakan dan pembajakan kapal. Kejahatan maritim ini menjadi keprihatinan

masyarakat internasional. Salah satu temuan dari studi Axbar (2016) adalah adanya hubungan antara degradasi ekosistem maritim, kondisi perikanan dan frekuensi perompakan kapal. Penurunan hasil tangkapan nampaknya mendorong nelayan menjadi perompak. Sebaliknya, kondisi perikanan yang baik mengurangi angka perompakan sampai 40 %. Perairan Indonesia pernah menjadi salah satu zona dengan tingkat perompakan tinggi. Grafik 1 menunjukkan bahwa perompakan meningkat dari 14 kasus (2009), menjadi 83 kasus (2013), lalu menurun menjadi 18 kasus (2019).

Grafik: Jumlah Kasus Perompakan di Perairan Indonesia



Sumber: <https://www.statista.com/statistics/985256/indonesia-actual-piracy-incidents/>

Dari total perompakan di seluruh dunia tahun 2008-2018, sebanyak 11,72 % terjadi di Indonesia (Ale 2020). Selat Malaka dan perairan kepulauan Riau menjadi salah zona favorit perompak. Selat ini menarik pelaku kejahatan karena posisinya

sebagai jalur perdagangan penting. Kapal-kapal dengan muatan bernilai tinggi, seperti minyak, gas alam, batubara dan komoditas lainnya, melewati selat ini. Selain itu, pulau-pulau kecil dan teluk di sekitar kepulauan Riau menjadi tempat ideal bagi persembunyian dan sebagai pangkalan operasi kelompok-kelompok perompak. Kejahatan perompakan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, selain membahayakan nyawa manusia. Dari kasus tunggal saja seperti perompakan tanker Joaquim pada 8 Agustus 2015, kerugian yang ditimbulkan sebesar RM 2,8 juta (Agriesta 2015). Pusat kajian Chatam House yang berbasis di Inggris memperkirakan bahwa perompakan yang terjadi di perairan Somalia saja menimbulkan kerugian sebesar US\$ 12 Miliar atau sekitar Rp 180 Triliun setiap tahun. (BBC 2011). Kerugian ini muncul dari perubahan jalur yang makin panjang, biaya asuransi yang makin besar, barang dan muatan yang dirampas perompak.

Penangkapan ikan secara illegal adalah masalah lain dalam keamanan maritim Indonesia. Sebagai negara dengan sumber perikanan kaya, laut Indonesia telah menjadi tujuan pencurian ikan. Ada tiga pola pencurian ikan yakni: (1) *Illegal fishing* (penangkapan ikan secara illegal) mencakup penangkapan oleh kapal nasional atau kapal asing di perairan yurisdiksi sebuah negara. Kegiatan ini dilakukan tanpa izin negara tersebut atau bertentangan dengan undang-undang. (2) *Unreported fishing* yakni penangkapan yang tidak dilaporkan, atau keliru dilaporkan kepada otoritas nasional yang relevan, atau laporan itu bertentangan dengan undang-undang; (3) *Unregulated fishing* yakni penangkapan di zona perikanan yang dikelola oleh organisasi regional, oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh

kapal dari negara bukan anggota, atau entitas perikanan tertentu. Penangkapan ini bertentangan dengan kebijakan manajemen dan konservasi organisasi regional tersebut.

Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa antara tahun 2005-2020 sebanyak 1059 kapal ditangkap karena melakukan penangkapan illegal di perairan Indonesia (Muhamad 2012). Sepanjang tahun 2021, Jumlah kapal yang ditangkap adalah 130 buah. Sebanyak 84 buah kapal Indonesia ditangkap karena melanggar undang-undang perikanan. Sedangkan 46 kapal asing ditahan karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Negara asal kapal paling banyak adalah Vietnam sebanyak 25 kapal, disusul Malaysia 15 kapal dan Philipina 6 kapal. Jika kapal yang tidak berhasil ditangkap dihitung, jumlahnya akan jauh lebih besar. Kapal-kapal ini berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Philipina, Myanmar dan RRC.

Pada tahun 2020, kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat tiga tipe penangkapan ikan illegal di atas mencapai Rp 56,13 Triliun per tahun (Kumparan 2020). Zona ekonomi eksklusif seputar perairan Natuna merupakan salah satu wilayah dengan frekuensi tinggi pencurian ikan Para nelayan asing, terutama nelayan Cina, sering memiliki peralatan yang lebih baik dan didukung oleh pemerintah mereka. Situasi ini memperberat kehidupan nelayan Indonesia di sekitar kepulauan Riau. Mereka makin sukar menangkap ikan karena kerusakan ekosistem pesisir. Untuk berlayar lebih jauh, mereka menghadapi keterbatasan peralatan tangkap dan harus berhadapan dengan nelayan negara lain.

4.6. Keamanan Maritim sebagai Keselamatan di Laut

Dalam kaitan dengan keselamatan di laut, keamanan maritim mencakup terorisme maritim, kecelakaan dan keamanan platform seperti instalasi pemboran minyak dan gas. Resolusi PBB Nomor 49/60/1994 mendefinisikan terorisme sebagai “tindakan yang bertujuan membangkitkan ketakutan publik, ketakutan sekelompok orang atau seseorang demi tujuan politik, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, apa pun pertimbangan politik, filosofis, ideologis, rasial, etnis, religious atau alasan lain yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut” (UNODC 2018). Satu ciri penting dari terorisme modern adalah sifatnya yang transnasional dalam aspek organisasi dan operasi. Kesadaran bahwa terorisme moderen mampu menjangkau target lintas negara berkembang pasca serangan al-Qaeda di AS tahun 2001.

Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) mendefinisikan terorisme maritim sebagai “pelaksanaan tindakan dan aktivitas teroris di lingkungan maritim, menggunakan kapal atau terhadap kapal dan terhadap bangunan statis di laut, di pelabuhan, termasuk serangan terhadap penumpang atau personel, terhadap fasilitas atau pemukiman pantai, termasuk resor turis, wilayah pelabuhan dan kota pelabuhan”. (Singh 2019). Terorisme maritim merupakan isu yang tumpang tindih karena sifatnya yang politis. Sementara targetnya seringkali adalah obyek sipil, terorisme memiliki target-target politis. Serangan dilakukan terhadap kapal pengangkut sipil, tetapi tujuannya adalah mengendalikan kebijakan pemerintah nasional atau menghancurkan fondasi ekonomi negara. Karena itu, jenis kejahatan ini bisa didekati dari perspektif keamanan tradisonal dan non-tradisional.

Perompakan dan pembajakan kapal yang dibahas sebelumnya dapat diberi muatan terorisme melalui radikalisasi pembajakan. Hal ini terjadi ketika kapal-kapal digunakan untuk menyerang pelabuhan atau kota pelabuhan. Singapura misalnya sangat mencemaskan pembajakan kapal di selat Malaka mengingat posisinya yang berada di pinggir jalur penting ini. Selain itu, kedalaman beberapa bagian Selat Malaka hanya mencapai 25 meter. Kelompok teroris dapat membajak kapal dan menenggelamkannya di zona dangkal sehingga menghambat pelayaran di selat tersebut.

Kecemasan akan terjadinya terorisme maritim dipicu oleh beberapa peristiwa yang sebenarnya mewakili tipologi serangan terorisme di dan melalui laut. Pertama, peristiwa di mana laut dijadikan jalur teroris untuk menyerang sasaran di darat. Tipe ini misalnya serangan Mumbai di India tahun 2008. Dalam peristiwa ini, kelompok teroris berbasis di Pakistan melakukan serangan lewat laut dan menewaskan 166 orang (Singh, 2019). Pihak intelijen India menemukan bahwa kelompok-kelompok teroris juga menargetkan fasilitas-pantai melalui aksi *Samundari Jihad* (Jihad lewat laut). Kedua, pembajakan alat angkut laut dan penyanderaan oleh teroris. Model ini umumnya terjadi di wilayah konflik. Contohnya adalah pembajakan kapal oleh kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu. Ketiga, kejadian serangan terhadap pelabuhan, fasilitas dan instalasi pantai. Serangan terhadap pelabuhan minyak Ras Lanuf dan Es Sider di Libya tahun 2018 adalah salah satu kasus. Keempat, serangan terhadap kapal perang atau sipil. Misalnya serangan terhadap kapal perang UUS Cole di Yaman tahun 2000 yang menewaskan

17 prajurit dan serangan terhadap kapal tanker Perancis, M/V Limburg tahun 2002 di Teluk Aden (Singh, 2019).

Kecelakaan kapal dan transportasi laut adalah ancaman keamanan maritim yang perlu mendapat perhatian. Selain menimbulkan korban manusia, kapal bertabrakan atau tenggelam menimbulkan rantai ketidakamanan terhadap ekosistem dan ekonomi pesisir. Frekuensi kecelakaan laut di Indonesia masih cukup tinggi meskipun pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menguranginya. Laporan Komisi Nasional Untuk Keselamatan Transportasi (KNKT) menunjukkan bahwa kecelakaan laut naik dari 7 kasus (2014), menjadi 24 kasus (2017), menurun menjadi 20 kasus (2018) (Muhibat 2020). Dalam banyak kasus, kecelakaan laut umumnya disebabkan oleh empat faktor. Pertama, ketidaklayakan alat angkut baik karena usia tua atau sebab lain. Kedua, keteledoran manusia dalam bentuk ketidakcakapan awak dan pengemudi. Ketiga, ketidaktegasan otoritas yang mengatur pelayaran dan angkutan. Kapak-kapak yang tidak layak dibiarkan untuk memuat barang dan orang melebihi kapasitas. Keempat, sebab alam seperti cuaca buruk dan badai. Kadang-kadang kecelakaan terjadi karena gabungan dari empat sebab di atas.

Tabrakan antar kapal merupakan ancaman lain dalam keselamatan maritim. Selat Malaka adalah jalur di mana cukup sering terjadi tabrakan kapal. Selain dampak ekonomi, kecelakaan kapal menimbulkan kerugian ekologis. Sejak tahun 1970, telah terjadi kecelakaan kapal yang menumpahkan minyak ke selat ini. Pada tahun 1993, kecelakaan Tanker Maersk

Navigator menumpahkan 290.00 Ton minyak. Setahun sebelumnya, tabrakan antara *Nagasaki Spirit* dan *Ocean Blessing* menyebarkan 100 ton minyak. (Portonews 2017). Pada bulan Januari 2017, sebanyak 300 ton minyak mencemarkan selat Malaka akibat tabrakan kapal tanker *Wan Hai 301* dan *APL Denver*. Keterlambatan penanganan menyebabkan tumpahan menyebar ke Pulau Ubin, Pulau Batam, dan Pulau Nenas, Kepulauan Riau. Tumpahan minyak berulang merusak ekosistem dan menurunkan jumlah tangkapan ikan di selat Malaka dan perairan sekitarnya.

4.7. Keamanan Maritim Sebagai Keamanan Insani

Dari perspektif *Human Security* (keamanan insani), keamanan maritim mencakup lebih banyak isu seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata ringan, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Sejak lama, jalur laur menjadi jalan penyelundupan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kemajuan teknologi pemeriksaan di bandar udara menyukarkan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar. Sebaliknya garis pantai yang panjang, volume angkutan, frekuensi pelayaran yang tinggi dan keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil menjadi penyelundupan lewat laut sebagai pilihan utama para pedagang narkotika. Infografis di bawah ini memetakan jalur penyelundupan narkoba melalui laut. Pantai Sumatera dan Selat Malaka merupakan daerah operasi utama yang terkoneksi dengan Malaysia.

Infografis: Jalur Laut Penyelundupan Narkoba



Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read>

Laporan BNN (Badan Narkotika Nasional) mengungkapkan bahwa laut menjadi jalur penyelundupan bagi 90 % narkoba yang beredar di Indonesia. Pada bulan Juli 2020, misalnya, polisi menggagalkan penyelundupan 1,2 ton narkoba dari Timur Tengah. Pedagang narkotika menggunakan dua jalur berbeda yakni dari Samudera Hindia, Selat Malaka lalu ke Pantai Aceh Barat (Prireza 2021). Jalur lain melalui Laut Cina, Myanmar, Selat Malaka, Pantai Selatan Jawa lalu ke Jakarta. Sampai dengan tahun 2020, jalur laut tetap menjadi primadona. Penyelundupan melibatkan 92 jaringan sindikat, di mana 88 jaringan berhasil diungkap. Dari jumlah ini, BNN menemukan 14 jaringan internasional (Hartono 2020). Penyelundupan lewat laut menambah peredaran narkoba di Indonesia, yang mendorong konsumsi dan naiknya jumlah korban. Saat ini diperkirakan pemakai narkoba mencapai kira-kira, 3,8- 4 juta orang. Korban berasal dari berbagai kelas sosial dan kelompok usia.

Selain Narkoba, kejahatan lain adalah penyelundupan *small arms* (senjata ringan). Peredaran senjata genggam atau senjata ringan di Indonesia dipandang sebagai fenomena gunung es. Kasus-kasus yang terungkap mewakili hanya sejumlah kecil senjata ilegal yang berada di tangan masyarakat sipil. Beberapa perampokan berdarah dan serangan bersenjata oleh kelompok gerakan kemerdekaan mengindikasikan bahwa senjata ringan sangat mudah masuk ke Indonesia. Dulu kasus perampokan umumnya menggunakan senjata laras pendek seperti pistol FN, Colt dan revolver. Saat ini, perampokan menggunakan senjata laras panjang seperti AK-47, M-16, Remington Kal-22, Uzi dan M-58.

Sebagian kecil senjata diduga dirakit sendiri, tetapi lebih banyak dimasukkan secara ilegal lewat pelabuhan resmi atau tidak resmi di wilayah pesisir. Kelompok-kelompok separatis seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) memperoleh senjata dari luar Indonesia melalui jalur laur. Saat masih aktif, GAM memperoleh senjata dari Thailand Selatan. Pada puncak konflik Aceh, TNI AL mengawasi secara ketat lalu lintas kapal asing di Selat Malaka dan perairan Riau untuk mencegah penyelundupan senjata ke Aceh. Kelompok teroris di Poso diduga memperoleh senjata dari Philipina Selatan lewat laut. Sedangkan gerakan Papua Merdeka memperoleh senjata lewat Nabire melalui jalur laut dari Ambon.

Kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia) dan *people smuggling* (penyelundupan orang) juga terjadi di ruang maritim. Ada perbedaan antara dua tipe kejahatan ini. *UN*

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons mendefinisikan perdagangan orang sebagai “tindakan merekrut, transportasi, pemindahan, penampungan dan penerimaan orang dengan menggunakan kekerasan, penipuan dan pembohongan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan”. Korban umumnya ditipu dan kemudian dijadikan sebagai pekerja paksa, buruh dengan upah sangat rendah atau dieksploitasi secara seksual.

Aktivitas perdagangan orang memiliki perbedaan makna dengan penyelundupan orang. *UN Protocol against Smuggling* mendefinisikan *people smuggling* sebagai tindakan “memfasilitasi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam sebuah negara, demi tujuan keuntungan finansial atau keuntungan material lain”. Penyelundupan melibatkan persetujuan korban. Biasanya korban membayar sejumlah uang agar dapat dimasukkan ke dalam teritori sebuah negara. Meskipun tindakan ini merupakan pelanggaran hak negara, penyelundup sering melanggar hak asasi korban seperti kekerasan fisik atau tidak diberi makanan dan minuman.

Perairan Indonesia menjadi jalur perdagangan orang dari Indonesia keluar dan sebaliknya. Sebagian korban perdagangan orang dari luar dan dalam negeri menjadi pekerja paksa di kapal ikan atau fasilitas perikanan lain. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa antara tahun 2014 dan 2018, jumlah pekerja Indonesia di sektor maritim yang menjadi korban trafficking adalah 4000 orang (Madina 2018). Nelayan asing juga menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia. Sepanjang tahun 2011-2015, nelayan

asing yang menjadi korban mencapai 1.718 orang. (International Organization of Migration 2016, 76). Mereka rata-rata berusia di antara 15-49 tahun dan berasal dari Myanmar, Kamboja, Thailand dan Laos. Pada saat yang sama, laut Indonesia menjadi jalur perantara penyelundupan orang dengan tujuan negara lain. Tujuan utama penyelundupan adalah Australia dan Selandia Baru. Rata-rata pencari suaka yang diselundupkan berasal dari Irak, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar dan Kamboja.

4.8 Media dan Masalah Keamanan Maritim

4.8.1 Media dan Proses Sekuritisasi Keamanan Maritim

Semua masalah publik di zona maritim dapat diterima sebagai masalah keamanan sejauh dilihat sebagai ancaman terhadap sesuatu yang lain. Media massa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran akan berbagai ancaman keamanan maritim di atas. Pada kasus tertentu, media cetak atau daring, media siaran di tingkat lokal atau nasional, dapat menjadi aktor keamanan yang mampu mengkonstruksi isu tertentu menjadi masalah keamanan.

Peran yang dapat dimainkan media dan wartawan adalah mempresentasikannya melalui berita sebagai masalah keamanan. Proses transformasi ini dikenal sebagai tindakan *securitization* (sekuritisasi) yakni tindakan aktor yang mengklaim bahwa ada ancaman di lingkungan yang kalau tidak segera ditangani akan menghancurkan obyek tertentu. (Buzan, Waever and Wilde 1997). Proses sekuritisasi melalui tiga tahap.

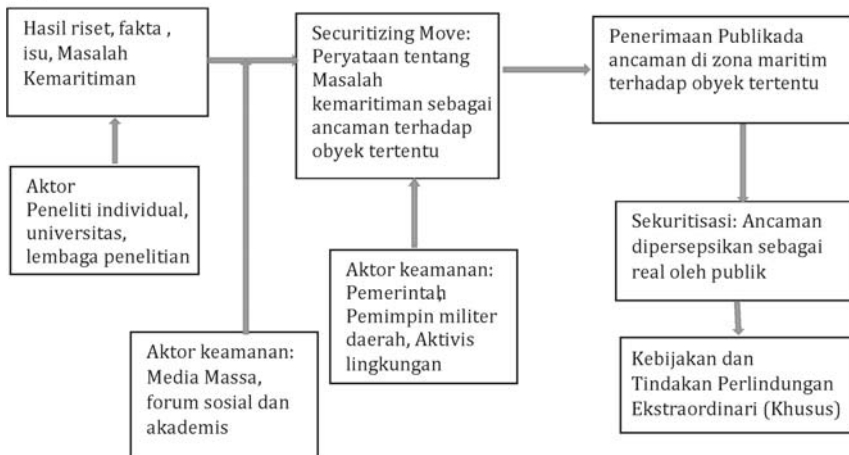
Pertama, aktor keamanan menunjuk dan memperingatkan bahwa ada fenomena yang mengancam keberadaan obyek tertentu. Obyek bisa berupa negara, lingkungan, kestabilan ekonomi, keberadaan kelompok masyarakat, kelestarian budaya tertentu, pekerjaan dan pendapatan masyarakat, stabilitas dan keamanan sosial atau obyek lain. Aktor bisa memiliki jabatan formal dan non-formal. Aktor formal mencakup pejabat, lembaga, militer di tingkat nasional, atau lokal. Aktor non-formal mencakup ilmuwan, kelompok ilmuwan, organisasi non-pemerintah, institusi akademis, perusahaan, media atau sekelompok media. Dinamika lingkungan bisa berupa perkembangan ekonomi, perubahan budaya, perubahan dan masalah sosial atau politik. Peringatan ini diformulasi sebagai situasi emergensi, yakni situasi yang kalau tidak direspon cepat akan sulit dikendalikan dampak destruktifnya terhadap keberadaan dan kehidupan berbagai obyek di atas.

Pada tahap kedua, klaim atau peringatan aktor akan adanya ancaman ini diterima publik sebagai benar-benar ada dan nyata. Peringatan ini diterima karena aktor menunjukkan gejala tertentu di lingkungan yang memiliki sifat destruktif atau menimbulkan kematian obyek tertentu. Bukti bahwa klaim aktor keamanan itu diterima ketika publik meresonansi apa yang diucapkan aktor, misalnya ketika sejumlah besar media massa memberitakan adanya ancaman tersebut. Pada tahap ketiga, penerimaan atau persetujuan publik memberikan legitimasi sosial dan politik bagi tindakan atau kebijakan *ekstraordinary* (luar biasa). Ini adalah jenis tindakan yang bersifat khusus untuk merespons atau mengendalikan ancaman tersebut. Tindakan khusus ini biasanya bersifat cepat, skala pengerahan sumber

daya memadai dan menabrak aturan main, prosedur regular dan demokratis.

Media dan pewarta memiliki posisi sentral dalam sekuritisasi yakni mengubah sebuah isu menjadi isu keamanan (Lihat bagan). Peran ini berbentuk upaya mempresentasikan isu-isu lokal yang mengancam masyarakat ke dalam agenda public. Mengapa peran media penting? Proses sekuritisasi seringkali didominasi oleh elit politik dan aktor kuat lain. Akibatnya yang disebut sebagai masalah keamanan dan menjadi prioritas kebijakan adalah tema-tema besar seperti keamanan nasional, kedaulatan wilayah maritim, keamanan perdagangan, keamanan investasi atau keberlanjutan industri turisme. Tema-tema besar ini mewakili prioritas elit dan kepentingan kelompok kuat.

Bagan: Media dan Sekuritisasi Keamanan Maritim



Sumber: Diadaptasi dari Nikolaus Loy.(2017)

Agenda yang merupakan kepentingan kelompok marjinal seringkali diabaikan dan dilupakan. Dalam beberapa kasus, tindakan ekstraordinari demi kepentingan keamanan nasional seringkali melanggar hak-hak rakyat kecil dan kelompok marjinal. Misalnya demi keamanan nasional, keamanan investasi atau pariwisata, pemerintah melarang nelayan memasuki zona maritim tertentu. Zona ini bisa berupa kawasan pantai, pulau-pulau kecil atau perairan di sekitarnya. Di balik jargon keamanan nasional tersembunyi kepentingan kelompok bisnis tertentu yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.

4.8.2. Media: Mengamankan yang 'Lupa' Diamankan

Tugas media yang paling penting adalah menghadirkan isu-isu maritim yang dilupakan oleh pembuat kebijakan. Isu-isu tersebut sering berkaitan dengan kelangsungan hidup nelayan, kelompok-kelompok masyarakat pesisir, kelompok rentan seperti kaum perempuan dan anak-anak yang hidupnya bergantung pada pantai dan laut. Kehidupan mereka perlu 'diamankan' dengan cara ancaman yang dihadapi diangkat ke permukaan sehingga menjadi bagian dari wacana publik dan proses pembuatan kebijakan.

Wacana keamanan perbatasan maritim, misalnya, didominasi oleh wacana pelanggaran perbatasan oleh angkatan laut atau nelayan negara lain. Isu kedaulatan nasional sangat dominan. Hal ini nampak jelas dalam kasus Natuna dan perairan di sekitarnya. Fokus berita adalah pelanggaran oleh Cina dan konflik sumber daya energi antara Cina dan Indonesia. Narasi tentang Natuna lalu dihubungkan dengan konflik atas kepulauan Spratly di LCS. Wacana tentang dampak konflik ini

pada kehidupan kelompok nelayan-nelayan lokal jarang mendapat perhatian. Pengabaian ini kemudian memunculkan usulan kebijakan yang tidak tepat, yakni usulan memindahkan nelayan dari daerah lain ke Natuna sebagai bagian dari strategi penguatan *real presence* (kehadiran nyata). Gagasannya adalah dengan menciptakan kesibukan di zona yang dipersengketakan, maka sebuah negara menunjukkan kehadiran dan kedaulatan nyata di zona maritime itu. Perairan Natuna dan kepulauan Riau bukan zona kosong. Wilayah itu sudah didiami dan menjadi medan aktivitas nelayan-nelayan lokal selama ratusan tahun.

Dalam kasus perompakan di selat Malaka, proses sekuritisasi terjadi dengan sangat efektif. Masalah ini diterima publik sebagai ancaman keamanan nasional dan keamanan internasional. Tindakan esktraordinari dilakukan dalam bentuk kerjasama patroli, pencegahan dan penindakan oleh Angkatan Laut Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jepang memberi bantuan teknis berupa sistem pengawasan. Perompakan dikonstruksi sebagai ancaman keamanan dan pelaku dibingkai sebagai kriminal. Media mereproduksi konstruksi ini.

Dari perspektif yang lebih luas, media sebenarnya bisa menempatkan masalah perompakan sebagai sebuah simptom perubahan sosial. Sebagian perompak memang berasal dari Philipina Selatan. Banyak di antara mereka berasal dari Batam dan Riau. Sangat mungkin ada hubungan antara perompakan dengan kerusakan ekosistem maritim, penurunan produksi perikanan dan perubahan sosial di pesisir selat Malaka dan segitiga pertumbuhan Singapura dan Riau, Johor. Perubahan ini menimbulkan pengangguran yang mendorong kejahatan

perompakan kapal. Dengan kata lain, ada korelasi antara ketidakamanan maritim dan ketidakamanan ekonomi kelompok-kelompok masyarakat pesisir yang terkena dampak modernisasi sosial ekonomi.

Media massa di kepulauan Riau perlu menggali kaitan antara kedua fenomena ini dan mempresentasikannya sebagai masalah keamanan. Kalau ditemukan bahwa para perompak adalah nelayan yang kehilangan pekerjaan, maka tindakan keamanan harus diperluas ke upaya meniadakan akar-akar sosial perompakan yakni pengangguran di kalangan nelayan. Upaya 'mengamankan' oleh media dapat bergerak lebih jauh yakni memberitahukan kepada publik efek kerusakan lingkungan maritim pada kesejahteraan kelompok-kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak.

Untuk mengamankan yang 'lupa' diamankan melalui pemberitaan, wartawan tidak dapat bekerja sendiri. Masalah keamanan merupakan isu yang sensitif dan menyangkut kepentingan aktor kuat. Media dan wartawan harus bekerja bersama-sama dengan membentuk jaringan kerja. Anggotanya bisa melibatkan wartawan, pemilik media, wakil pemerintah, angkatan laut, polisi, ilmuwan atau akademisi serta aktor lain yang relevan. Dasar argumennya adalah: Pertama, isu kemaritiman melibatkan relasi kuasa antar aktor dan kepentingan yang kompleks. Di satu sisi, ada aktor yang menghendaki agar agenda dan kepentingannya ditempatkan sebagai prioritas keamanan. Di sisi lain, ada aktor yang ingin mencegahnya menjadi isu keamanan. Aktor-aktor ini saling bersaing untuk mengendalikan media.

Kedua, proses sekuritisasi keamanan maritim adalah sebuah *collective action*. Makin banyak media dan aktor menerima bahwa sebuah isu adalah ancaman keamanan maritim, makin mudah isu itu diterima oleh publik. Efeknya adalah tindakan cepat bisa dilakukan oleh otoritas yang relevan. Tindakan bersama ini mencegah pembajakan informasi oleh aktor kuat yang membuat sekuritisasi justru menjadi instrumen politik untuk membungkam dan menindas.

Ketiga, sekuritisasi keamanan maritim membutuhkan hasil riset, pendapat ahli, informasi, data, fakta dan peristiwa untuk memberikan basis empiris bagi klaim keamanan. Informasi ini bisa diperoleh media melalui *investigative reporting*, atau melalui sumber kedua seperti kelompok ahli. Data atau informasi ini ada di mana-mana, dimiliki oleh individu, berada dilembaga formal atau formal, di tingkat lokal, propinsi atau nasional, di dalam atau di luar negeri. Jaringan kerja berfungsi sebagai 'radar' yang membantu wartawan menemukan informasi yang dibutuhkan.

Keempat, Jaringan kerja menjadi salah satu cara menjamin keselamatan pekerja pers. Kerja dalam jaringan akan menyeimbangkan relasi kuasa. Aktor-aktor yang memiliki kepentingan memahami bahwa ada dukungan organisasional ketika wartawan bekerja. Karena itu, sebuah komunitas wartawan kemaritiman perlu dibentuk di kepulauan Riau atau di wilayah lain. Komunitas ini bisa membangun kerjasama tidak hanya dengan media, individu atau lembaga di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Pada tingkat internasional, jaringan perlu dikembangkan dengan ilmuwan

dan lembaga di Singapura, Malaysia, Thailand serta organisasi internasional seperti IMO (*International Maritime Organization*) dan lembaga lainnya.

4.9. Penutup

Laut adalah masa lalu, masa kini dan masa depan Indonesia. Di masa lalu, laut membawa banyak suku bangsa dari berbagai belahan bumi. Mereka lalu membentuk komunitas-komunitas yang mendiami Nusantara. Nama ini menunjukkan pada sebuah nusa yang berada di antara laut, selat dan perairan. Berbagai suku tersebut pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang dan kemudian sepakat membentuk sebuah negara bangsa. Pada masa kini, laut menghubungkan berbagai pulau menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi sumber penghidupan, sarana pembangunan ekonomi dan menjadi alat tawar bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Di masa depan, sumber daya laut akan menjadi tulang punggung pembangunan dan kekuatan nasional. Keamanan maritim menjadi prasyarat penting bagi stabilitas nasional dan regional. Ketidakamanan maritim di tingkat lokal dan nasional mengancam stabilitas dan perdamaian regional dan global. Media dan pekerja pers, melalui pemberitaan, dapat mempresentasikan berbagai isu kemaritiman sebagai masalah keamanan. Dengan cara ini, sebuah isu dapat masuk ke dalam perhatian publik dan prioritas kebijakan. Isu-isu maritim marjinal yang dilupakan tetapi memiliki dampak penting dapat segera ditangani. Konflik dan destabilisasi dapat dicegah dan perdamaian regional dan global bisa terjamin. Para wartawan adalah bagian dari upaya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. 2021. *Selamatkan Laut dari Sampah Plastik*. 21 Februari. Diunduh 23 Maret 2021. <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/2539/>.
- Agriesta, Deri. 2015. Perompakan Kapal di Selat Malaka: Itulah Mengapa Kerjasama antar Negara Penting. 10 Agustus. Diunduh 29 Januari 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/>.
- Ale, Kalu Kingsley. 2020. "Piracy off The Coast of Indonesia: Potential Implications on." *Brawijaya Law Journal of Legal Studies* 7 (1): 1-26.
- Axbard, Sebastian. 2016. "Income Opportunities and Sea Piracy in Indonesia". *American Economic Journal: Applied Economics* 8 (2): 154-194.
- Baldwin, David A. 1997. "The Concept of Security." *Review of International Studies*, 23 (1). Diunduh 29 Agustus 2021. <http://www.jstor.org/stable/20097464>.
- BBC. 2011. *Bajak Laut Rugikan Perekonomian Dunia*. January 14. Diunduh 20 Maret 2021. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110113_worldpiracy.
- Bueger, Christian. 2015. "What is Maritime Security." *Marine Policy*. 159-164.
- Buzan, Barry, Ole Waever, and Jaap de Wilde. 1997. *Securitization: A New Framework for Analysis*. USA: Lynne Rienner Publishers Inc.
- Hartono, Sulistyو Pudo. 2020. *Press release akhir tahun 2020*. Biro Humas Protocol BNN. Diunduh 23 Pebruari 2021. <https://rumahcemara.or.id/wp-content/uploads/2021/06>.
- International Organization of Migration. 2016. *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia*. Jakarta: IOM-Misi Indonesia.
- Kumparan. 2020. *Kerugian Indonesia Karena Illegal Fishing Ccapai Rp 56 Triliun per Tahun*. Juni 8. Diunduh 8 Maret 2021. <https://kumparan.com/kumparanbisnis>.

- Liputan 6. 2021. Perairan Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol Seberapa Bahaya. Diunduh 8 Juli 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/467626>.
- Nikolaus Loy. 2017. "Sekuritisasi Sebagai Strategi Kampanye Publik Untuk Mendukung Pelestarian Terumbu Karang." Dalam Okto Irianto, Nova Vincentia Pati, Nikolaus Loy and Muhammad Rusdi, *Pengelolaan Taman Nasional Bunaken Sebagai Destinasi Wisata Laut Dunia*, hal.199-214. Manado: Universitas Sam Ratu Langie dan Kemenko Kemaritiman RI.
- Madina. 2018. *Edan, 4 Ribu Nelayan Indonesia Jadi Korban Human Trafficking*. Maret 27. Diunduh 6 Maret 2021. <https://www.suara.com/news/2018/03/27/213934/>.
- Muhamad, Simela Victor. 2012. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya." *Politica* 3 (1): 59-85.
- Muhibat, Shafiah F. 2020. *Maritime Safety in Indonesia: Mapping Challenges and Opportunities*. Monograph, Jakarta: CSIS.
- Portonews, 2017. Kecelakaan Kapal Di Selat Malaka Yang Menimbulkan Tumpahan Minyak. Diunduh 8 Agustus 2021. <https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/>.
- Prireza, Adam. 2021. *Polres Jakarta Pusat Buru Bandar Narkoba Pengemudi Mobil yang Tabrak Polisi*. November 23. Diunduh 29 November 2021. <https://metro.tempo.co/read/1531726/>.
- Putra, Dwi Aditya. 2020. *Bea Cukai Riau Gagalkan 422 Penyelundupan Potensi Kerugian Negara Rp 268,5 M*. Diunduh 20 Agustus 2021. <https://www.merdeka.com>.
- Singh, Abhijit. 2019. *Maritime Terrorism in Asia: An assessment*. Occasional Paper, Observer Research Foundation. Diunduh 28 Juli 2021. <https://www.orfonline.org>.
- UNODC. 2018. *Defining terrorism*. July 3. Diunduh 6 Agustus 2021. <https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-4/key-issues/defining>.
- Wolfers, Arnold. 1952. "'National Security As an Ambiguous Symbol". *Political Science Quarterly* 67.

BAB V

JURNALISME DATA

Agung Prabowo¹

Jurnalisme data menjadi trend pada dekade ke-2 abad 21 ini. Trend ini tidak terlepas dari revolusi teknologi media yang semakin simpel dan terintegrasi. Sebelumnya media tidak fleksibel untuk digunakan secara mobile. Masyarakat perlu menyediakan waktu khusus untuk mengkonsumsi informasi di media. Sekarang format media sangat fleksibel, sehingga bisa dikonsumsi di sela-sela aktivitas masyarakat. Perkembangan teknologi ini yang menjadikan perkembangan jurnalisme data semakin cepat.

Jejak jurnalisme data sebenarnya bukan fenomena baru. Pada tahun 1821 *The Guardian*, yang saat itu bernama *Manchester Guardian*, menerbitkan untuk pertama kalinya sebuah tabel data tentang jumlah murid yang bersekolah di dua kota di Inggris serta pengeluaran rata-rata per tahunnya. Data tersebut terbukti menjadi informasi yang berguna dalam memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan sistem pendidikan di negara tersebut. Hal yang sama dilakukan Florence Nightingale pada tahun 1858 dengan laporannya yang berjudul *Mortality of the British Army*. Florence

1 Dr. Agung Prabowo, SP, M.Si Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta dan Penguji Uji Kompetensi Wartawan di Lembaga Penguji Wartawan Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta

memvisualisasikan data menggunakan grafik, diagram dan tabel data. Sementara sejarah jurnalisme data yang paling terkenal adalah Coxcomb yang menunjukkan bahwa sebagian besar kematian tentara disebabkan oleh penyakit yang dapat diobati daripada mati tertembus peluru.

5.1. Mendefinisikan Jurnalisme Data

Saat ini istilah jurnalisme data masih simpang siur, bahkan di kalangan jurnalis sendiri. Beberapa jurnalis berpendapat bahwa jurnalisme data tidak dapat didefinisikan sebagai jurnalisme. Sementara yang lain mengklaim sebagai awal era baru dalam jurnalisme. Ada berbagai definisi dan istilah untuk mendeskripsikan jurnalisme data. Ada yang mengistilahkan jurnalisme data, jurnalisme berbasis data; jurnalisme komputasi; ada yang menyebutnya visualisasi data. Simon Rogers, editor data di The Guardian, mendefinisikan jurnalisme data sebagai berbagai gaya dari visualisasi hingga artikel. Kesamaan utama dari berbagai istilah tersebut adalah bahwa semua didasarkan pada angka dan statistik - dan harus bertujuan untuk mendapatkan cerita dari sebuah peristiwa. Lorenz pada acara *Data-driven journalism: What is there to learn* pada tahun 2010 mendeskripsikan jurnalisme data sebagai alur kerja, dimana data menjadi dasar analisis, visualisasi dan -yang paling penting- penceritaan. Selain itu, Hamilton dan Turner menggunakan istilah jurnalisme komputasi untuk merujuk pada jenis jurnalisme yang menggabungkan algoritma, data, dan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial untuk membuat jurnalisme lebih akuntabel.

Definisi yang komprehensif diungkapkan oleh Veglis dan Bratsas dengan menggabungkan semua elemen yang termasuk dalam jurnalisme data. Jurnalisme data mereka mendefinisikan sebagai proses penggalian informasi yang berguna dari data, penulisan artikel berdasarkan informasi dan visualisasi *embedding* (berinteraksi dalam beberapa kasus) dalam artikel yang membantu pembaca memahami pentingnya cerita atau memungkinkan mereka untuk menunjukkan data yang berhubungan.

5.2. Apa itu Data?

Mengenai definisi data, Alberto Cairo dalam bukunya *The functional art* menjelaskan istilah menempatkannya dalam alur proses dari menceritakan realitas kepada orang-orang. Berdasarkan hal tersebut, data merupakan pengkodean tingkat pertama peneliti (jurnalis) dalam menganalisis dan mengamati informasi yang tidak terstruktur (fakta-realitas). Kemudian jurnalis sebagai komunikator mengeksplorasi data untuk membuat cerita yang berpengaruh (mengggunakan teks atau grafik) untuk publik dengan mengubahnya menjadi informasi terstruktur. Pendekatan lain untuk mendefinisikan 'data' adalah yang digunakan oleh Lesage dan Hackett dalam artikel penelitian mereka 'Antara objektivitas dan keterbukaan-Medialitas jurnalisme data' yang merujuk definisi Oxford English Dictionary. Kamus menawarkan dua aspek istilah: 1) Item terkait dari informasi (terutama numerik) yang dipertimbangkan secara kolektif, biasanya diperoleh dengan karya ilmiah dan digunakan untuk referensi, analisis, atau perhitungan. 2) Komputasi. Kuantitas, karakter, atau simbol

dimana operasi dilakukan oleh komputer, dipertimbangkan secara kolektif, juga (dalam konteks non-teknis): informasi dalam bentuk digital. Menurut Lesage dan Hackett kedua penafsiran data digunakan oleh wartawan, karena ada banyak contoh penelitian ilmiah yang menjadi sumber cerita, serta ada cerita yang didasarkan pada analisis komputasi data tertentu.

5.3. Nilai (Value) Jurnalisme Data

Nilai jurnalisme data dapat dibandingkan dengan nilai jurnalisme tradisional, seperti yang didefinisikan oleh Rosen sebagai solusi dari ‘masalah skala’. Kebutuhan akan informasi tentang peristiwa yang terjadi di seluruh dunia secara *real time* telah dipenuhi oleh para jurnalis yang menginformasikan kepada publik. Selain itu, masalah skala mencakup, selain jarak, masalah lain seperti informasi dan fakta rumit tentang politik dan ekonomi, yang penting untuk diketahui warga tetapi sulit dipahami. Sekali lagi, jurnalis memiliki peran untuk mempublikasikan semua informasi ini dengan cara yang sederhana.

Data yang tersedia di internet dapat menghasilkan kebingungan dan disorientasi yang serupa. Orang tidak dididik untuk bekerja dengan data dan memahaminya atau setidaknya memilih apa yang mungkin penting dari sejumlah besar kumpulan data yang tersedia saat ini. Akibatnya, jurnalis data dapat mengambil peran sebagai ‘perantara’ antara data dan audiens dengan mengubah kumpulan data yang kompleks menjadi cerita yang mudah dibaca dan bermakna bagi audiens. Menurut Simon Rogers, ini adalah peran baru bagi jurnalis dan berperan sebagai jembatan dan pemandu antara penguasa

yang memiliki data (tidak mampu memahami dan mengomunikasikannya) dan publik yang sangat ingin memahami data dan mengaksesnya tapi membutuhkan bantuan.

Seluruh proses menemukan cara untuk bekerja dengan data dan mampu menyajikannya dengan sebuah cerita yang dapat berhubungan dengan publik menambah nilai jurnalisme dalam berbagai aspek, salah satunya adalah adopsi peran baru bagi jurnalis sebagai sense-makers. Apalagi saat ini, bahwa perubahan sosial yang sedang berlangsung menuju melimpahnya informasi, orang menjadi bingung dan tidak dapat memproses semua data yang tersedia. Aspek lain adalah bahwa jurnalis dapat mengembangkan peran sosial baru dengan menyediakan data yang telah dipilih dan dibersihkan dengan cermat kepada publik, beralih dari praktik pelaporan berita yang didorong oleh tenggat waktu menjadi praktik pelaporan dan pengorganisasian sosial yang lebih terpadu. Ini dapat menciptakan lingkungan baru di mana audiens dapat berkolaborasi dengan jurnalis dan berinteraksi satu sama lain dengan memanfaatkan kemungkinan yang ditawarkan teknologi digital. Dengan demikian, jurnalisme data juga dapat mewakili aspek baru jurnalisme karena menyediakan visualisasi interaktif kepada pembaca yang memungkinkan mereka menjelajahi dan terlibat dengan data.

Selain menciptakan peran baru bagi jurnalis, jurnalisme data dapat meningkatkan dan mendukung peran pengawas jurnalisme. Banyak jurnalis menganggapnya sebagai bentuk jurnalisme akuntabilitas dimana investigasi bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas nama

kepentingan publik. Ini bisa menjadi solusi untuk situasi saat ini di lapangan. Media tradisional tidak lagi dipercaya dan tidak mampu bersaing dengan pesatnya perkembangan dan popularitas media sosial. Namun, jurnalisme data memanfaatkan teknologi saat ini untuk menemukan dan mempublikasikan kumpulan data dan laporan sedemikian rupa sehingga publik dapat mengontrol mereka yang berkuasa. Literatur menggarisbawahi bahwa munculnya media sosial dan tren umum menuju layar ponsel menimbulkan tantangan bagi jurnalisme tradisional. Sebagai cara untuk menjadi lebih inovatif dan mengatasi perubahan dalam pengumpulan, penyaringan, dan penyajian data dan seluruh datafikasi organisasi berita masyarakat yang bermaksud memasukkan jurnalisme data dalam praktik mereka. Meskipun demikian, data bukanlah sesuatu yang baru bagi jurnalisme. Perbedaannya kini dapat dilacak pada digitalisasi informasi yang memerlukan pergeseran ke pendekatan yang lebih teknis dan komputasional dari para jurnalis. Dengan demikian, data - apakah 'besar' dalam arti terlalu kompleks untuk perangkat lunak manajemen basis data tradisional, atau sekadar 'besar' dalam impornya yang berpotensi transformatif- telah mengambil relevansi khusus untuk berita. Sebuah laporan mencatat, bukan apakah data, komputer, dan algoritma dapat digunakan oleh jurnalis untuk kepentingan publik, melainkan bagaimana, kapan, di mana, mengapa, dan oleh siapa. Namun, istilah akuntabilitas juga mengacu pada tanggung jawab jurnalis kepada publik. Jadi, dengan cara ini, akuntabilitas berarti lebih banyak keterbukaan dari para jurnalis dalam mempublikasikan data mentah yang mereka gunakan untuk cerita mereka.

Dalam pengertian ini, jurnalisme data dapat dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dalam proses jurnalistik, karena audiens dapat memeriksa kumpulan data sebagaimana adanya, sebelum disempurnakan atau diproses untuk memiliki cerita. Selain itu, aspek lain dari transparansi dalam proses jurnalisme data adalah visualisasi data. Menerbitkan representasi visual dari data mentah, terutama jika bersifat interaktif, memberikan kesempatan kepada publik untuk mengeksplorasi dan terlibat dengan informasi yang mereka butuhkan. Transparansi berpotensi berarti bagi jurnalisme bahwa ia dapat memperoleh kembali kepercayaan publik yang telah terancam selama beberapa tahun terakhir.

5.4. Tantangan Jurnalisme Data

Seperti yang telah disebutkan, jurnalisme data mulai masuk ke banyak ruang redaksi yang ingin mengikuti perubahan teknologi dan perubahan masyarakat itu sendiri, serta membawa nilai baru bagi jurnalisme meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.

Pertama-tama, salah satu masalah utama adalah data yang diterbitkan oleh pemerintah, badan dan organisasi pemerintah lainnya. Banyak dari kumpulan data tersebut tidak segera diterbitkan sehingga para jurnalis dapat menggunakannya untuk sebuah berita. Misalnya, ketika seorang jurnalis memulai penyelidikan, data yang tersedia biasanya data usang, yang tidak memiliki nilai dalam arti jurnalistik.

Hal ini juga terjadi di AS, dimana wartawan harus berurusan dengan birokrasi merasa kebingungan. Di tingkat lokal, lebih sulit lagi untuk menemukan data terbuka sehingga wartawan

harus mencari sendiri untuk mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan atau menggunakan Kebebasan Informasi untuk mendapatkannya dari pemerintah daerah. Seperti yang disebutkan Jonathan Stoneman dalam makalahnya Apakah Data Terbuka membutuhkan Jurnalisme?) situasi di Inggris sama: Relatif sedikit data yang diperbarui secara waktu nyata, dan bahkan lebih sedikit kumpulan data yang mencakup arus utama konten cerita – uang, suara, dan data yang digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusannya. Selebihnya, jurnalis di Inggris masih cenderung meminta data yang mereka butuhkan, dengan menggunakan Freedom of Information. Selain itu, masih ada negara-negara yang tidak memiliki Undang-Undang Kebebasan Informasi yang sangat kuat yang mempersulit jurnalis data untuk mendapatkan akses ke data, seperti misalnya Spanyol, Italia, Argentina, dan Afrika. Secara umum, kadang-kadang bisa menjadi tantangan bagi jurnalis untuk mengakses data pemerintah dan hubungan mereka dengan badan pemerintah cukup tegang

Isu penting lainnya terkait data terbuka adalah fakta bahwa sebagian besar data memerlukan pembersihan atau penyesuaian lebih lanjut oleh jurnalis. Penyempurnaan data adalah proses yang bisa memakan banyak waktu untuk dilakukan dengan benar, yang merupakan kerugian di bidang jurnalistik. Dengan demikian, kendala lain bagi jurnalisme data adalah tenggat waktu dan tekanan waktu, dalam hal berita. Terlebih lagi, karena sebagian besar organisasi memiliki anggaran rendah, mereka tidak berinvestasi dalam proyek jurnalisme data, terutama media berita lokal yang memiliki sumber daya lebih sedikit. Ini menciptakan kesenjangan besar

antara media lokal kecil dan organisasi berita besar, yang mampu mengembangkan jurnalisme data lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pendapatan iklan dari jurnalisme data dan seringkali cerita-cerita ini tidak cukup sukses sebagai halaman depan atau berdampak signifikan terhadap jurnalisme.

Mengenai jurnalis itu sendiri, meskipun ada peningkatan permintaan orang-orang yang memiliki kemampuan komputasi dan analitis karena ketersediaan data yang besar, sektor ini masih kekurangan kemampuan tersebut. Banyak sekolah dan universitas jurnalistik yang belum sepenuhnya mengintegrasikan jurnalisme data ke dalam kurikulum mereka. Selain itu, ada skeptisisme umum tentang jurnalisme data dari pendukung jurnalisme tradisional dan nilainya bagi jurnalisme, sehingga cukup menantang bagi ruang redaksi untuk mempertahankan tim data terintegrasi yang membutuhkan programmer dan jurnalis.

Literatur menunjukkan bahwa ada konflik yang diamati antara prinsip-prinsip tradisional dan praktik jurnalisme dan perkembangan teknologi. Ada juga kebingungan mengenai hierarki prioritas dalam praktik jurnalisme. Lebih khusus lagi, akankah teknologi dan budaya data memaksakan prinsip-prinsip mereka dalam jurnalisme atau akankah nilai-nilai jurnalistik menang dan dengan demikian akankah jurnalis menggunakan data untuk meningkatkan proses jurnalistik? Isu lain adalah interaktivitas, karena dapat digunakan sebagai alat yang memungkinkan pembaca terlibat dengan cerita tetapi di sisi lain menghilangkan peran jurnalis tradisional sebagai pendongeng. Berdasarkan literatur menunjukkan bahwa sering

kali elemen interaktif digunakan untuk menarik pembaca dan memiliki fungsi penjelas. Selain itu, juga dapat menjadi tantangan bagi jurnalis, untuk menemukan tempat mereka di lingkungan baru, di mana banyak informasi terbuka dan tersedia bagi semua orang untuk menemukannya. Dengan demikian, pergerakan data terbuka tidak terfokus pada jurnalis sebagai pengguna akhir data. Selain itu, jurnalis data harus menghadapi ketidakpercayaan audiens terhadap media yang meningkat beberapa tahun terakhir dan mereka harus bekerja lebih keras untuk mendapatkannya kembali.

Menurut laporan *Bias, Bullshit and Lies: Audience Perspectives on Low Trust in the Media* yang diterbitkan oleh Institut Reuters untuk Studi Jurnalisme di Universitas Oxford meskipun faktanya orang cenderung lebih sering mendapatkan informasi dari media sosial, mereka tampaknya menganggap media berita profesional bertanggung jawab atas kepercayaan yang rendah. Jurnalisme data dapat mengubah persepsi orang tentang jurnalisme, karena orang dapat berpartisipasi dalam proses jurnalistik, misalnya dengan praktik seperti crowdsourcing, yang memiliki fungsi ganda menawarkan kepada pembaca peran peserta aktif dalam wacana media dan, pada saat yang sama, memungkinkan mereka untuk memantau posisi mereka sendiri dalam lanskap opini publik yang divisualisasikan.

Jurnalisme data, di antara semua ini, juga harus menghadapi kritik karena dapat dianggap sebagai jenis jurnalisme elit, terlepas dari kenyataan bahwa itu tergantung pada lingkungan yang lebih terbuka dan demokratis, karena hanya mengacu pada orang-orang dengan akses internet dan pengetahuan

dasar. analisis data dan visualisasi (Felle et al. 2015). Terakhir, masih ada kendala teknis untuk jurnalisme data dengan Sistem Manajemen Konten saat ini, seperti yang diklaim Mirko Lorenz dalam sebuah wawancara untuk Pusat Jurnalisme Eropa pada tahun 2010, berorientasi pada halaman dan mereka membantu Anda menyusun artikel. Tapi mereka sangat mengabaikan data dalam teks.

5.5. Bagaimana Masa Depan Jurnalisme Data ?

Terlepas dari kesulitan yang harus dihadapi jurnalisme data, masa depannya tampaknya cukup menjanjikan karena semakin banyak institusi, pemerintah, dan warga yang tertarik pada data terbuka. Dalam waktu dekat diharapkan media berita akan menjadikan jurnalisme data sebagai pilihan utama untuk pelaporan dan jurnalis akan bekerja dalam analisis dan visualisasi data untuk membuat berita. Selain itu, lebih banyak alat akan muncul yang akan membuat proses analisis data lebih mudah bagi para jurnalis, sementara pada saat yang sama jurnalisme data akan menjadi sektor yang murah dan efisien bagi organisasi berita. Akan banyak pemain yang memasuki wilayah jurnalisme data selain organisasi berita, seperti misalnya LSM dan penerbit independen, yang mungkin akan menawarkan layanan data tetapi tidak dalam arti jurnalistik. Secara umum, sangat mungkin bagi badan-badan ini untuk bersimbiosis dengan organisasi berita, dengan menawarkan layanan mereka kepada jurnalis dan yang terakhir menyediakan berita berbasis data.

Pertama, media berita akan memanfaatkan sepenuhnya data dan menjadikannya sebagai aset, dengan menjadi penyedia

dataset dan API berbayar. Kedua, diperkirakan bahwa alat baru akan tersedia sehingga membuat proses analisis dan penyajian data menjadi lebih mudah, bahkan memungkinkan jurnalis yang tidak memiliki keterampilan yang diperoleh untuk membuat berita berbasis data. Alat-alat ini akan ditawarkan oleh perusahaan besar, seperti Google dan Amazon, atau peretas, mahasiswa, dll. Selain alat, diperkirakan aplikasi berita untuk ponsel pintar, tablet, dan laptop akan muncul untuk mendukung berita multimedia, serta proyek berbasis data. Selain itu, perangkat mungkin juga digunakan untuk mengumpulkan data daripada hanya menampilkannya. Asumsi lain untuk masa depan adalah pertumbuhan jurnalisme robo yaitu mesin, seperti drone, komputer yang dapat dipakai atau sensor akan menjadi bagian dari proses pengumpulan berita. Namun, mereka tidak akan menggantikan orang, karena jurnalis tetap akan menulis cerita dari data yang memiliki arti bagi kehidupan masyarakat. Kemungkinan juga orang akan mulai meminta pekerjaan yang lebih transparan oleh jurnalis, serta mungkin akan ada perselisihan untuk membuka lebih banyak data sebagai permintaan jurnalis, tetapi pemerintah dan perusahaan akan lebih enggan mempublikasikan informasi kontroversial. Ketertarikan orang pada kisah data juga akan mengarah ke konten yang lebih dipersonalisasi tergantung pada preferensi, penelusuran, dan klik mereka.

Terlepas dari prediksi, laporan tersebut menawarkan beberapa saran di masa depan yang penting bagi jurnalisme data untuk berkembang lebih jauh dan menjadi bagian standar di ruang redaksi. Awalnya, sangat mungkin bahwa data yang salah atau salah tafsir akan dipublikasikan, karena berita biasa

yang buruk cukup sering muncul di berita. Dengan demikian, jurnalis harus sangat berhati-hati dan kritis dengan dataset yang mereka kerjakan, sementara pada saat yang sama mereka harus sangat akurat dengan angka dan grafik yang mereka pilih untuk digunakan. Selain itu, karena jurnalis semakin terlibat dengan berita data, mereka harus melindungi segala jenis informasi sensitif dan ruang redaksi perlu mendapatkan sistem keamanan yang lebih baik untuk mengamankan kumpulan data mereka. Untuk dapat mengolah data, langkah bijaknya bagi jurnalis untuk memiliki pendidikan tambahan dalam ilmu sosial dan statistik, untuk lebih memahami cara kerja analisis data dan dapat menghubungkannya dengan kebutuhan masyarakat. Terkait data tertutup dari pemerintah dan perusahaan yang diprediksi akan terjadi, organisasi berita dapat berkolaborasi dengan universitas dan perpustakaan untuk mencari informasi, menyimpan data, dan bahkan mendapatkan umpan balik penting. Akhirnya, ruang redaksi perlu menjadi lebih beragam dan memasukkan orang-orang dari semua kelompok ke dalam tim mereka untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender, regional, dan segala jenis ketidaksetaraan lainnya. Keberagaman pasti akan membawa jurnalisme yang lebih baik, karena sudut pandang yang berbeda akan terwakili saat membuat berita.

Lebih fokus pada Gerakan Data Terbuka, jurnalisme secara umum harus lebih aktif mempromosikannya dan merangkul nilai dan potensi data terbuka. Cerita data, misalnya, bisa tentang kesenjangan dalam kumpulan data atau dalam kelangkaan data. Selain itu, sangat penting bagi jurnalis untuk berkolaborasi dengan badan-badan pemerintah dan,

khususnya, mereka yang bertanggung jawab untuk menyediakan data guna membantu mereka meningkatkan data yang dipublikasikan dan memaksa mereka untuk lebih transparan.

Sedangkan untuk negara berkembang, ada tiga saran untuk meningkatkan jurnalisme data. Pertama, organisasi berita dapat berinvestasi dalam beasiswa, untuk membawa orang-orang ke dalam tim dengan analisis data tambahan atau keterampilan visualisasi dan dengan latar belakang yang berbeda. Kedua, akan sangat berguna untuk menyelenggarakan kamp pelatihan jurnalisme data dan hackathon yang akan memberikan kesempatan kepada jurnalis profesional untuk berhubungan dan dididik dalam teknik jurnalisme data. Ketiga, investigasi data global lintas batas dapat menjadi sumber yang bagus untuk cerita yang menarik dan bermakna, sekaligus merupakan peluang untuk menciptakan kolaborasi lintas batas dalam pertukaran data.

5.6. Penutup

Sebagai kesimpulan, ada banyak potensi jurnalisme dalam jurnalisme berbasis data, tetapi membutuhkan sejumlah perubahan struktural, teknis dan sosial, terutama oleh media berita dan pemerintah. Secara umum diyakini bahwa jurnalisme data adalah salah satu pilar jurnalisme modern karena masyarakat kita telah bergerak di era data besar (big data), jurnalisme data memiliki kemampuan untuk memainkan peran penting dalam memanfaatkan kumpulan data yang tersedia. Kemampuan yang tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh jurnalis warga, bersama dengan masalah berita palsu, adalah peluang bagi jurnalis untuk

mendapatkan kembali kredibilitasnya dan terus bertindak sebagai penjaga gerbang informasi.

Namun masih ada beberapa kebingungan dan skeptisisme seputar jurnalisme data mengenai peran dan nilainya. Di satu sisi banyak jurnalis ragu untuk bekerja dengan data, statistik, dan pemrograman. Di sisi lain organisasi berita, karena anggaran yang rendah, tidak sering mengambil inisiatif untuk mengadopsi teknik baru, terutama jurnalisme data yang tidak memiliki model bisnis untuk mendukung keberhasilannya dan belum membawa pendapatan yang signifikan ke media berita sampai sekarang. Situasi menjadi semakin sulit bagi media lokal yang memiliki sumber daya lebih sedikit dan data yang kurang terbuka dari pemerintah daerah untuk diajak bekerja sama.

Namun demikian, komunitas lokal dapat menjadi potensi penting bagi Gerakan Data Terbuka untuk berkembang lebih jauh. Jelas bahwa ada peningkatan berkelanjutan terkait data terbuka, karena semakin banyak pemerintah, lembaga, dan organisasi mulai menyediakan data mereka, dan semakin banyak LSM dan jurnalis mendorong keterbukaan lebih lanjut. Namun masih terdapat permasalahan yang harus diatasi dengan data yang tersedia, mengenai format data, kurangnya pemutakhiran data dan jenis data yang dipublikasikan. Sebaliknya, alat, aplikasi, dan perangkat lunak pada analisis data dan visualisasi data terus meningkat dan menjadi lebih mudah bagi jurnalis atau siapa pun. Dengan demikian, kebanyakan dari mereka tidak memerlukan pengetahuan pengkodean dan menawarkan versi gratis, serta versi berbayar yang lebih canggih.

Pada saat yang sama, jurnalis perlu beradaptasi dengan lingkungan baru yang berkembang dan menemukan tempat mereka, karena keterbukaan dan teknologi digital telah berkontribusi pada pengembangan jurnalisme warga dan juga organisasi lain telah mulai bekerja dengan data dan mempublikasikan visualisasi. Jurnalis dapat memanfaatkan semua kemungkinan yang dapat ditawarkan data dan dapat menjadi penyedia kumpulan data dan analisis data. Sambil menggunakan status jurnalistik mereka, mereka bisa fokus membuat cerita dengan data yang akan melayani kepentingan publik. Alih-alih melihat teknologi digital dan perubahan yang ditimbulkannya sebagai ancaman, mereka bisa mengubahnya menjadi peluang. Sebenarnya ada kepercayaan bahwa jurnalisme data bisa menjadi jawaban atas krisis jurnalisme dan bisa mengembalikan kepercayaan khalayak. Selain itu, dapat memperkuat peran pengawas jurnalisme dan memaksa mereka yang berkuasa untuk lebih akuntabel kepada publik.

(**)

BAB VI

BATAS PEMBERITAAN: BEBAS TETAPI TIDAK BEBAS

Oleh : Susilastuti Dwi Nugraha Jati¹

6.1. Pengantar

Namanya profesi pasti ada rambu-rambu etika profesi, rambu-rambu hukum yang dijadikan pedoman seseorang yang menyanggah profesi tersebut. Profesi apapun pasti memiliki kode etik. Mengapa harus ada kode etik? Pertanyaan sederhana tapi sulit untuk menjawabnya.

Pada dasarnya kode etik profesi akan menuntun setiap orang menjalankan profesi tertentu agar tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan sekelompok orang dan pada gilirannya justru akan merugikan kepentingan publik. Etika profesi menjadi peta jalan bagi seseorang yang menjalankan profesi untuk berjalan ke arah koridor yang diperjuangkan profesi tersebut.

Bagaimana dengan wartawan? Wartawan adalah sebuah profesi yang mulia karena wartawan menjalankan sebagian hak dasar manusia yaitu hak seseorang mendapatkan informasi. Karya jurnalistik wartawan itu sejatinya bisa menjadi sumber rujukan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan.

1. Dr.Dra.Susilastuti Dwi Nugraha Jati, M.Si Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN "Veteran" Yogyakarta dan Penguji Uji Kompetensi Wartawan di Lembaga Penguji Wartawan Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN "Veteran" Yogyakarta

Memang benar, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah masyarakat dalam memperoleh informasi. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan media arus utama (cetak, *online*, elektronik) untuk mendapatkan informasi, tetapi juga melalui media sosial (twitter, facebook, Whatsapp, Instagram, youtube dll). Namun, informasi yang ditulis oleh wartawan di media arus utama menjadi rujukan masyarakat karena ada proses *gatekeeper* sebelum informasi tersebut sampai pada masyarakat.

Ketaatan terhadap kode etik jurnalistik juga membantu wartawan untuk teguh pada idealismenya di tengah kompleksitas permasalahan yang dihadapi wartawan sehari-hari. Wartawan meskipun menjadi ujung tombak dari sebuah penerbitan namun wartawan dalam menjalankan tugas akan melakukan relasi dengan struktur kuasa yang ada di luar media yaitu pemerintah yang mempunyai kepentingan kuasa, di sisi lain ketika berada di media menghadapi pertarungan di tingkat *news room* yaitu pertarungan idealisme dan kepentingan bisnis, antara idealisme dan kepentingan politik.

Mengapa demikian? Ini adalah realita yang dihadapi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalismenya. Di tengah kompleksitas pertarungan itu maka Kode Etik Jurnalistik bisa menjadi pegangan wartawan untuk tetap pada tujuan utama aktivitas jurnalisme yaitu memperjuangkan kebenaran.

6.2. Kode Etik Jurnalistik

Sebagaimana diuraikan di atas, kode etik yang diperhatikan oleh jurnalis di Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/

SK- DP/V/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ ini terdiri dari 11 pasal. Setiap pasal perlu dipahami secara holistik sehingga tidak salah dalam mengimplementasikan.

Pasal 1 : *Wartawan Indonesia bersikap Independen dalam menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretika buruk.* Pasal ini bisa ditafsirkan sebagai berikut :

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan. Wartawan pada dasarnya tidak bisa netral. Wartawan harus berpihak yaitu kepada kepentingan publik. Tidak mudah bagi wartawan untuk bersikap independent karena dalam institusi banyak kepentingan yang mungkin saling bertarung sama lain yaitu kepentingan idealisme vs komersialisme, kepentingan kelompok vs kepentingan umum. Dalam pertarungan ini wartawan harus pandai bersiasat agar bisa tetap independent dan kepentingan publik tidak dikorbankan.

Akurat kerja jurnalistik menuntut kecermatan dalam menyajikan fakta atau peristiwa sesuai dengan keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi. Akurasi merupakan dimensi yang sangat penting bagi sebuah karya jurnalistik. Akurasi bisa menunjukkan kualitas sebuah berita. Akurasi sangat penting bagi subyek berita dimana reputasi dan kepentingannya dipertaruhkan dalam oleh sebuah pemberitaan. Akurasi juga penting bagi media karena berkaitan dengan kredibilitas media (Rahayu (ed), 2006).

Berimbang mengandung makna semua pihak mendapatkan kesempatan setara. Berimbang tidak hanya menyangkut

kuantitas narasumber tetapi semua pihak yang terlibat dalam sebuah fakta harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam sebuah pemberitaan. Keberimbangan dalam membuat karya jurnalistik hukumnya wajib.

Wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya memiliki tujuan idealis yaitu memperjuangkan *truth* (kebenaran) untuk kepentingan publik. Jadi dalam menuliskan sebuah fakta atau peristiwa dalam sebuah pemberitaan tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian lain.

Pasal 2 KEJ wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional. Ketentuan dalam pasal ini bisa dimaknai (a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber, (b) Menghormati hak privasi (c) Tidak menyuap (d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya (e) Rekam pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar/foto/suara dilengkapi dengan keterangan sumber secara berimbang (f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara (g) Tidak menyatakan hasil liputan lain sebagai karya sendiri (h) Menggunakan cara-cara tertentu dan berimbang untuk peliputan investigasi.

Pasal 3 KEJ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Dalam konteks ini wartawan ketika akan melaksanakan tugas jurnalistiknya harus (a) Menguji informasi berarti melakukan *chcek and recheck* tentang kebenaran informasi, (b) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara

professional, (c) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta, (d) Asas praduga tidak bersalah : prinsip tidak menghakimi orang

Dalam Pasal 4 KEJ yang menyebutkan bahwa wartaw Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul mengandung makna (a) Bohong berarti sesuatu yang diketahui sebelumnya oleh wartawan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, (b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, (c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan, (d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan birahi, (e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5 KEJ menyebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan. (a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain melacak, (b) Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6 KEJ menyebutkan wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi (a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum, (b) Suap adalah segala

pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensinya.

Pasal 7 KEJ menyebutkan wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan. Penafsirannya (a) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya (b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber (c) Informasi latar belakang : adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya (d) *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh diberitakan atau disiarkan.

Pasal 8 KEJ menyebutkan wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan Bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran pasal ini (a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, (b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan

Pasal 9 KEJ menyebutkan wartawan Indonesia menghormati narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan public. Penafsiran pasal ini (a)

Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati, (b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik

Pasal 10 KEJ adalah wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa. Penafsiran pasal 10 ini adalah (a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat, mungkin baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar, (b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

Sementara pasal 11 KEJ menyebutkan wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran atas pasal ini adalah (a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, (b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun orang lain, (c) Proporsional adalah setara dengan bagian yang harus diperbaiki.

Siapa yang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Profesi ini. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ada pada organisasi wartawan dan perusahaan pers. Dewan Pers disini memberikan penilaian atas aduan-aduan yang masuk dari masyarakat, pemerintah atau stake holder lainnya terkait dengan pemberitaan.

6.3. Bebas Tapi Tidak Bebas

Ketika Orde Baru jatuh, insan pers setelah melalui pertarungan yang intens akhirnya berhasil mengoalkan regulasi tentang pers yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Regulasi ini memberikan ruang gerak yang luas kepada pers – termasuk disini wartawan untuk menjalankan peran dan fungsinya tanpa takut dibayang-bayangi represi dari pihak penguasa. Insan pers mengalami euphoria, rambu-rambu aturan, etika profesi seringkali dilanggar.

Ada yang dilupakan bahwa kebebasan pers bukan berarti bebas secara absolut. Justru adanya kebebasan pers yang dijamin dengan regulasi, insan pers bisa bekerja lebih professional dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan public. Namun dalam realitanya, masih ada wartawan dalam bekerja masih banyak melakukan pelanggaran etika profesi. Ujungnya adalah banyaknya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat ke Dewan Pers.

Berdasarkan data dari komisi pengaduan Dewan Pers pada tahun 2019 ada 578 kasus, tahun 2020 ada 527 kasus dan tahun 2021 hingga Oktober ada 518 kasus . Menurut Heru (2021) dasar pengaduan mencakup (1) pelanggaran atas kode etik. Dimana penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Media yang bisa diadukan adalah pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Media wajib berbadan hukum. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan: “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan

kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi". Sementara prosedur pengaduan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 terdiri dari VII BAB dan 12 Pasal

Apa yang bisa diadukan masyarakat kepada Dewan Pers? Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut karya jurnalistik, perilaku dan atau tindakan wartawan terkait kegiatan jurnalistik; Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers; Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antar golongan. Jika terkait *karya* jurnalistik, Teradu adalah penanggungjawab media; Jika terkait kegiatan jurnalistik, adalah wartawan beserta penanggungjawab media yang bersangkutan

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa kebebasan pers yang dilindungi regulasi dan profesi wartawan yang dilindungi oleh hukum bukan berarti bisa melakukan tugas mencari, mengolah atau menuliskan informasi tentang fakta yang ada dalam masyarakat menjadi berita bebas sebebannya. Ada rambu-rambu yang harus ditaati dan diperhatikan agar pelaku profesi wartawan bisa menjalankan peran dan fungsinya secara bertanggungjawab. Selain KEJ wartawan harus memperhatikan ketentuan regulasi lainnya seperti (1) Ketentuan dalam KUHP, Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perbaikan

atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

6.4. Regulasi yang Harus Diperhatikan oleh Jurnalis

Namun meskipun sudah ada jaminan kemerdekaan pers, pers Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman. Bentuk-bentuk ancaman kemerdekaan pers antara lain kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan tulisan wartawan. Tidak jarang tulisan wartawan yang kritis dianggap sebagai resonansi oleh bebarap pihak.

Kriminalisasi terhadap pers. Hal ini bisa dilihat ada delik pers yang masih mengancam keberadaan media. Dalam ilmu hukum, delik pers itu tidak ada yang ada adalah delik umum yang dilakukan oleh pers. Jadi yang spesial dalam delik pers adalah mediumnya atau alatnya bukan perbuatannya. Delik pers adalah delik yang untuk penyelesaiannya memerlukan publikasi dengan menggunakan pers dan terdiri dari pernyataan pikiran atau perasaan yang diancam pidana, atau pernyataan pikiran atau perasaan yang dapat dijatuhi pidana yang untuk penyelesaiannya membutuhkan publikasi dengan pers (Muis, 1996).

Beberapa Delik Pers dalam Peraturan Hukum Pidana/KUHP antara lain : Pasal XIV UU No 1/1946 (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan

rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

UU No 1/1946 Pasal XV (1) Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

KUHP Pasal 154 Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 155 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 156 : Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KUHP Pasal 160 : Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 161 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KUHP Pasal 207 Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 208 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KUHP Pasal 310 (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 311 (1) : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KUHP Pasal 320 (1) : Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 321 (1); Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain delik pers sebagaimana tercantum dalam KUHP, regulasi lain yang harus diperhatikan adalah Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. UU 32/2002 tentang Penyiaran. UU No 32 Tahun 2002 Pasal 36 (5) Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan

unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Ancaman Pidana: Penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,-

Kemudian Undang-undang No. 11/2008 yo 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ancaman Pidana: Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Arsul Sani, 2021)

Regulasi-regulasi tersebut harus diperhatikan oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Walaupun dalam menjalankan fungsinya, tulisan wartawan sering dianggap sebagai resonansi oleh-oleh pihak-pihak yang tidak siap dengan kritikan, tulisan wartawan bisa serta merta dianggap sebagai delik pers.

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008, masyarakat pers seolah mendapatkan “kado” tahun baru. Bahkan ada lagi yang menyatakan bahwa terbitnya SEMA ini bolehlah disebut sebagai kemenangan kecil yang telah diraih oleh komunitas

pers. Sengketa pers yang persoalannya hampir selalu terkait dengan karya jurnalistik, dapat ditangani/diperiksa secara proporsional guna menilai dan menentukan bobot pelanggaran/nya apakah sengketa pers yang dilaporkan/diadukan murni kasus etik ataukah memang merupakan kasus hukum (pidana atau perdata) ataukah kasus etik sekaligus kasus hukum. Dan yang lebih penting juga untuk menentukan apakah berita yang dimasalahkan merupakan karya jurnalistik atau bukan. (Andi Samsan Nganro, 2021)

SEMA Nomor 13 Tahun 2008 tersebut pada pokoknya menyatakan “..... dalam penanganan / pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.....”.

Dari muatan SEMA tersebut ada beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian yaitu:

1. Bahwa ketika menghadapi sengketa pers betapa pentingnya mendengarkan ketera-ngan ahli di bidang pers.
2. Bahwa mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers dapat dimaknai bahwa ahli yang dimaksud tidak harus dari ketua atau anggota Dewan Pers yang berkedudukan di Jakarta, tetapi dapat saja orang/ahli dari luar Dewan Pers yang ditunjuk oleh Dewan Pers karena mempunyai keahlian atau mempunyai kompeten di bidang pers.
3. Bahwa Dewan Pers yang dilibatkan sebagai ahli yang diminta oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya, dalam memberikan pendapat dalam kasus

sengketa pers tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi Dewan Pers. Berbeda halnya ketika Dewan Pers menyelesaikan sengketa pers, maka Dewan Pers dapat melaksanakan kapasitasnya sesuai fungsi Dewan Pers, yaitu “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers

6.5. Wartawan dan Isu Anak

Wartawan juga senantiasa terlibat dalam berbagai isu yang sekarang ini berkembang dalam masyarakat. Salah satunya tentang masalah anak. Dalam realitas anak masih menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, terkena imbas dari perilaku orang-orang sekitarnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang anak yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan pada anak.

Wartawan sendiri yang senantiasa berada di garda terdepan terkait fakta dan peristiwa yang terkait tentang anak juga perlu memiliki empati. Hal ini untuk menghindari trauma akibat pemberitaan. Berkaitan dengan hal itu Dewan Pers mengeluarkan peraturan Dewan Pers Nomor :1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Ramah Anak.

Hal yang melatar belakangi dikeluarkannya pedoman ini karena mencermati pemberitaan yang terkait dengan anak di tanah air seringkali anak justru menjadi korban, obyek eksploitasi dan diungkapkan identitasnya antara lain wajah, inisial, nama,

alamat dan sekolah secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Bahasa pemberitaan terkait anak terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan vulgar. Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.

Komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak. Pedoman ini akan menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan Indonesia menyadari pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif tentang peristiwa yang perlu diketahui public.

Pemberitaan ramah anak dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak. Anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban. Anak dalam pedoman ini belum berusia 18 tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

Identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat, rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti dan benda-benda yang mencirikan sang anak.

Pedoman ramah anak mencakup :

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan pedoman ramah anak diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai Undang -undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan peraturan Dewan Pers yang berlaku. (Buku Saku Wartawan, 2021)

Berdasarkan urian di atas jelaslah wartawan tidak bekerja dalam ruang kosong yang tidak ada aturan sama sekali. Memang

benar sesuai dengan regulasi yang ada khususnya regulasi tentang pers yaitu Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 4 (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Wartawan tetap terikat rambu-rambu etik, regulasi, serta pedoman-pedoman yang digunakan untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya. Wartawan bekerja bukan untuk dirinya tetapi menjalankan sebagai hak dasar masyarakat mendapatkan informasi yang berkecukupan. Wartawan harus berada di depan ketika ada kepentingan public terganggu.

Daftar Pustaka

1. M Muis, 1998, *Titian Jalan Demokrasi*, Kompas, Jakarta
2. Nganro, Samsang, Andi, 2021, *Arah Perlinfungan Hukum Kemerdekaan Pers dan Pentingnya, SEMA Nomor 13 Tahun 2008*, Pelatihan Ahli Pers, Solo
3. Sani, Asrul, 2021, *Ancaman dan Perlindungan Kemerdekaan Pers dalam KUHP, UU Pers, dan UU Terkait*, Pelatihan Ahli Pers, Solo
4. Siregar, Efendi, Amir , 2015, *Meningkatkan Profesionalisme Wartawan : Bekerja untuk Publik dengan Obyektif, Independen dan Netral*, Jurnal Dewan Pers, Edisi No 11, Desember 2015.
5. Soewardoyo, Herutjahjo, 2021, *Kedewanpersan dari aspek Yuridis*, Pelatihan Ahli Pers, Solo
6., 2021, *Buku Saku Wartawan*, Dewan Pers, Jakarta

BAB VII

EKSPLORASI SUMBER BERITA DAN TEKNIK WAWANCARA

Oleh: Arif Wibawa¹

7.1. Eksplorasi Sumber Berita

Sumber berita menjadi bagian penting dalam jurnalisme. Sumber berita merupakan titik awal dimana proses jurnalisme dimulai. Pemilihan sumber berita yang baik akan mempengaruhi kualitas berita yang ditulis. Begitu juga sebaliknya, sumber berita yang tidak kompeten dan kurang kredibilitasnya akan menurunkan kualitas berita yang ditulis.

Sumber berita, seperti yang diidentifikasi oleh Tora Bent (2001) ada sekitar sepuluh yakni, wartawan di lapangan, pusat-pusat informasi, *God given fact*, siaran pers dan konferensi pers, saluran radio komunikasi, keleompok penekan, pendengar, pemirsa, pembaca, saksi mata, internet, dan kantor berita. Sepuluh sumber berita yang ada ini, mungkin wartawan bias memilih beberapa darinya disesuaikan dengan berita yang akan ditulisnya.

Wartawan harus bisa mengembangkan sumber berita, harus tahu banyak, tahu kemana mencari informasi, tahu siapa yang harus ditemui dan diwawancara. Di sinilah titik krusial

1 Drs. Arif Wibawa, M.Si dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN "Veteran" Yogyakarta dan Penguji Uji Kompetensi Wartawan di Lembaga Penguji Wartawan Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN "Veteran" Yogyakarta

dalam pemilihan narasumber berita dimulai. Apabila keliru dan tidak tepat dalam memilih sumber berita bisa menjadikan berita kurang kualitasnya.

Setelah berhasil menentukan beberapa sumber berita, wartawan kemudian menentukan cara bagaimana melakukan pengumpulan fakta. Dalam mengumpulkan fakta atau *news gathering*, wartawan dapat melakukan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan riset.

Observasi atau pengamatan dalam mengumpulkan fakta dapat dilakukan dengan mengamati langsung apa yang terjadi kemudian melaporkannya apa yang dilihat ke dalam berita. Pada umumnya metode pengumpulan berita melalui observasi dipakai untuk penulisan *feature* dengan penulisan deskriptif. Namun bisa dipakai untuk lead soft news, bisa juga dipakai untuk staright news.

Dalam melakukan observasi terhadap sumber berita, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengamat yang baik menggunakan mata, telinga, pemikiran, catatan dan alat perekam
2. Pengamat yang baik memastikan mereka mendapat fakta konkrit, angka yang spesifik dan informasi akurat
3. Pengamat yang baik melihat unsur dramatis atau unsur yang tidak lazim dalam setiap situasi
4. Pengamat yang baik selalu berusaha mencari informasi lebih dari yang mereka butuhkan
5. Kunci menjadi pengamat yang baik adalah melihat lebih dalam dari yang anda lihat pada permukaan

Diharapkan hasil pengamatan dapat memiliki nilai berita yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran faktanya.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengamatan atau observasi sebagai berikut: Mengobservasi tidak sama dengan menyuarakan opini Anda. Anda perlu menggunakan indera Anda untuk mengumpulkan informasi tetapi tidak boleh menyatakan pendapat yang dilihat. Penulis harus menjaga agar pandangannya tidak masuk dalam berita. Satu-satunya tempat bagi opini wartawan atau interpretasi adalah pada tulisan analisis orang pertama (*first person*), yang biasanya didahului dengan pengantar dari redaksi.

Terdapat tiga tipe dasar observasi: observasi partisipan, observasi non-partisipan dan observasi diam-diam. Observasi partisipan artinya pengamat terlibat langsung dalam peristiwa yang diamati. Observasi jenis ini jarang dilakukan dalam pengumpulan fakta untuk berita. Observasi non-partisipan adalah pengamat terlibat secara pasif berada di luar peristiwa yang diamati. Observasi non-partisipan ini lebih sering dilakukan untuk pengumpulan fakta berita. Observasi yang berikutnya adalah observasi diam-diam. Dalam observasi ini, kehadiran pengamat tidak diketahui oleh sumber berita. Observasi diam-diam hanya boleh dilakukan apabila obyek berita sangat kuat berkaitan dengan kepentingan publik. Pada dasarnya pengamatan yang dilakukan dalam pengumpulan berita harus dilakukan secara terbuka, sepengetahuan sumber berita.

7.2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah perbincangan, umumnya dilakukan dua orang dengan tujuan mendapat informasi untuk audience. Tiap wawancara punya gaya tersendiri, demikian juga tiap orang yang diwawancara tidak ada yang sama. Wawancara bukanlah

sesuatu yang dipelajari dan diterapkan begitu saja. Wawancara adalah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus menerus.

Wartawan menurut pasal 1 (ayat 4) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Sementara masih dalam UU yang sama kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Dalam mencari dan memperoleh informasi wartawan biasanya tidak lepas dari kegiatan wawancara.

Dalam wawancara, wartawan bertanya kepada narasumber (saksi, pengamat, pihak berwenang, dan sebagainya) untuk menggali atau mengumpulkan informasi, keterangan, fakta, atau data tentang sebuah peristiwa atau masalah. Hasil wawancara disusun dalam bentuk karya jurnalistik. Sebuah wawancara pada dasarnya bertujuan untuk menggali fakta, data, keterangan, alasan, atau pendapat atas sebuah peristiwa, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan berlangsung. Tujuan wawancara antara lain:

1. Konfirmasi (penyeimbang)
2. Melengkapi data-data yang kurang detil
3. Mendorong narasumber agar berbicara dan mengungkapkan fakta
4. Menyambung kesenjangan hubungan narasumber dengan media.

Menurut Melvin Mencher (1987) wawancara dibedakan menjadi dua.

- a. Wawancara berita.

Tujuannya mengumpulkan informasi yang dapat

menjelaskan suatu gagasan, peristiwa atau keadaan dalam suatu berita.

- b. Wawancara profile. Berfokus pada individu, lembaga atau perusahaan. Helen Benedict menyarankan profil dipilih dari:
- Orang yang sudah terkenal
 - Orang yang telah melakukan suatu yang unik, istimewa atau aneh.
 - Orang yang menjadi teladan dari perbuatan dramatis atau fenomenal.
 - Orang yang mungkin tidak istimewa tetapi kehidupannya menggambarkan sesuatu yang menarik.

Dalam literatur jurnalistik dikenal banyak jenis wawancara, antara lain:

a. Wawancara berita

Wawancara berita (*News-peg interview*) adalah wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi, atau pandangan interviewee tentang suatu masalah atau peristiwa.

b. Wawancara pribadi

Wawancara pribadi (*personal interview*), yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang diri-pribadi dan pemikiran narasumber –disebut juga wawancara biografi.

c. Wawancara eksklusif

Wawancara eksklusif (*exclusive interview*), yaitu wawancara yang dilakukan secara khusus –tidak

bersama wartawan dari media lain.

d. Wawancara sambil lalu

Wawancara sambil lalu (*casual interview*), yaitu wawancara “secara kebetulan”, tidak ada perjanjian dulu dengan narasumber, misalnya mewawacarai seorang pejabat sebelum, setelah, atau di tengah berlangsungnya sebuah acara.

e. Wawancara jalanan

Wawancara jalanan (*man-in-the street interview*) – disebut pula “wawancara on the spot” – yaitu wawancara di tempat kejadian dengan berbagai narasumber, misalnya di lokasi kebakaran.

f. Wawancara tertulis

Wawancara tertulis – dilakukan via email atau bentuk komunikasi tertulis lainnya.

g. Wawancara “cegat pintu”

Wawancara “cegat pintu” (*door stop interview*), yaitu wawancara dengan cara “mencegat” narasumber di sebuah tempat, misal tersangka korupsi yang baru keluar dari ruang interogasi KPK.

Pekerjaan pertama yang harus dilakukan oleh seorang wartawan adalah memberi rasa aman kepada narasumber, agar ia merasa santai, tenang, dan mau terbuka memberi informasi. Wartawan harus memberi keyakinan kepada narasumber bahwa wartawan tersebut dan medianya itu bisa dipercaya, dan mampu menyimpan rahasia (terutama jika narasumber tidak ingin identitasnya dimuat di media massa). Kepercayaan dari pemberi wawancara ini sangat penting. Kalau

pewawancara tidak memperoleh kepercayaan dari sumber berita, maka informasi yang ia peroleh tidak akan lebih dari keterangan rutin, ulangan beberapa fakta yang sudah sering dimuat, pernyataan normatif yang sudah tidak perlu diperdebatkan, atau jawaban yang sifatnya mengelak belaka.

Selanjutnya ajukan pertanyaan terbuka dan gunakan petunjuknya (misalnya: ceritakan tentang, jelaskan, bagaimana, bagaimana demikian, mengapa, ceritakan lebih banyak lagi). Hindari pertanyaan utama yang tampaknya memiliki jawaban yang ditentukan sebelumnya. Cobalah membingkai pertanyaan tanpa terlalu banyak pembukaan (penjelasan). Habiskan waktu sebanyak mungkin untuk mendengarkan, bukan berbicara.

Pertanyaan pembuka ini sifatnya masih memberi rasa aman dan kepercayaan pada narasumber. Pertanyaan inti dan tajam, yang berisiko merusak suasana wawancara, harus disimpan dan baru dilontarkan pada momen yang tepat. Berdasarkan tanya-jawab awal, wartawan sudah bisa meraba bagaimana kondisi mental dan emosional narasumber, sehingga wartawan bisa memilih momen yang tepat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut.

Pertanyaan terbuka biasanya pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” memungkinkan pemberi wawancara berspekulasi, untuk menawarkan opini, pengamatan, atau deskripsi. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan terbuka berarti menawarkan peluang bagi komentar dan arah dari pemberi wawancara.

Pertanyaan terbuka mengundang tanggapan yang lebih lengkap dari pemberi wawancara, yang bisa memilih seberapa

panjang dan bagaimana isi jawabannya. Pertanyaan terbuka ini mengundang kerjasama dan partisipasi dari pemberi wawancara. Pemberi wawancara yang menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka mungkin juga bersedia memberi informasi lebih jauh dengan sukarela. Jawaban pertanyaan terbuka, selain lebih spekulatif, juga akan mencerminkan kepribadian pemberi wawancara.

Pertanyaan terbuka dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Dirancang untuk mendorong percakapan tentang pengalaman, emosi, sikap, atau pendapat orang yang diwawancarai.
- b. Cenderung kurang memimpin dari pada pertanyaan-pertanyaan tertutup, yang mendorong respons terbatas, seperti kata jawab seperti 'ya' atau 'tidak,' atau mungkin hanya anggukan saja. Mereka mungkin bukan pertanyaan "buruk" tetapi tidak memberikan "batu loncatan" untuk pertanyaan lanjutan.
- c. Biasanya dimulai dengan 5 W 1 H (siapa, apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana). Seringkali, mereka bukan pertanyaan sama sekali, tetapi pernyataan yang dimaksudkan untuk mendorong respons.

Beberapa contoh frasa pertanyaan terbuka di antaranya:

- Apa yang akan terjadi jika ...
- Ceritakan tentang ...
- Saya ingin tahu ...
- Apa yang akan Anda lakukan ...
- Apa pendapat Anda tentang ...
- Bagaimana kami ...

- Dalam hal apa ...
- Bagaimana Anda ...

Selain pertanyaan terbuka, juga dikenal dengan *leading questions* atau pertanyaan utama yang tidak kalah efektifnya dengan pertanyaan terbuka dalam menggali informasi dari narasumber. Pertanyaan utama dapat dipahami sebagai berikut

- a. Mengarahkan orang yang diwawancarai untuk menjawab dengan cara tertentu.
- b. Harus dihindari karena dapat mencemari informasi/bukti yang Anda kumpulkan dan menghasilkan asumsi dan kesimpulan yang menyesatkan.

7.3. Prinsip Praktis Wawancara

Berikut adalah panduan praktis bagi wartawan untuk melakukan wawancara.

1. Terbuka dan beri perhatian

Dalam menjalin hubungan sosial dengan narasumber, wartawan diharapkan memiliki sifat terbuka dan memberi perhatian kepada narasumber. Sifat terbuka berkaitan dengan maksud tujuan wawancara. Perhatian dapat diberikan kepada narasumber berkaitan dengan aktivitasnya.

2. Anda akan menuai hasil dari apa yang anda tanam. membawa kemudahan di masa datang ketika Anda membutuhkan keterangan dari narasumber lagi.

3. Orang akan bicara lebih bebas jika mereka senang.

Suasana hati yang senang, rileks dari narasumber akan membawa narasumber untuk lebih terbuka dan bebas dalam menyampaikan pendapat

4. Dalam percakapan, anda harus menambang berton-ton bijih untuk mendapatkan satu gram emas. Untuk dapat keterangan yang dibutuhkan dalam menulis berita, wartawan boleh bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang beragam.
5. Jaga kontak mata dan dengarkan, jaga bahasa tubuh anda. Jaga kesopnan dalam melakukan wawancara. Jaga kontak mata, gesture, gerakan tubuh yang sopan.
6. Wawancara adalah percakapan, bukan konfrontasi. Pusat perhatian bukan pada diri anda, anda melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat yang anda wawancara, bukan memberikan pendapat anda padanya
7. Dalam wawancara, tidak berarti pewawancara harus banyak bicara. Namun pewawancara bertanggung jawab agar percakapan tidak seperti di level taman kanak-kanak.
8. Pewawancara juga mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai untuk audience.

7.4. Dua belas tahap wawancara :

Berikut adalah tahap-tahap wawancara yang mesti dilalui oleh wartawan dalam melakukan wawancara.

1. Jelaskan maksud wawancara.

Bagian awal dalam wawancara adalah menjelaskan kepada narasumber maksud dan tujuan wawancara. Maksud dan tujuan wawancara ini harus jelas di awal supaya narasumber dapat mempersiapkan jawaban dalam wawancara secara baik dan lengkap.

2. Lakukan riset latar belakang

Untuk mengenali siapa narasumber, bagaimana riwayat pekerjaan dan hidupnya apa saja kesukannya, apa saja kebiasaannya dan sifat-sifatnya maka diperlukan riset latarbelakang. Riset latarbelakang diperlukan untuk membekali wartawan dengan informasi tentang narasumber yang berguna bagi jalannya wawancara.

3. Ajukan janji untuk wawancara.

Dalam wawancara yang direncanakan diperlukan membuat janji dengan narasumber. Janji harus ditepati dengan baik

4. Rencanakan strategi wawancara anda

Sebelum melakukan wawancara, perlu diatur strategi wawancara yang berkaitan dengan ssusunan pertanyaan, hal apa saja yang akan ditanyakan dalam wawancara

5. Temui responden anda

6. Ajukan pertanyaan serius anda yang pertama

Pertanyaan serius dan berat sebaiknya diajukan pada kesempatan pertama hal ini dimaksudkan untuk menjaga mood narasumber. Seandainya tiba-tiba narasumber sudah tidak bersedia melanjutkan wawancara, sudah didapat keterangan mengenai hal penting terlebih dulu.

7. Lanjutkan menuju inti dari wawancara

8. Ajukan pertanyaan keras (yang sensitif dan menyinggung) bila perlu - sebaiknya disimpan di akhir wawancara. Pertanyaan sensitif sebaiknya disampaikan

pada bagian akhir wawancara supaya apabila narasumber tersinggung dapat segera dipulihkan suasananya.

9. Pulihkan, bila perlu, dampak dari pertanyaan-pertanyaan keras itu
10. Akhiri dan simpulkan wawancara anda
11. Ucapkan terimakasih betapa pun sulitnya wawancara yang anda lakukan
12. Pastikan wawancara terekam dengan baik

7.5. Tips Menyusun Pertanyaan Wawancara :

Hanya ada enam pertanyaan dasar: *Who, What, Where, When, How, Why* tanyakan pertanyaan paling penting pada kesempatan pertama. Semakin narasumber merasa tertekan, semakin sedikit waktu yang mereka punya dan berusaha memotong wawancara secepat mungkin.

Pertanyaan pendek lebih baik dari pertanyaan panjang. Jangan pernah menanyakan lebih dari satu pertanyaan dalam satu waktu. Menggabungkan pertanyaan membuat Narasumber menghindari seluruh pertanyaan tanpa terlihat.

Di lapangan, coba tanyakan maksimal tiga atau empat pertanyaan. Jika anda tidak bisa mendapat jawaban yang anda inginkan dari narasumber, ganti pertanyaannya. Wawancara bukanlah ekspedisi memancing ikan. Yakinlah pada fakta yang anda miliki. Tidak ada yang lebih buruk dari narasumber yang menyalahkan anda terutama pada siaran *live*.

BAB VIII

INDEPTH REPORTING: **MENGUAK POTENSI KEKAYAAN MARITIM KEPULAUAN RIAU**

Saibansah Dardani¹

8.1. Pengantar

Wartawan dalam mencari, menulis berita akan membuat keputusan hasil perolehan informasi dan fakta yang ada di masyarakat akan ditulis dalam bentuk seperti apa? Wartawan harus memutuskan hal itu sebelum menyerahkan karya jurnalistiknya kepada redaktur yang akan menyeleksi karya jurnalistik wartawan dimuat atau tidak dimuat.

Wartawan harus memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis berita, serta fakta seperti apa yang harus ditulis ketika akan memilih jenis berita tertentu. Seperti kita ketahui ada beberapa jenis penulisan berita seperti *straight news* (berita lempang), *soft news* (berita ringan), *feature* (berita kisah), *indepth reporting* (berita berkedalaman) serta investigasi reporting. Berbagai ragam tulisan ini pada dasarnya tetap berpijak pada fakta dan peristiwa yang ada di masyarakat. Pembedanya berangkat dari mana memulai mendapatkan fakta.

Straight news untuk media cetak maupun online mendominasi hampir semua isi media (70 persen). Hal ini

1 Saibansah Dardani, S.Ag wartawan senior dan Penguji Uji Kompetensi Wartawan di Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN "Veteran" Yogyakarta

disebabkan masyarakat memang membutuhkan berita-berita yang cepat untuk membantu masyarakat menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Sementara *soft news* atau berita ringan adalah berita yang bagi masyarakat yang membaca merasa beruntung tapi bila tidak membaca tidak menjadi masalah. Mengapa demikian karena ragam berita ini merupakan bagian dari berita *straight news*.

Sementara *feature* (berita kisah) adalah ragam berita yang mencari dan mengolahnya membutuhkan waktu, Mengapa demikian? *Feature* ragam berita yang mengeksplorasi sisi humanism dari sebuah fakta dan peristiwa. Liputan *feature* membutuhkan waktu serta data-data yang komprehensif.

Indepth Reporting (liputan berkedalaman) adalah liputan yang berangkat dari masalah yang sudah diberitakan di media massa (cetak, online maupun elektronik). Masalah yang diberitakan tersebut memiliki dampak bagi masyarakat secara luas. Melalui liputan *indepth reporting* ini dilakukan media melalui tulisan wartawan akan membantu memberikan jalan keluar (*mekanisme exit*) terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Liputan lebih mendalam dan sangat holistic.

Sementara *investigasi reporting* adalah sebuah liputan yang mendalam dan membuktikan sebuah peristiwa atau fakta yang terjadi dalam masyarakat. Masalah yang digali adalah masalah yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Pada bab ini diuraikan pengertian tentang *indepth reporting* dan bagaimana merencanakan dan menggali liputan berkedalaman ini. Ragam liputan ini sangat perlu dikembangkan untuk menggali potensi yang ada di wilayah

perbatasan khususnya di Kepulauan Riau harus digali secara holistic agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang mendalam. Tulisan akan dimulai dengan pengertian *indepth reporting*, bagaimana merencanakan *indepth reporting*.

8.2. Pengertian

Setiap wartawan pada dasarnya sudah pernah melakukan liputan *indepth reporting* karena liputan ini mampu membawa wartawan menjelajah sebuah fakta dan peristiwa yang ada dalam masyarakat secara holistic. Meskipun pernah melakukan liputan jenis ini tidak mudah karena membutuhkan kerja tim yang solid, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Wartawan tidak hanya bicara kecepatan, keakuratan, keberimbangan tetapi paling penting adalah tingkat kedalaman. *Indepth reporting* tidak hanya mengungkap persoalan dari satu dimensi saja tetapi harus dari berbagai dimensi. Tulisan *indepth reporting* harus memberikan solusi atas persoalan yang akan dituliskannya. Tulisan ditulis dalam beberapa bagian dengan angle masing-masing.

Pegangan utama untuk menulis laporan *indepth reporting* adalah melihat satu permasalahan atau suatu fakta seperti satelit (*satellite zooming*) sehingga mampu mengcover berbagai dimensi yang terkait dengan fakta tersebut. Penulisan *indepth reporting* merupakan penulisan yang mencoba mengungkap hal yang telah ditulis sebelumnya tetapi sifatnya masih sangat dangkal. Di sini hasil tulisan merupakan satu pengembangan dan bersifat sangat luas dan dalam.

Dewasa ini pers di Indonesia banyak melakukan penulisan berita secara mendalam. Hal ini disebabkan karena persaingan antar media (cetak atau elektronik-red) demikian ketat sehingga kalau menuliskan fakta hanya bersifat kronologis maka akan ditinggalkan khalayaknya. Upaya-upaya menuliskan fakta dengan cara *indepth reporting* tidak hanya dilakukan oleh media cetak saja tetapi juga oleh media elektronik serta media online.

Mengingat fakta yang ditulis sifatnya mendalam maka dalam *indepth reporting* biasanya jumlah wartawan yang ikut meliput lebih dari satu dan di bawah satu koordinasi salah seorang wartawan senior. Koordinator inilah yang bertugas untuk merangkum hasil laporan wartawan di lapangan.

Tidak semua liputan bisa ditindaklanjuti dengan liputan *indepth reporting*. Paling utama fakta dan peristiwa yang akan ditulis bertujuan agar pembaca, pemirsa atau pendengar mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Informasi itu dibutuhkan untuk bisa melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya.

Indepth reporting di sini tidak hanya merepresentasikan fakta-fakta secara kronologis melainkan melalui sebuah penyelidikan yang orisinal, logis, memasukkan berbagai tekanan dan kepentingan. Membuat pembaca paham bukan kepada siapa dan apa namun bagaimana dan mengapa. Fakta dan peristiwa yang diungkap bukan sebagai sesuatu yang segera tampak melainkan hendak memberikan kontribusi pada pemahaman satu peristiwa.

Untuk mencapai tujuan itu maka dalam *indepth reporting* peristiwa dan fakta yang harus ditulis :

1. Ada latar belakang dan atmosfer terhadap fakta dan peristiwa yang akan digali
2. Informasi yang akan dijadikan bahan berita harus detail. Pembaca, pendengar atau pemirsa tidak hanya diberitahukan mengenai apa, kapan dan dimana sebuah peristiwa terjadi, tetapi mengapa hal tersebut terjadi.
3. Informasi yang tersaji dalam karya jurnalistik inti peristiwa secara sesungguhnya secara mendalam (lengkap) seimbang dan terorganisir dengan kelengkapan latar belakang.
4. Mengingat informasi tentang fakta dan peristiwa yang digali melalui *indepth reporting* sudah pernah dimuat maka informasi yang disajikan harus menunjukkan pengembangan pemberitaan dan penjelasannya secara signifikan melalui dukungan gambar/foto/grafik.
5. Perencanaan peliputan yang mengantisipasi pemberitaan yang *news is fresh* agar ada kebaruan dari informasi yang disajikan.
6. Mengingat karya jurnalistik hasil dari liputan *indepth reporting* tidak hanya mengangkat persoalan yang muncul dipermukaan sehingga dilakukan secara team work. Bisa dikatakan liputan *indepth reporting* bukan merupakan produk satu orang tetapi merupakan satu tim
7. Meskipun fakta dan peristiwa yang disajikan mendalam dan bersifat holistic namun wartawan yang bertugas melakukan peliputan harus menyepakati bahwa yang disajikan adalah fakta-fakta bukan opini.

8. Harus diingat liputan ini membantu memberikan jalan keluar (*mekanisme exit*). Karya jurnalistik yang dihasilkan dari liputan ini jangan sampai meninggalkan begitu saja pertanyaan pembaca.

Meskipun liputan *indepth reporting* harus *holistic* detail namun ukuran sebuah *indepth news* bukan tulisan yang berpanjang-panjang. Namun tulisan itu mampu menyajikan *background* secara detail. Detail bukan berarti bertele-tele dan keluar dari substansi fakta dan peristiwa yang akan ditulis. Pembaca harus mendapatkan deskripsi atas situasi dari fakta dan peristiwa yang akan ditulis serta ada event reporting. Berdasarkan uraian ini maka *liputan in-depth* bukan semata-mata untuk membuat sebuah hipotesis, tetapi lebih pada mengungkap fakta secara detail yang ditujukan untuk melindungi kepentingan public.

Pertanyaan besar mengapa wartawan dan media tempatnya bekerja perlu melakukan liputan *indepth reporting*? Liputan itu untuk kepentingan siapa? Pada intinya, liputan *indepth reporting* akan memperkuat posisi wartawan sebagai penjaga (*watchdog*) bila ada kepentingan public terganggu, kemudian struktur kuasa melakukan *abuse of power*, dominasi informasi, manipulasi informasi represi dan lainnya.

Berdasarkan sisi profesional wartawan kemampuan melakukan peliputan *indepth reporting*, wartawan bisa mempunyai ruang yang lebih untuk mengeksplorasi sebuah fakta atau peristiwa yang menyangkut kepentingan publik. Segala tantangan yang dihadapi wartawan ketika menggali masalah yang akan diangkat untuk liputan *indepth reporting*

akan bisa membantu mengasah kepekaan wartawan terutama ketika ditemui adanya ketidakadilan di masyarakat.

8.2. Ragam *Indepth Reporting*

Indepth reporting pada dasarnya memiliki beberapa ragam. Keragaman ini tentunya berdampak pada cara bagaimana akan memulai, mengolah fakta dan peristiwa yang akan digali di lapangan. Namun dari semua ragam ini berangkatnya tetap pada fakta dan peristiwa yang pernah diberitakan sebelumnya.

8.2.1. *Interpretative Reporting.*

Liputan ini merupakan jenis reportase yang mengumpulkan suatu analisis, kajian atau interpretasi beberapa narasumber dengan pokok arahan dari penulisnya. Misalnya, interpretasi dari beberapa pakar mengenai banyaknya kejadian *human trafficking* yang menggunakan wilayah laut dan kelompok ini banyak mendarat di pulau-pulau kecil. oleh kaum remaja di suatu daerah tertentu. Para pakar tadi akan menyampaikan beberapa pendapat terkait masalah itu kemudian wartawan akan mencari benang merahnya. Liputan bisa mewawancari satu persatu narasumber atau mereka dihadirkan dalam satu event, misalnya diskusi terbatas di kantor redaksi. Tujuan reportase adalah untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi di masyarakat. Interpretative reporting ini mengkait dengan beberapa kasus atau pokok bahasan.

Menurut Mac Dougall seperti dikutip E Subekti (2003) memandang *interpretative news* sebagai berita fakta, peristiwa atau kejadian yang diberi interpretative (penjelasan atau latar belakang). Kejadian dipandang sebagai salah satu mata rantai

yang mempunyai penyebab dan akibat. Latar belakang ini dipakai untuk memperjelas kedudukan fakta (peristiwa atau kejadian) sehingga rangkaian sebab akibat yang melahirkan fakta itu dapat diketahui. Inilah yang bila disertakan dalam penulisan berita membuat tulisan lebih menarik.

Penulis *interpretative news* memperluas cakrawala berita dengan menjelaskan lebih mendalam, apa-apa yang diberitakannya itu karena itu struktur tulisan agak berbeda dengan tulisan soft news. Lead disusul langsung oleh fakta-fakta yang hendak dituturkan, lalu diakhiri dengan penjelasan-penjelasan pada akhir tulisan.

Mengenai penjelasan ‘apa sebab’ dan ‘apa akibat’ ini tidak mesti berasal dari penuhi itu sendiri . Boleh juga penjelasan-penjelasan fakta itu berasal dari pakar dibidangnya yang dimintai penjelasan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menulis *interpretative news*:

1. Penulisnya mutlak perlu menguasai bidang keilmuan yang akan ditulis agar mampu menuliskannya berdasarkan pengetahuan yang mendalam dan kejelian terhadap fakta di bidang itu.
2. Ia harus mampu dan mau menyertakan data informasi yang berkaitan erat dengan fakta yang dikemukakan.
3. Penulis reportase jenis ini biasanya adalah penulis yang berlatar belakang generalis dan mampu mengkaitkan satu interpretasi dengan interpretasi lain.

8.2.2 Participle Reporting

Jenis reportase ini digarap oleh penulis/wartawan yang berani dan biasanya punya jiwa petualangan. Satu konsekuensi

jenis reportase ini adalah kesediaan wartawan untuk masuk ke dalam kehidupan masyarakat yang ditulisnya. Belum banyak media yang mengembangkan *participate reporting* hal ini disebabkan karena (a) membutuhkan waktu yang lebih banyak, (b) membutuhkan dana yang tidak sedikit (c) Membutuhkan kesiapan mental dari wartawannya.

Misalnya, Ingin menulis reportase mendalam yang lengkap dan akurat tentang dunia penyeludupan barang ilegal. Dalam melakukan reportase ini wartawan terjun dan menyatu dengan para penyeludup tersebut. Melalui cara ini akan diperoleh jawaban masalah yang benar-renar lugas tanpa tedeng aling-aling dari berbagai narasumber.

Contoh *indepth reporting* yang kemudian ditulis dalam sebuah buku adalah buku Jakarta Undercover. Buku ini berita tulisan-tulisan tentang sisi lain kehidupan malam di Jakarta.

8.2.3. Precision Journalism

Persaingan yang cukup ketat antar berbagai platform media, mengharuskan media mengembangkan beragam liputan sehingga pembaca memperoleh informasi yang berkecukupan. Salah satu ragam peliputan *indepth reporting* yang banyak dikembangkan adalah *precision journalism* atau jurnalisme presisi,

Ragam liputan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam liputan dengan memberikan pendapat melalui angket. Adanya kemajuan teknologi dan komunikasi semakin memudahkan media untuk mengembangkan *precision journalism*. Dalam menjalankan

ragam liputan ini standar ilmiah juga menjadi acuan ketika menyusun pertanyaan, mengolah hasilnya.

Hasil pendapat masyarakat yang dihimpun dalam *precision journalism* kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan lainnya. Wartawan akan menginterpretasikan data tersebut dan kemudian akan mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau narasumber yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Precision journalism pada dasarnya bukan hal yang baru karena sudah muncul sejak tahun 1970-an. Awalnya, ragam liputan ini dikembangkan untuk mengejar objektivitas dan ketepatan suatu berita. *Precision Journalism* yang menggunakan penelitian sebagai salah satu alat untuk menyajikan objektivitas dan ketepatan. Sejak saat itulah mulai banyak surat kabar atau majalah menyajikan penelitian kuantitatif sebagai dasar tulisannya. Dan dari sini pula mulai berkembang pengumpulan pendapat atau Public Opinion Polling.

Saat ini wartawan dituntut harus menguasai menguasai teknik-teknik penelitian dan sekaligus dapat mengolah/menganalisanya untuk kemudian disuguhkan menjadi sebuah berita yang dijamin objektif dan ketepatannya. Wartawan tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara peliputan yang konvensional antara lain menunggu undangan, atau berdasarkan peristiwa yang tidak terencana maupun yang terencana.

8.2.4. News Analysis

Ragam *indepth reporting* yang saat ini juga banyak dikembangkan adalah news analisis. Tidak semua wartawan

bisa menulis news analisis. Mengapa demikian? Liputan jenis ini digunakan untuk menjawab apa sebab dan latar belakang terhadap satu fakta yang dianggap penting bagi khalayak. Wartawan yang melakukan analisis berita dijuluki *thumbsucker* “penghisap jempol” karena yang ditulis bukan berita on the spot semata-mata. Namun yang ditulis adalah fakta bukan opini sehingga wartawan jenis ini biasanya yang berpengalaman dalam beat tertentu. Contoh, M Hendrowiyono dari Kompas — bidang perhubungan.

8.3. Langkah - langkah penulisan *Indepth reporting*

Pada prinsipnya laporan mendalam memiliki struktur penulisan yang sama dengan berita kisah. Perbedaannya terletak pada adanya unsur manusiawi, yang belum tentu terdapat dalam taporan mendalam.

Laporan mendalam digunakan untuk menuliskan permasalahan secara lengkap, mendalam dan analitis. Jenis pelaporan ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui persoalan secara lebih komprehensif dan mendalam. Materi peliputannya pun dilakukan dari berbagai perspektif dalam suatu permasalahan.

8.3.1. Sebelum Penulisan

1. Berawal dari sebuah ide. Ide yang muncul harus diseleksi dengan memperhatikan nilai berita, aktualitas, magnitude, dramatis, ketokohan, keunikan.
2. Ide yang telah memenuhi persyaratan tadi diolah dengan berbagai dukungan informasi pendukungnya yang bisa

berasal dari kliping koran atau sumber-sumber langsung dari lapangan

3. Ide tersebut kemudian dibuat sebuah outline yang akan mengarahkan laporan yang akan ditulis. Outline ini memegang peranan penting karena menjadi pegangan penulis di lapangan. Dalam outline ini akan dibuat identifikasi permasalahan yang terkait dari berbagai aspek (dimensi) misal aspek budaya, ekonomi, hukum, politik dan lainnya.
4. Menentukan angle tulisan *indepth reporting* bisa lebih dari satu tergantung dari kedalaman tulisan
5. Menentukan narasumber yang akan dijadikan sumberberita dari masalah yang akan digali. Narasumber yang ditulis harus beragam sehingga mampu menggambarkan tema yang akan ditulis
6. Menentukan cara liputan yang akan digunakan. Indepth reporting tidak bisa hanya menggunakan satu cara liputan tetapi harus kombinasi yaitu observasi dan wawancara.
7. Menentukan data sekunder yang berupa kliping atau data-data statistik yang dibutuhkan untuk melengkapi tulisan yang akan dibuat.
8. Menentukan siapa yang akan bertugas mencari data tersebut. Pembagian ini penting supaya di lapangan tidak terjadi tumpang tindih satu dengan lainnya, termasuk disini siapa yang akan menjadi koordinator yang nantinya akan merangkum semua hasil tulisan

8.3.2. Penulisan Laporan

Penulisan laporan *indepth reporting* berbeda dengan penulisan berita lempang. Tulisan bisa dipilah-pilah menjadi beberapa babakan (tulisan) yang masing-masing mempunyai angle sendiri-sendiri sehingga penekanan atau penonjolan dari masing-masing bagian bisa saja berbeda-beda.

1. Tulisan utama merupakan rangkuman dari seluruh dimensi yang akan dikupas dalam laporan *indepth reporting*. Pengungkapan tulisan utama bisa memilih lead yang dramatis karena lead ini akan menghantarkan pembaca untuk terus-menerus membaca dari setiap tulisan yang terkait dengan laporan tersebut.
2. Kemudian melakukan “babakan” laporan. Bagian ini merupakan pengembangan informasi yang sudah terangkum dalam laporan utamanya. Pembagian babakan laporan bisa dilakukan dengan pendekatan :
 - a. Merentang berdasarkan ruang yaitu melakukan satu perbandingan kasus-kasus yang sama yang terjadi di tempat lain. Di sini akan membantu kepada pembaca berbagai alternatif pemecahan masalah atau peta masalah yang sama.
 - b. Merentang berdasarkan waktu yaitu mencari referensi masa lalu untuk mengungkapkan latar belakang peristiwa yang dijadikan tema laporan.
 - c. Merentang berdasarkan aspek masalah yaitu mencari referensi berdasarkan aspek masalah yang akan dikaji, misal aspek budaya.

8.3.3. Sentuhan Akhir

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah dengan melakukan sentuhan akhir dari tulisan yang akan kita buat. Dalam membuat sentuhan akhir maka aspek yang harus diperhatikan adalah :

1. Cerita cukup berimbang karena dilakukan tipe liputan yang cover both side
2. Cerita mengalir dengan bahasa yang lugas, sopan dan tidak bertele-tele jauh dari kesan mengada-ada.
3. Struktur tulisan kompak dan sistematis.
4. Data cukup akurat, baik dalam menyebutkan besaran angka, waktu, tempat, peristiwa, grafik, kurva atau peta.
5. Tulisan tidak melenceng dari tujuan utama penulisan.

8.3.4. Bentuk Laporan

- a. Laporan utama. Ini menyajikan benang merah dari berbagai permasalahan dalam liputan
- b. Babakan tulisan I penonjolan aspek sosial, budaya.
- c. Babakan tulisan II penonjolan aspek ekonomi, politik dan lainnya
- d. Babakan tulisan III profil tokoh pendng yang memegang peran dalam masalah yang akan diangkat.
- e. Babakan tulisan tulisan yang menonjolkan aspek human interst (babakan ini terserah yang akan membuat laporan dan disesuaikan dengan kebutuhan).

8.4. Bagaimana Menggali Potensi Indepth Reporting di Wilayah Perbatasan

Menggali potensi wilayah Kepulauan Riau yang begitu luas bukan perkara mudah. Mengingat luas Kepulauan Riau yang

berupa daratan adalah seluas 8.201,72 Km². (96 % lautan, 4 % daratan). Berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja. Jumlah penduduk 2.064.564 jiwa. Jumlah pulau 2.408 pulau besar dan kecil. Pulau tersebut 1.686 sudah bernama dan 722 belum Bernama dengan 22 pulau terluar.

Misalnya, berita tentang kasus pencemaran pencemaran lingkungan. Kapal-kapal dagang yang ternyata pada bulan-bulan tertentu mereka diam-diam membuang limbah sambal kapalnya terus melaju melewati Selat Malaka. Lalu, limbah itu dibawa angin dan mencemari pantai di kawasan wisata pantai Alif Stone di Natuna.

Alif Stone Natuna ini adalah salah satu potensi wisata maritime kebanggaan Gubernur Provinsi Kepri, H. Ansar Ahmad dan telah ditawarkan ke sejumlah investor asing maupun dalam negeri. Bagaimana investasi ini menarik jika setiap tahun mendapat kiriman limbah?

Melihat fakta tersebut wartawan bisa memulai gagasan tentang pengembangan obyek wisata Alif Stone di Natuna yang eksotis itu. Contohnya, melakukan riset bagaimana kawasan indah seperti itu dikembangkan sebegitu menariknya, sehingga menjadi pilihan utama para pelancong internasional. Ambil contoh langkah pemerintah Thailand mengelola salah satu destinasi wisata terpopulernya, Maya Bay. Sehingga destinasi ini dipilih untuk dijadikan sebagai lokasi syuting film *The Beach* yang dibintangi Leonardo DiCaprio.

Setelah itu, lakukan wawancara sumber-sumber yang kompeten di Natuna atau pun di tempat lain. Boleh juga menghubungi pakar dan professional bidang pariwisata di

Jakarta atau di Batam. Bahkan, kalau perlu menghubungi pusat informasi pariwisata Thailand untuk menggali informasi pengelolaan destinasi wisata dan memasarkannya.

Kemudian, yang terpenting dari semua itu adalah melakukan observasi lapangan. Itu penting. Karena, bagaimana seorang wartawan menulis sebuah pencemaran lingkungan tanpa melihat langsung lokasi, bahkan tidak tahu seperti apa bentuk limbah dan baunya. Karena jika tidak melakukan seperti tersebut di atas, tulisannya pasti kering.

Kemudian, tulisan liputan berkedalaman itu juga harus bisa mengungkap akar masalah, menguraikan hubungan sebab-akibat. Jika setiap tahun terjadi pencemaran laut, harus dilihat limbahnya seperti apa? Jenisnya apa? Limbah seperti itu berasal dari mana? Bagaimana dampaknya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan? Mengapa ini sampai harus jadi begini? Mengapa akibatnya jadi begini? Siapa yang bertanggung jawab? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus terus dikembangkan saat wartawan melakukan wawancara dengan narasumber kompeten.

Akibat dari pencemaran limbah itu adalah hasil tangkapan nelayan berkurang signifikan. Lalu, jelaskan secara lugas dan *gablang*. Ditambahi dengan resolusi, agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Resolusi bisa datang dari Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, para komandan dari berbagai satuan tempur yang bermarkas di Natuna, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya.

Untuk itu, lakukan pemetaan masalah. Jika kapal-kapal dagang yang melintas di Laut Natuna Selatan atau Selat Malaka

yang memang membuang limbah sambal berlayar. Maka, pastikan kapal apakah itu? Kapal bendera negara apa? Atau, bahkan mungkin saja itu dilakukan oleh kapal perang yang melintas? Jadi, kegiatan pemetaan masalah yang jelas dan gamblang, supaya pembaca bisa memahami dengan baik laporan ada tulisan dilihat dari multi dimensi

Sebelum memulai liputan indepth reporting, diskusikan dulu dengan tim. Identifikasi masalah-masalah yang menarik diulas lebih dalam. Boleh peristiwa baru atau juga peristiwa lama, tapi belum sepenuhnya terungkap jelas pembahasannya.

Tapi, hal terpenting sebelum memutuskan topik liputan adalah harus memiliki nilai berita (*news value*). apa untungnya kita melakukan liputan berkedalaman, dengan melakukan observasi lapangan dan pengumpulan data, tapi tidak ada nilai beritanya? *

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Djafar, *Jurnalistik Masa Kini*, 1983, Ghalia Indonesia
- Abrar Ana Nandya, *Bila fenomena Jurnalisme Di Refleksikan*, Sinar Harapan Jakarta Atmakusumah, Astraatmadja (ed) *10 Kiat Menjadi Wartawan*, 2000, LSPP
- Banjarnahor, Gundar, *Wartawan freelance, Panduan Untuk Menu//s Artikel di Media Massa*, 1994, Jakarta
- Hall, Christie, *How to be Freelance Journalist*, 1995, The British Library
- Koesworo, FX, *Di Balik Tugas Kuli Tinta*, 1994, UNS-Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta
- Mappatato, Baso, Audi, *Siaran Pers, Suatu Kiat Penulisan*, 1993, PT Gramedia Jakarta

- Munandar, Satriyo, (ed), *Jurnalisme Investigasi*, Instist, Jakarta, 2001
- Muslimin, *Teknik Mencari dan Menulis Berita*, 1999, Dahara Prize, Jakarta Rivers, William, Editorial, 1994, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Santara, Septiawan, *Jurnalisme Investigasi*, Yayasan Obor, Jakarta, 2003
- Siregar, Ashadi, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*, 1998, Kanisius, Jakarta
- Subekti, Encup, 2003, *Indepth reporting*, materi pelatihan, Yogyakarta

BIODATA PENULIS



Dr.Dra. Susilastuti Dwi Nugraha Jati, M.Si

Penulis dibesarkan di lingkungan keluarga pendidik dan tinggal di Yogyakarta. Pendidikan S1 diselesaikan Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM tahun 1988, S2 Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM tahun 2002, S3 Ilmu Politik di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan tahun 2020. Karirnya dimulai menjadi Jurnalis di Surat Kabar Harian SKH Bernas Yogyakarta (1985-1995), Majalah Suara 'Aisyiyah (1995-sekarang) dan saat ini menjadi anggota Dewan Redaksi. Karir di dunia akademis dimulai menjadi dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN "Veteran" Yogyakarta (1995-sekarang). Mulai tahun 2021 diminta menjadi assessor Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi, Auditor Mutu Internal (AMI). Penulis saat ini aktif menjadi penguji kompetensi wartawan (2008-sekarang) dan menjadi ahli Pers Dewan Pers sejak tahun 2010-sekarang. Beberapa karya riset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan masalah pers, wartawan, pendidikan politik. Beberapa riset yang dihasilkan antara lain Politik Ketegangan Wartawan (Studi Ketegangan Wartawan dan Pemerintah Dalam Panggung Demokrasi Kurun Waktu Tahun 1996-2015), Model Pendidikan Pemilih Pemula (2016), Model pendidikan politik perempuan (2014). Buku yang telah dihasilkan antara lain menyumbang tulisan untuk mengenang

mantan Ketua PWI Pusat Margiono (2021), salah satu penulis buku *Menggagas Haluan Maritim Nasional* yang diterbitkan Balai Pustaka (2021), *Wartawan Bicara Kompetensi Wartawan* (2017), *Yogyakarta Bercerita : Catatan 40 Wartawan Ala Jurnalisme Malioboro* (2017), *Media Komunikasi : Representasi Budaya dan Kekuasaan* (2016), *Ensikoplesi Pers Indonesia* (salah satu tim editor) tahun 2013, *Disinformasi Berita Politik* (2010) , *Meretas kebebasan pers di Indonesia* (2008), *Women Public Sector* (2008).

.....



Saibansah Dardani,

Penulis dibesarkan di lingkungan santri. Lahir di Surabaya, 11 Juli 1972. Anak pasangan Soekroni Asyhad, lulusan pondok pesantren yang bekerja sebagai penghulu di Kantor Urusasn Agama (KUA) Kecamatan Semampir Surabaya dan Siti Chuzinah, guru yang setia dengan profesinya hingga akhir hayatnya. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang SMP dan SMA di Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep Madura (1991). Dan menyelesaikan Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran (STIQ) Batam, jurusan Tafsir Quran (2018). Mengawali karir jurnalistiknya sejak berusia 20 tahun di *Harian Pagi Riau Pos Pekanbaru* (Jawa Pos Group)

pada 1991-1997. Kemudian, menjadi wartawan Majalah Warta Ekonomi Jakarta (1997-1998). Setelah itu pada 1998-2002 menjadi wartawan Majalah Kapital-Jakarta. Selanjutnya, hijrah ke Batam Provinsi Kepri dan menjadi wartawan Harian Lantang-Batam (2002-2004). Setelah itu, pindah ke Majalah Berita Mingguan PILARS Jakarta (2004-2005) sebagai Kepala Biro Riau-Singapura. Lalu, dari Agustus 2005-Desember 2006 menjadi wartawan Harian Seputar Indonesia (Koran SINDO) Jakarta, untuk wilayah Batam dan Kepulauan Riau. Setelah itu, pada Desember 2006-2014 bergeserta menjadi wartawan Harian Ekonomi Bisnis NERACA Jakarta untuk wilayah Batam dan Kepulauan Riau (Kepri). Dan sejak 2014 sampai sekarang menjadi wartawan di media siber pertama di Provinsi Kepri, www.batamtoday.com sebagai Pemimpin Redaksi. Di bidang organisasi profesi, penulis pernah menjadi Sekretaris PWI Provinsi Kepri periode 2005-2010 dan saat ini dipercaya menjadi Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Literasi JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) Pusat. Sudah menulis beberapa buku tentang jurnalistik dan sastra. Selain aktif menjadi wartawan, penulis juga pernah menjadi penguji Kompetensi Wartawan PWI Pusat, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi assessor di Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LKPW) Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Yogyakarta.*



Agung Prabowo

Penulis berasal dari Purwodadi, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Menyelesaikan sekolah SMP dan SMA Negeri di kota tersebut sebelum merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan jenjang universitas. Pendidikan Sarjana ditempuh di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM. Obsesi menyelesaikan pendidikan lanjutan terus dilakukan. Jenjang Magister diselesaikan di Unpad. Begitu pula untung jenjang doktoralnya. Riwayat pekerjaan dimulai sebagai jurnalis di harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta sebelum beralih profesi sebagai dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi UPN 'Veteran' Yogyakarta hingga saat ini. Aktivitas jurnalistik masih ditekuni hingga saat sebagai penguji kompetensi wartawan Indonesia. Selain menulis di beberapa media dan Jurnal, penulis juga menyunting beberapa buku di antaranya Komunikasi Militer, Media-Trik, Mix Metodologi dalam Penelitian Komunikasi, dan beberapa yang lain. Penulis juga menjadi pengurus pusat di organisasi Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) selama tiga periode pada divisi Litbang. Baik sebagai anggota maupun koordinator. Saat ini sedang mengemban tugas sebagai ketua Departemen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta.



Nikolaus Loy

Penulis berasal dari Ngada, Flores, NTT. menyelesaikan SD, SMP di kampung Maghilewa dan SMAS St. Yohanes Berchmans Todabelu, Ngada. Studi Sarjana di Jurusan HI, UGM Yogyakarta (1995), MA Development Studies, Monash University, Australia (2002). Studi Doktor, dengan topik riset 'sekuritisasi isu keamanan energi, di FISIPOL UGM (2021). Sejak tahun 1997 menjadi dosen Jurusan HI UPN "Veteran" Yogyakarta. Tugas lain adalah Ketua PUSHANKAM UPN "Veteran" Yogyakarta, Koordinator Divisi Kebijakan pada Pusat Studi Mineral dan Energi, UPN "Veteran" Yogyakarta. Menjadi editor dan contributor dalam beberapa buku: *Menggagas Haluan Maritim Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, (2021); "Ke Mana Bio-Diesel Mengalir", dalam *Petani Buntung di Negeri Sawit*, SPKS dan IPD, Yogyakarta, (2019); "Siapa Menggembalakan Ikan: Property Rights dan Pencegahan Konflik atas Ruang Maritim", dalam *Mengamankan Laut: Tata Ruang dan Keamanan Maritim*, Elex Media Computindo, Jakarta, (2019); "MKT, ISPS Code dan Penguatan Manajemen Pelabuhan", dalam *Kuala Tanjung Sebagai Multi Purposes Port Ekonomi Maritim*, USU, Medan, (2018); "Ketahanan Energi, Transisi Sosio-teknis dan Pengembangan Energi Lautan" dalam *Membangun Dari Laut: Industri dan Jasa Maritim Indonesia*, Kemenko Kemaritiman RI, Jakarta, (2017); "Sekuritisasi Sebagai Strategi Kampanye Mendukung Pelestarian Terumbu Karang" dalam *Pengelolaan Taman Nasional Laut Bunaken sebagai Destinasi Wisata Laut*

Dunia, Universitas Sam Ratu Langie, Manado, (2017). Riset dan publikasi tentang topik-topik perdamaian, keamanan energi dan ekonomi politik publik. Pernah menjadi short term consultant di Bank Dunia, UNDP Indonesia, BKKBN Pusat, Pemerintah Daerah. Bisa dihubungi di nikolausloy@upnyk.ac.id

.....



Arif Wibawa

Saat ini sebagai pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Matakuliah yang diampu adalah bidang Jurnalisme seperti Penulisan Berita, Dasar-dasar Jurnalistik, Perbandingan Sistem Media dll. Selain sebagai pengajar, Arif juga aktif sebagai penguji sertifikasi wartawan. Pengalamannya sebagai penguji sertifikasi wartawan telah menghasilkan wartawan yang berkompeten di daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain seperti di Natuna, Lingga, Batam, Pekan Baru dan daerah lain di Indonesia seperti Sulawesi selatan, Kalimantan Barat, Banyuwangi.

Sebelum sebagai pengajar dan penguji sertifikasi wartawan, Arif Wibawa punya pengalaman bekerja di Lembaga media massa. Pernah menjadi reporter radio di Yogyakarta, pernah menjadi penulis scenario sinetron di televisi dan pernah bekerja di Surya Citra Televisi (SCTV) di Surabaya.

Penerbit:
LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

ISBN 978-623-389-104-2



9 786233 891042